

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 51 TAHUN 2011  
TENTANG DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
DI KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar magister sains dalam  
Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :  
AGUS WINARNO  
NIM. 018264368**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2013**

## Abstrak

### **Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran Tahun 2012 Di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat**

**Agus Winarno**  
**Universitas Terbuka**  
**AGUS\_WINARNO84@hotmail.co.id**

**Kata kunci** : BOS, penggunaan dana bantuan operasional sekolah,

Program BOS dilatarbelakangi oleh kenaikan harga BBM yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat yang berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin terhadap Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Sesuai UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Implementasi Penggunaan dana BOS di SD Negeri di Kecamatan Pangkalan Banteng, (2) Faktor pendukung penghambat penyusunan pelaporan Keuangan dana Bantuan Sekolah. Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan PERMENDIKBUD Nomor 51 tahun 2011., (2) Untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi kendala dan pendorong implementasi kebijakan dana BOS berdasarkan Permendiknas Nomor 37. Tahun 2010.

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. dimana data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Kalaupun ada angka - angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain. Penulis menentukan lokasi sebagai sampel penelitian di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya Sekolah Dasar Negeri (SDN), Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat

Kesimpulan penelitian adalah: (1) tingkat keefektivan penggunaan dana BOS sudah berjalan baik, (2) tingkat pembelajaran sudah berjalan baik, (3) penerapan dana BOS dalam pembelajaran belum dapat berjalan dengan baik, masih banyak kendala yang mungkin dihadapi oleh sekolah misalnya mengenai kegiatan siswa di luar pembelajaran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan saran kepada: (1) Kepala Diknas sebagai pimpinan di dinas pendidikan Kecamatan Pangkalan Banteng, penelitian ini dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan penggunaan dana BOS dan evaluasi penggunaan dana BOS, (2) Kepala Sekolah, bendahara sekolah dan komite, memahami fungsi dana BOS bagi Sekolah, pemanfaatan yang efektif dan efisien terhadap penggunaan dana BOS, upaya peningkatan mutu pembelajaran karena salah satu tujuan dari pemerintah memberikan dana BOS adalah peningkatan kualitas siswa, (3) Peneliti Lanjutan yang akan meneliti hal yang sama, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas lagi dengan karakteristik yang berbeda, sampel juga berbeda.

## **Abstract**

### **The Implementation Of School Operational Assistance Program (BOS) Fiscal Year Year 2012 In Sub Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat**

**Agus Winarno**  
**Universitas Terbuka**  
**AGUS\_WINARNO84@hotmail.co.id**

**Keywords: BOS, Use of School Operational Assistance Fund**

BOS program is motivated by the rise in fuel prices that causes a decline in the purchasing power of the people who have a negative impact on poor people access to the Nine-Year Basic Education. Law Appropriate with the. 20 Year 2003 on National Education System mandates that "Every citizen has the same right to obtain a quality education and the Government shall provide services and facilities and ensure the implementation of quality education for every citizen without discrimination.

The problems of this research are: (1) How to Use Implementation of BOS funds in public primary schools in the District of Pangkalan Banteng, (2) supporting factors inhibiting the preparation of financial reporting School Aid fund. Research objectives are (1) To describe and analyze the implementation of policies PERMENDIKBUD No. 51 in 2011. (2) To describe the factors that restrict and push the policy of implementation based Permendiknas BOS No. 37. In 2010.

The study design used is descriptive qualitative research approach. where data are collected in the form of words, images, and not the numbers. Even if there are numbers - the numbers just as a supporting data. Data obtained from interview transcripts, field notes, photographs, personal documents and others. Authors determined the location of the sample in the District of Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat, particularly the state Elementary School (SDN), District of Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat

Research conclusions are: (1) the level of effectiveness of the use of the funds has been running well, (2) the level of learning is going well, (3) the implementation of BOS funds in learning can not be shooting went well, there are still a lot of obstacles that may be faced by the school such as the activity of students outside learning Based on these results, the researchers gave suggestions to: (1) Head master of as a leader in the education department District Pangkalan Banteng, this study can be used as a consideration in determining the use of the funds and policy evaluation of use of the funds, (2) Principal, treasurer and school committees, to understand the function of BOS funds for schools, effective and efficient utilization of the use of the funds, efforts to improve the quality of learning because one of the goals of the government is to improve the quality of BOS funds students, (3) Advanced Researchers will examine the same , is expected to conduct research broadly with different characteristics, the sample is also different.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul "**Implementasi Permendikbud Nomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kota Waringin Barat**" adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palangka Raya, Juli 2013  
Yang menyatakan,



Agus Winarno  
NIM. 018264368

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**Judul TAPM** : **IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO. 51  
TAHUN 2011 TENTANG DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI  
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**Penyusun TAPM** : **Agus Winarno**

**NIM** : **018264368**

**Program Studi** : **Magister Administrasi Publik**

**Hari/Tanggal** : **Juni 2013**

Pembimbing I

  
**ANDY FEFTA WIJAYA, MDA, Ph.D**  
NIP. 131 966 869

Pembimbing II


  
**DR. H. UTUYAMA HERMANSYAH, M.Si.**  
NIP. 19540417 197803 1 001

Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu/  
Program Magister Administrasi Publik

  
**FLORENTINA RATIH W, S.IP. M.Si**  
NIP. 19710629 199802 2 001

Direktur Program Pascasarjana

  
**SUCIATI, MSc, Ph.D**  
NIP.194520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

**N A M A** : AGUS WINARNO  
**N I M** : 018264368  
**PROGRAM STUDI** : Magister Administrasi Publik  
**JUDUL TAPM** : **IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 51  
TAHUN 2011 TENATANG DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI KECAMATAN  
PANGKALAN BANTENG KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister Adminastrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

**Hari/Tanggal** : Sabtu, 20 Juli 2013  
**W a k t u** : 07.00-09.00 WIB

dan telah dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS

**Panitia Penguji TAPM**

**Ketua Komisi Penguji** :  
**SUCIATI, M.Sc, P.hD**

**Penguji Ahli** :  
**Prof. DR. SANGKALA, M.Si**

**Pembimbing I** :  
**ANDY FEFTA WIJAYA, MDA, Ph.D**

**Pembimbing II** :  
**DR.H. UTUYAMA HERMANSYAH, M.Si**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirattuhan yang Maha Esa Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan TAPM “Implementasi Permendikbud Nomor 51 tahun 2011 tentang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat”.

Penulisan TAPM ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Penulis Menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Suciati, M.Sc.PhD. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Ibu Floretina Ratih Wulandari, SIP, M.Si selaku Kabid Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
3. Bapak Prof. DR. Holten Sion, M.Pd selaku Kepala UPBJJ Palangka Raya sebagai penyelenggara Program Pascasarjana;
4. Bapak Andi Fefta Wijaya, M.DA,Ph.D selaku dosen pembimbing satu dan Bapak Dr. H. Utuyama Hermansyah, M.Si selaku dosen pembimbing dua yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan TAPM ini;

5. Ibu Stefani Ayu Made, A.K., M.Si selaku pengelola Program Pascasarjana UPBJJ Palangkaraya sebagai penanggung jawab program ini;
6. Bapak Rusmawardi, SH, MH dan Bapak Drs. H. Mawardi Ardi, M.Si Selaku Pengelola Universitas Terbuka Program Pascasarjana Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan materiil dan moral;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ Palangkaraya Terutama dari Kota Pangkalan Bun yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan TAPM ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya sumbangan pemikiran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Palangkaraya, Agustus 2013

Penulis



## Daftar Isi

	Halaman
Abstrak .....	i
Abstract .....	ii
Lembar Persetujuan .....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
Daftar Gambar .....	x
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Teori .....	10
B. Kajian Terdahulu .....	55
C. Kerangka Berpikir .....	64
D. Pokok Bahasan .....	66
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>67</b>
A. Desain Penelitian .....	67
B. Informan .....	68
C. Instrumen Penelitian .....	69
D. Sumber Data .....	70
E. Proses Pengumpulan Data .....	70
F. Fokus Penelitian .....	71
G. Lokasi Penelitian .....	73
H. Keabsahan Data .....	73
I. Metode Analisis Data .....	75
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>79</b>

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	79
B. Mekanisme dan Pelaksanaan BOS .....	87
C. Pembahasan .....	112
D. Manfaat dan Dampak Pelaksanaan BOS .....	122
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	127
A. Simpulan .....	127
B. Saran .....	131
DAFTAR PUSTAKA .....	134

Universitas Terbuka

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Whiteboard Pengganti Blackboard.....	97
Gambar 2. Poster Penggunaan Dana BOS .....	108
Gambar 3. Buku Paket Di Beli Dari Dana Bos.....	109
Gambar 4. Globe Sebagai alat Peraga Pendidikan .....	110
Gambar 5. Spidol Sebagai bahan Habis Pakai .....	111
Gambar 6. Kapur dan Isi Spidol.....	111

Universitas Terbuka

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Luas Kabupaten menurut Kecamatan .....	80
Table 2. Perkembangan jumlah penduduk .....	82
Table 3. Jumlah dan kepadatan penduduk .....	83
Table 4. Keadaan SD Di Kecamatan Pangkalan Banteng.....	84
Tabel 5. Daftar Penerimaan Dana BOS .....	86
Tabel 3. Tingkat Prosentase Penggunaan Dana BOS .....	124

Universitas Terbuka

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Biodata
2. Izin Penelitian
3. Instrumen Wawancara
4. Kutipan Wawancara
5. Lampiran Foto-foto
5. Permen Tentang Alokasi Dana BOS

Universitas Terbuka

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam pembuatan suatu laporan haruslah dapat dipertanggung jawaban baik secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa ataupun kepada pimpinan suatu instansi lebih-lebih kepada masyarakat. Apapun suatu laporan tersebut haruslah akurat sesuai dengan alokasi penggunaannya yang telah ditetapkan, menuntut akuntabilitas yang benar-benar valid. Sebagai organisasi terbesar yaitu Negara memiliki kewenangan dalam mengatur masyarakatnya, agar tercipta kemakmuran dan ketertiban bersama. Kemajuan sebuah Negara merupakan tanggung jawab semua warga dan pemangku kewajiban utama adalah pemerintah, sudah merupakan cita-cita semua Negara agar pemerintahannya menjadi baik dapat melayani keperluan warganya di segala bidang, baik bidang politik ekonomi ataupun pendidikan. Dalam istilah *Good Governance* inilah cita-cita setiap negara terutama Negara berkembang.

Pendidikan merupakan jalur tercepat dalam merubah nasib seseorang, pelaksanaan pengeyaman pendidikan sangatlah di jamin oleh undang-undang. Merupakan hak setiap orang dari mulai titian sampai dengan liang lahat tak terbatas dengan usia, waktu dan tempat, *long life education*, hidup yang panjang adalah pendidikan, menuntut ilmu juga tidak membedakan jenis kelamin. Di dalam organisasi terbesar dunia yaitu perserikatan bangsa-bangsa (PBB) ada badan khusus yang menangani masalah pendidikan yaitu *UNICEF (United Nations Educational,*

*Scientific and Cultural Organization*) Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, kebudayaan perserikatan bangsa-bangsa.

Tingkat pendidikan masyarakat secara umum di bawah rata-rata Negara *ASEAN*. Tingkat buta aksara untuk penduduk diatas 10 tahun dapat ditekan hingga ke angka 14 persen. Namun hal tersebut masih tertinggal jauh dibanding dengan Negara-negara *ASEAN* lainnya seperti, Thailand, Filipina, dan Singapura yang pada mampu menekan tingkat buta aksara penduduk diatas 10 tahun hingga 2 sampai 12 persen (Kartasasmita, 1996:289).

Dalam hal belajar untuk tingkat SD melalui kebijakan wajib belajar 9 tahun, Indonesia sudah sejajar dengan Negara tetangga yang lain. Sisi lain kualitas SDM dapat diukur dari kemampuan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tertentu yang tergantung dari jenis pendidikan utamanya yang menunjang riset dan teknologi. Hal ini pada saat yang sama ditegaskan oleh Kartasasmita (1996:290), bahwa :

Di bidang pendidikan tinggi masih terjadi ketidak seimbangan. Jumlah mahasiswa Indonesia bidang eksata hanya 28,4 persen, sisanya (71,6 persen) menempuh bidang sosial. Hal ini berdampak pada jumlah sarjana sains dan teknologi yang menjadi ukuran kekuatan kemampuan IPTEK. Apabila diukur dari persentase jumlah penduduk usia 22 tahun, Indonesia baru mencapai kurang dari 0,5 persen pada tahun 1991, sementara Taiwan 4,2 persen, Korea dan Jepang masing-masing 6,0 persen pada tahun 1990.

Dalam *study* yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa 40 persen dari total tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor swasta tidak memiliki keahlian sesuai dengan bidang yang diharapkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Jelas ini merupakan akibat dari ketidak sesuaian antara keahlian lulusan dan keahlian yang

dibutuhkan oleh pasar kerja atau mutu lulusan tersebut tidak mencapai standart minimal dari keahlian yang diperlukan.

Permasalahan stagnasi keahlian terkait dengan tenaga kerja ini adalah masalah bangsa. Karena dampak langsungnya adalah rendahnya pendapatan nasional serta merosotnya kualitas bangsa secara multidimensional. Sementara, tegas di atur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU Nomor 20 Tahun 2003:3)

Faktor pendidikan diyakini memiliki nilai kontribusi yang sangat tinggi bagi produktifitas nasional. Berbagai penelitian di sejumlah Negara telah membuktikan bahwa peningkatan pendidikan berimplementasi positif dan signifikan terhadap peningkatan *national income*. Peran pendidikan dalam peningkatan produktifitas nasional yang di tunjukan oleh data-data estimasi di atas sangat dapat diterima dan beralasan. Hal ini terutama jika di tinjau dari keberadaan pendidikan yang pada hakekatnya merupakan *indirect investment* bagi proses produksi dan *direct investment* bagi peningkatan sumber daya manusia (*human quality*).

Pendidikan akan meningkatkan dan mempertinggi kualitas tenaga kerja, sehingga memungkinkan tersedianya angkatan kerja yang lebih terampil, handal dan sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Karena itu, hampir semua bangsa mewujudkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional mereka. Sumber daya manusia yang bermutu, yang



merupakan produk pendidikan, merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu Negara.

Kebijakan pembangunan sektor pendidikan dalam kurun waktu 2004 sampai 2011 meliputi akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan Wajib Belajar 9 Tahun, merupakan program pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan Zaman. Tidak relevan jika zaman modern ini masih ada anak-anak yang tidak bersekolah dan ada pula yang masih buta huruf. Oleh karena itu pemerintah berusaha meningkatkan kualitas manusia melalui jenjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, untuk merealisasikan tujuan tersebut di atas memerlukan kerjasama yang kooperatif antara pemerintah dan masyarakat.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa belajar merupakan tanggung jawab Negara yang di selenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran. Bagi sebagian orang, pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan formal. Di Indonesia adanya program pemerintah Wajib belajar Sembilan tahun, suatu program dari pemerintah untuk menggalakan pendidikan kepada masyarakat dengan minimal mengenyam pendidikan setingkat sekolah Dasar (SD). Enam tahun di sekolah dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar Belajar 9 tahun dapat diukur dengan angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115 persen, sedangkan SMP pada tahun 2012 telah mencapai 98,11 persen, sehingga wajib belajar 9 tahun telah tuntas lebih awal dari target deklarasi *Education For All* (EFA) di Dakar.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak Juni 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2012 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Guna kelancaran program ini pemerintah memberikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di ambil dari subsidi bahan bakar premium, dengan begitu tanggungan masyarakat akan biaya pendidikan sudah berkurang.

Dengan adanya bantuan pemerintah tersebut di harapkan tidak ada warga Negara yang tidak bersekolah. Apabila semua warga Negara terutama generasi penerus bangsa dapat mengenyam pendidikan terutama pendidikan formal maka secara langsung dapat meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia ke depannya yang merupakan aset terpenting dalam kehidupan bernegara.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang diperuntukan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana wajib belajar 9 tahun. Mulai tahun 2011 dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme penyaluran dana, yang semula dari skema APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk dana. Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud Nomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan bantuan Operasional Sekolah tahun anggaran 2012. Pemakaian alokasi dan mekanisme telah di atur dalam Undang-undang tersebut.

Dengan adanya bantuan pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut maka masyarakat sangat terbantu dari tahun ketahun sistematika penyaluran dana bantuan tersebut terus di evaluasi diharapkan benar-benar tepat sasaran. Maka di

buatlah suatu aturan di setiap tahun anggaran, di tahun anggaran 2012 ini pemerintah melalui menteri pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan peraturan No. 51 tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2012.

Dengan adanya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut maka penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dapat sebarang digunakan, semua ada rambu-rambunya, bahkan dari pelaporannya pun di tentukan secara teknis. Peraturan yang membuat adalah pemerintah pusat jadi bersifat global. Padahal di daerah banyak permasalahan-permasalahan yang tidak di lihat oleh pusat, seperti hasil wawancara dengan salah satu Kepala Sekolah SD Negeri di Kecamatan Pangkalan Banteng, bahwa di sekolah tersebut memiliki jumlah murid 171 sedangkan guru yang berstatus pegawai negeri hanya 2 orang, membuat sekolah harus mengangkat guru honorer sebanyak 4 orang, hal ini membuat dana BOS yang di pakai untuk membayar guru honorer lebih dari 20 persen, namun secara laporan harus menulis 20 persen, sehingga mau tidak mau peraturan di jalankan namun tidak sesuai dengan kenyataan.

Pada PERMENDIBUD No. 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012. Di dalam salah satu pasalnya yang menjelaskan tentang penggunaan Dana BOS pada poin ke delapan di katakan Pembayaran honorarium bulanan honorer dan tenaga kependidikan honorer, di dalam penjelasannya di pertegas "Sekolah Negeri boleh menggunakan tidak lebih dari 20

persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima untuk komponen pembiayaan ini. Sedangkan di beberapa SD Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng, yang memiliki jumlah murid berbeda-beda hanya memiliki jumlah guru berstatus PNS sedikit misalnya 2, jadi yang 4 adalah guru honorer, dalam kejadian ini jelas sudah terlihat secara kalkulator bahwa untuk membayar guru Honorrer tersebut jadi melebihi dari 20 persen dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima. Dengan sudah berjalannya dana BOS di SD Negeri Kecamatan Banteng, diharapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang penargetan, pendataan, sosialisasi, penyaluran, penggunaan, serta peran serta dari komite sekolah yang ada.

## **B. Rumusan Masalah**

Adanya petunjuk teknis ini membuat harus sesuai dengan petunjuk tersebut. PERMENDIKBUD nomor 51 tahun 2011 ini memberikan arah yang sudah pasti akan pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pelaporan keuangan tersebut. Dengan begitu telah menyebabkan permasalahan dalam penataan usahanya, dari uraian di atas dapat ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Penggunaan dana BOS di SD Negeri di Kecamatan Pangkalan Banteng ?
2. Faktor pendukung penghambat Implementasi Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan PERMENDIKBUD Nomor 51 tahun 2011.
2. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi kendala dan pendorong implementasi kebijakan dana BOS berdasarkan Permendiknas Nomor 37. Tahun 2010.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk pengembangan teori administrasi keuangan dalam menentukan kebijakan publik sehingga lebih bermanfaat bagi yang lain terkait penelitian implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat di pergunakan untuk menyempurnakan penatausahaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Baik oleh Tim penanggung jawab BOS, Manajer BOS maupun Kepala Sekolah. Selanjutnya dapat di rasakan oleh siswa dan masyarakat luas. Di harapkan juga dapat bermanfaat bagi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah terkait pengembangan kebijakan terutama masalah pendidikan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Implementasi Kebijakan Publik

Pada konsep pembagian kekuasaan lembaga Negara menurut konsep Trias Politica bahwa, *policy level* diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif, sedang *organizational level* dipernakan oleh lembaga eksekutif. Selanjutnya *operasional level* diperankan oleh lembaga eksekutif. Selanjutnya *operational level* dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, kelembagaan atau kementerian. Pada masing-masing level, kebijakan publik di wujudkan dalam bentuk *institutional arrangement* atau peraturan perundangan yang disesuaikan dengan tingkat hieraknya. Sementara *pattern interaction* adalah pola interaksi antara pelaksana kebijakan paling bawah (*street level bureaucrat*) dengan kelompok sasaran (*target group*) kebijakan yang menunjukkan pola pelaksanaan kebijakan yang menentukan dampak (*outcome*) dari kebijakan tersebut. Hasil suatu kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan akan ditinjau kembali (*assessment*) untuk menjadi umpak balik (*feedback*) bagi semua level kebijakan yang diharapkan terjadi sebuah perbaikan atau peningkatan kebijakan. Efektifitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terjadi dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga aktifitas pokok proses

kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta bersiklus secara terus menerus samapai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang akan dipakai untuk membahas rumusan masalah yang dikemukakan didepan adalah teori implementasi George C. Edward III. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni : *What is the precondition for successful policy implementation* dan *What are the primary obstacles to successful policy implementation*.

George C. Edward III berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengkaji tujuh faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi.

#### 1. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-



kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu pertama, Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*). Kedua, birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. Ketiga, birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. Ke-tujuh, fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleksitas dan luas. Kelima, birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati. Keenam, birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh pihak luar.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan, berdasarkan penjelasan diatas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III (dalam Winarno 2005: 150) terhadap dua karakteristik utama dari birokrasi yakni : “*Standart Operational Prosedure (SOP)* dan fragmentasi”. *Standart Opertional Prosedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta

kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk mengulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan mengemukakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa “SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala dalam implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III (dalam Winarno 2005-155) menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Budi Winarno, 2005;153-154);

*Pertama*, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan”.

## 2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Scherchorn, Jr (1994:4) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: “Informasi, Material, *Equipment, Facilities, Money, People*”. Sementara Hoge (1996:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: “*Human resources, Material resources, Financial resources and Information resources*”. Pengelompokkan ini diturunkan pada pengkategorian yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: “*Human resources-can be classified in a variety of ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc*”. Sumber materiil dikategorikan ke dalam: “*Material resources-equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc*”. Sumber daya finansial digolongkan menjadi: “*Financial resources-cash on hand, debt financing, owner’s investment, sale reveue, etc*”. Serta sumberdaya informasi dibagi menjadi: “*Data resources-historical, projective, cost, revenue, manpower data etc*”. Edward III (1980:11) mengkategorikan sumberdaya organisasi terdiri dari: “*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and*

*supplies*”. Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan;”*Insufficient resources will mean that laws will not be provided and reasonable regulation will not be developed*”. Sumberdaya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya kedalam *output*. Sedang secara teknologis, sumbernya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi”.(Tachjan,2006:135)

Menurut Edward III (dalam Agustino 2006:158-159), sumberdaya merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, diantaranya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak cukup memadai ataupun tidak kompeten. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup, tetapi diperlukan kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang sesuai (kompeten dan kapabel).

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang ada.

c. Wewenang

Pada wewenang umumnya harus berifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat mengagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2005: 142-143) mengemukakan “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang

besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai keputusan awal. Sebaliknya, jika para pelaksana bersifat negatif atau menolak implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang “zona ketidakacuhan” dimana para pelaksana kebijakan melalui keluasaannya (diskresi) dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambat lainnya.

#### 4. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yakni :

Pertama, transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidori di tengah jalan. Kedua, kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksanaan kebijakan

(*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu atau mendua. Dan ketiga, konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum dalam Winarno (2005:127). Terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena penjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. Ketiga, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

Menurut Winarno (2005:128). Faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari pertanggung jawaban kebijakan.

## 2. Kebijakan publik

### a. Pengertian dan proses kebijakan publik

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7).

Kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan, karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak kedalam realita. Artinya pelaksanaan kebijakan publik berusaha menghasilkan *outcome* yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi, tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan



Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, di sinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Thomas Dye, 1992; 2-4).

Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai *public actor*, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Seorang pakar mengatakan: (Aminullah dalam Muhammadiyah, 2001: 371 – 372): bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan ada yang mengatakan: (Nugraha 2003: 492-499) bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata *policy*, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. Meski demikian kata

kebijakan yang berasal dari *policy* dianggap merupakan konsep yang relatif (Michael Hill, 1993: 8):

*The concept of policy has a particular status in the rational model as the relatively durable element against which other premises and actions are supposed to be tested for consistency.*

Dengan demikian yang dimaksud kebijakan dalam Kybernology dan adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan Thomas R. Dye merumuskan model kebijakan antara lain menjadi: model kelembagaan, model elit, model kelompok, model rasional, model inkremental, model teori permainan, dan model pilihan publik, dan model sistem.

Selanjutnya tercatat tiga model yang diusulkan Thomas R. Dye, yaitu: model pengamatan terpadu, model demokratis, dan model strategis. Terkait dengan organisasi, kebijakan menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik tulisan maupun lisan yang memberikan suatu batas umum dan arah sasaran tindakan yang akan dilakukan pemimpin (Terry, 1964:278).

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin, 2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. **Kebijakan umum**, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. **Kebijakan pelaksanaan** adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. **Kebijakan teknis**, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Namun demikian berdasarkan perspektif sejarah, maka aktivitas kebijakan dalam tataran ilmiah yang disebut analisis kebijakan, memang berupaya mensinkronkan antara pengetahuan dan tindakan. Dikatakan oleh William N. Dunn (William N. Dunn, 2003: 89)

Analisis Kebijakan (*Policy Analysis*) dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan. Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana kebijakan publik digambarkan oleh Bill Jenkins didalam buku *The Policy Process* sebagai Kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu.

Selanjutnya Bill Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai: (Michael Hill, 1993: 34)

*A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve.*

Dengan demikian kebijakan publik sangat berkaitan dengan administrasi negara ketika publik aktor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan “administrasi negara.” Menurut Nigro dalam buku M. Irfan Islamy “Prinsip-prinsip Kebijakan Negara (Islamy, 2001:1), administrasi negara mempunyai peranan penting dalam merumuskan kebijakan negara dan ini merupakan bagian dari proses politik. Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu kebijakan dalam pandangan Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh Said Zainal Abidin (Abidin, 2004: 21) adalah sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik.

Terkait dengan kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye penulis buku “*Understanding Public Policy*, yang dikutip oleh Riant Nugroho D (Riant, 2004:3)

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil. Sedangkan menurut Said Zainal Abidin, alumni University of Pittsburgh, Pennsylvania, US, (Said Zainal Abidin, 2004: 23) kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya. Dalam Kybernology dan dalam konsep kebijakan pemerintahan kebijakan publik merupakan suatu sistem nilai yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan

Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada aparat, tepat, dan konsisten. Kurangnya sumber daya akan berakibat ketidakefektifan penerapan kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Akhirnya struktur birokrasi mempunyai dampak atas penerapan dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut.

### 3. *Good governance*

Pengertian *good governance* salah satunya dapat dilihat dari pemahan yang dimiliki oleh IMF maupun *World Bank* yang melihat *Good Governance* sebagai sebuah cara untuk memperkuat “kerangka kerja institusional dari pemerintah”. Hal ini menurut mereka berarti bagaimana memperkuat aturan hukum dan prediktibilitas serta imparsialitas dari penegaknya. Ini juga berarti mencabut akar dari korupsi dan aktifitas-aktifitas *rent seeking*, yang dapat dilakukan melalui transparansi dan aliran informasi mengenai kebijakan dan kinerja dari institusi pemerintah dikumpulkan dan diberikan kepada masyarakat secara memadai.

*United Kingdom Overseas Development Administration (UK/ODA)*, 1993 menjelaskan karakteristik *good governance* (mereka sebut sebagai *good government*), yaitu: legitimasi, akuntabilitas, kompetensi, penghormatan terhadap hukum/hak-hak asasi manusia.

*Governance*, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.

- 1 Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Definisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya

ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif.

- 2 Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Meskipun mengakui ada banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial, *governance* bukanlah sesuatu yang terjadi secara *chaotic*, random atau tidak terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep *governance* wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari pelaku-pelaku yang berbeda. Oleh sebab itu, karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan dominasi pemerintah, maka pelaku-pelaku diluar pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif. Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi *governance* adalah “mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan”, sehingga *good governance*, dengan demikian, “adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang

stabil dengan syarat utama efisien) dan (relatif) merata.”Menurut dokumen *United Nations Development Program* (UNDP), tata pemerintahan adalah “penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

3. Jelas bahwa *good governance* adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu *governance* lebih banyak berkaitan dengan kinerja Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan infrastuktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, *rule of law*, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. *Good governance* sangat terkait dengan dua hal yaitu (1) *good governance* tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi dan (2) tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu.



#### 4. Program dan kegiatan bantuan pemerintah

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

BOS dialokasikan kepada daerah provinsi untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sekolah penerima BOS adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP/SMPLB/SMPT), termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

BOS ditujukan terutannya untuk stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah baik untuk BOS Daerah dan atau Bantuan Operasional Pendidikan. Mekanisme penyaluran BOS Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui pemindah bukuan dana dari Rekening Kas Umum Negara

ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan secara langsung ke satuan pendidikan dasar dalam bentuk hibah.

## 5. Pengertian Anggaran

Dalam pengelolaan perusahaan, terlebih dahulu manajemen menetapkan tujuan dan sasaran, dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dampak keuangan yang diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari rencana kerja tersebut, kemudian disusun dan dievaluasi melalui proses penyusunan anggaran.

Adapun pengertian anggaran menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (1989 : 6), adalah sebagai berikut :

“Suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan”.

Pada dasarnya anggaran yang bermanfaat dan realistis tidak hanya dapat membantu mempererat kerja sama karyawan, memperjelas kebijakan dan merealisasikan rencana saja, tetapi juga dapat menciptakan keselarasan yang lebih baik dalam perusahaan dan keserasian tujuan diantara para manajer dan bawahannya.

Menurut Mulyadi (1993 : 438), anggaran disusun oleh manajemen dalam jangka waktu satu tahun untuk membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diperhitungkan. Dengan anggaran, manajemen mengarahkan jalannya kondisi perusahaan. Tanpa anggaran, dalam jangka pendek perusahaan akan berjalan tanpa arah, dengan pengorbanan sumber daya yang tidak terkendali (*at any cost*).

Lebih jelas lagi Munandar (2001 : 1), mengungkapkan pengertian anggaran adalah sebagai berikut :

“Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.”

## 6. Akuntabilitas Pendidikan

Mencakup eksistensi dari suatu mekanisme (baik secara konstitusional maupun keabsahan dalam bentuknya) yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan performan perilakunya. Akuntabilitas membutuhkan keterbukaan dan kejelasan serta keterhubungannya dengan kebebasan media.

Menurut Rita Headintong (2000:84), Akuntabilitas bukan hal baru. Ia mengatakan:

*As far back as the 1830 when public was used to establish a national education system 'some were concerned that the spending of public money should be properly supervised and controlled, and others were dissatisfied with the practical aspects such as the poor quality of the teachers' (Lawton and Gordon 1987, p.7).*

Pada tahun 1976 Prime Minister Callaghan mengusulkan bahwa pendidikan sudah seharusnya lebih akuntabel kepada masyarakat dan kecenderungan umum bahwa isu-isu pendidikan seharusnya terbuka telah membuka ruang bagi untuk menanggapinya, sekalipun itu bersifat non-profesional."(Gipps and Golstein, 1983 dalam Rita Headington, 2000).

Di Indonesia akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, juga masih menempuh jalan panjang. Ketika terjadi perubahan mendasar dalam sistem pendidikan, isu akuntabilitas sepertinya memperoleh nafas baru. Sekolah-sekolah sebagai basis penerapan manajemen pendidikan dituntut harus mampu mewujudkan akuntabilitas bagi publik.

Kalau begitu apa sebenarnya akuntabilitas itu? Menurut Slamet (2005:5), "Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sementara Zamroni (2008:12) mendefinisikan akuntabilitas *"is the degree to which local governments have to explain or justify what they have done or failed to do."* Lebih lanjut dikatakan bahwa *"Accountability can be seen as validation of participation, in that the test of whether attempts to increase participation prove successful is the extent to which people can use participation to hold a local government responsible for its action."* Pendapat Zamroni mengenai akuntabilitas dikaitkan dengan partisipasi. Ini berarti akuntabilitas hanya dapat terjadi jika ada partisipasi dari stakeholders sekolah. Semakin kecil partisipasi stakeholders dalam penyelenggaraan manajemen sekolah, maka akan semakin rendah pula akuntabilitas sekolah.

Jadi, kalau disimpulkan akuntabilitas adalah kemampuan sekolah mempertanggung jawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai kinerja yang diperoleh sebagai hasil partisipasi dari stakeholders.

Rita Headington berpendapat bahwa *"Accountability has moral, legal and financial dimensions and operates at all levels of the education system."* Ketiga dimensi yang terkandung dalam akuntabilitas, yaitu moral, hukum, dan keuangan menuntut tanggung jawab dari sekolah untuk mewujudkannya, tidak saja bagi publik tetapi pertama-tama harus dimulai bagi warga sekolah itu sendiri. Sebagaimana dikatakan Rita Headington (2000:83), *"Teacher have a moral and legal responsibility to provide appropriate educational experiences for pupils and to report to parents and other professionals."* Headington menekankan akuntabilitas dari guru. Secara moral maupun secara formal (aturan) guru memiliki tanggung jawab bagi siswa maupun orang tua siswa untuk mewujudkan proses pembelajaran yang baik. Tidak saja guru tetapi juga badan-badan yang terkait dengan pendidikan, sebagaimana dikatakan oleh Headington (2000:83), *"The head teacher and governing body have a legal responsibility to ensure the finances of the school are used effectively to benefit pupils' education."*

Untuk siapa guru bertanggung jawab? Pertanyaan ini diajukan oleh Headington, Ia menjawabnya:

*Teacher are, first and foremost, accountable to their pupils. They are responsible for providing work which is interesting and challenging, maintaining pupils' involvement and helping them make progress in their learning. Secondly, teachers are accountable to parents, both legally and morally, for the educational development of their children. The most evident mechanism for this through the formal reporting channel and through the provision of information about pupils' progress whenever necessary." Thirdly, teachers are accountable to their fellow professionals, in and beyond the school, through the provision of accurate and appropriate information from which pupils' educational progress can be tracked, measured and compared.*

*To in activities and discussion which develops shared professional understanding and enhances good practice."(2000:84)*

Pendapat Headington memberi tekanan pada akuntabilitas kinerja pembelajaran. Di Indonesia, juga di Negara-negara yang telah menerapkan MBS, terjadi kekacauan dalam memahami MBS, bahwa seringkali aspek pembelajaran dipahami terpisah dengan MBS. Hal ini sebenarnya telah diingatkan oleh David D. Mars; dalam Susan Mohrman (1994:225), *"That changes in the locus of decision-making within SBM should be designed and implemented as part of systemic reform-not as and innovation in and of itself. Conversely, avoid implementing SBM as an isolated innovation."*

Apa yang dikatakan oleh David Marsh merupakan sebuah peringatan keras akan bahaya kekacauan dalam penerapan MBS. Bahwa MBS tidak dipahami sebagai sebuah inovasi yang terpisah dari pembelajaran. Jadi, kalau Rita Headington memberi tekanan akuntabilitas pada aspek pembelajaran yang dimotori oleh guru, maka sebenarnya ini adalah bagian hakiki dalam penerapan MBS yang tidak boleh diabaikan oleh sekolah.

## **7. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun**

Pengaruh globalisasi bagi seluruh negara di dunia ini di tandai dengan persaingan dalam berbagai aspek kehidupan. Persaingan ini menjadikan tantangan bagi siapa pun untuk tetap *survive* atau bertahan hidup. Siapa yang berhasil memenangkan persaingan itu maka dia akan *survive*, siapa yang kalah maka akan terlindas oleh globalisasi itu. Untuk menghadapi persaingan ini diperlukan

pendidikan yang bermutu. Peningkatan mutu pendidikan bisa dimulai dari yang paling dasar yaitu pendidikan dasar yang meliputi SD/MI dan SMP/MTs. Pendidikan dasar ini akan menjadi pondasi untuk menunjang keberhasilan pendidikan jenjang yang lebih tingginya yaitu di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, bahwa taraf pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang antara lain diukur dengan meningkatkan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, meningkatkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan jenjang SMP/MTs ke atas, meningkatkan rata-rata lama sekolah, dan meningkatnya angka partisipasi sekolah, dan meningkatnya angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia. Walaupun demikian kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global yang makin ketat pada masa depan. Hal tersebut diperburuk oleh tingginya disparitas taraf pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan miskin, antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antar daerah, dan diparitas gender.

Pendidikan dasar merupakan pendidikan massa (*mass education*) atau *education for all* yang diwajibkan diikuti oleh setiap warga negara dalam kelompok usia tertentu (*compulsory education*). Pendidikan dasar (*basic education*) tidak sama dengan sekolah dasar (*primary elementary school*). Sekolah Dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang berlangsung selama 6 tahun. Sedangkan pendidikan dasar adalah pendidikan minimum yang wajib

diikuti oleh setiap warga negara sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup layak sebagai warga negara dan harga diri suatu bangsa. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menunjukkan bahwa peserta didik dalam usia pendidikan dasar harus dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya tanpa harus terputus selama sembilan tahun, yaitu enam tahun di tingkat SD/MI dan tiga tahun di tingkat SMP/MTs atau satuan pendidikan yang sederajat. Dalam wajib belajar sembilan tahun, semua lulusan SD/MI enam tahun secara otomatis harus bisa di tampung di jenjang SMP/MTs. Sebagai bagian dari pendidikan dasar sembilan tahun.

Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan selanjutnya. Pendidikan dasar merupakan modal dasar bagi pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas yang memungkinkan dapat menikmati hidup dan kehidupannya secara mandiri. Kemandirian dapat diciptakan melalui proses pembelajaran yang memberi kebebasan kepada peserta didik untuk selalu aktif berpendapat dan bertanya, selalu di beri peluang untuk inovatif atau mengkaji sesuatu yang baru, kreatif untuk membuat sesuatu yang baru dari berbagai sumber, menghargai perbedaan pendapat, dan peka terhadap peristiwa yang terjadi disekitarnya. Inilah yang disebut *learning how to learn* yaitu pendidikan harus diselenggarakan dengan peserta didik belajar bagaimana belajar sehingga hasil belajarnya akan bermutu.



Mutu hasil belajar peserta didik dapat ditingkatkan jika didukung oleh proses pembelajaran yang bermutu adalah sesuai dengan tujuan dan Visi kurikulum yang telah diterapkan. Oleh karena itu proses pembelajaran yang bermutu. Indikator proses pembelajaran bermutu adalah yang sesuai dengan tujuan dan Visi kurikulum yang telah diterapkan. Oleh karena itu proses pembelajaran adalah muara dari implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum dilaksanakan oleh guru dengan menerjemahkan tujuan dan isi kurikulum kedalam rancangan pembelajaran. Guru biasanya mengembangkan pembelajaran dengan bergantung kepada bahan ajar yang terdapat dalam Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP). Ketergantungan inilah yang bisa menjadikan guru tidak kreatif dalam mengimplementasikan kurikulum.

#### 1. Masalah-masalah dalam Penyelenggaraan Wajib Belajar.

Masalah-masalah dalam penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun, diantaranya:

- a) Belum semua anak usia wajib belajar 7-12 tahun dapat mengikuti pendidikan di sekolah dasar karena faktor kemiskinan, geografis dan komunitas terpencil; 2) Anak usia wajib belajar belum memiliki kebutuhan yang sama untuk mendapatkan fasilitas belajar yang memadai. Anak-anak di pedesaan, pedalaman, atau terpencil belajar dengan fasilitas yang serba kekurangan, sebaiknya anak-anak di perkotaan fasilitas belajarnya belajarnya relatif sudah memadai. Keadaan ini menimbulkan ketidakadilan dalam memperoleh pendidikan; 3) Kekurangan guru di daerah pedalaman atau terpencil masih

menjadi kendala bagi pelayanan proses pembelajaran; 4) Kualitas guru dalam memberikan pendidikan masih bervariasi, ada guru yang sudah memadai, ada pula yang harus dikembangkan lagi kearah yang lebih profesional; 5) Kemampuan guru untuk melakukan pembaharuan (inovasi) dalam proses pembelajaran masih lemah.

## 2. Peran Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan Dasar

Saat ini sudah berada di era globalisasi yang penuh perubahan dan tantangan. Problema yang paling mengedepankan akhir-akhir ini adalah bagaimana dunia pendidikan mempersiapkan sumberdaya Manusia agar mampu bertahan sekaligus memenangkan tantangan dan peluang yang terus bermunculan. Tantangan dan peluang itu menimbulkan persaingan. Persaingan timbul di berbagai aspek kehidupan yang terus berkembang dan akan semakin tajam, terutama sektor ekonomi dan perdagangan antar bangsa. Untuk menghadapi era globalisasi ini diperlukan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, gemar bekerja keras, ulet, bermoral, dan beragama. Di dunia pendidikan harus mampu mencetak sumber daya manusia itu perlu melibatkan peran serta berbagai pihak yang berkepentingan seperti guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Peran guru dalam pendidikan dasar berkaitan dengan profesi guru yang bertanggung jawab dalam pembangunan bangsa melalui pembentukan karakter bangsa bagi peserta didik. Oleh karena itu guru perlu di bina kompetensi profesional dan kesejahteraannya. Peran guru adalah sebagai pihak yang mensuplai (*provider*) kebutuhan belajar bagi peserta didik. Guru

pun sebagai motivator yang memberikan dorongan kegiatan belajar bagi peserta didik. Guru memberikan motivasi dan stimulus untuk mengasah kecerdasan dan kreativitas anak. Selain itu, guru sebagai model yang menjadi panutan yang digugu dan ditiru bagi peserta didik dalam proses belajar. Peran sekolah dalam pendidikan dasar dilakukan melalui peran guru menciptakan situasi yang kondusif agar peserta didik gemar belajar dan mencintai sekolah, guru, dan teman-temannya. Peserta didik di kondisikan agar kreatif, cerdas, dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Peran keluarga dalam pendidikan dasar adalah menciptakan keluarga agar permisif sehingga anak leluasa mengembangkan dirinya, tetapi tentu saja selalu dalam pengawasan orang tua. Peran masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam menumbuhkan masyarakat belajar (*learning society*). *Learning society* yaitu masyarakat yang berbudaya belajar. *Learning society* akan mudah di ciptakan dan dikembangkan apabila masyarakat dan keluarga sebagai satuan terkecil dari masyarakat itu mudah sikap gemar membaca.

Penuntasan wajib belajar tidak hanya melalui berbasis persekolahan pelayanan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Tidak seharusnya bertumpu pada jalur persekolahan yang formal saja, tetapi juga perlupenguatan jalur-jalur pendidikan lainnya, seperti jalur pendidikan luar sekolah yang bersifat non formal dan jalur keluarga atau informal. Apalagi tidak semua wilayah bisa terjangkau layanan persekolahan. Begitu pula tidak semua populasi sasaran wajib belajar bisa dengan nyaman mengenyam pendidikan persekolahan. Di perlukan juga perluasan akses pendidikan yang

disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun tidak semata-mata harus diatasi dengan membangun unit sekolah baru, karena hal ini bisa saja tidak efisiensi jika infra strukturnya minim dan tidak menunjang. Oleh karena itu diperlukan pembukaan akses pendidikan alternatif.

### 3. Konteks Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar

Komitmen pemerintah nampak dalam Nota Keuangan dan RAPBNP 2010 dimana berbagai kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan sebagai subsidi diharapkan mampu meredam penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Di lain pihak, konsumsi pemerintah di perkirakan mengalami penurunan dari 15,7 persen pada tahun 2012 menjadi 7,6 persen pada tahun 2010. Hal ini terkait dengan sudah tidak di alokasikannya lagi stimulus fiskal dalam bentuk belanja pada tahun 2010, konsumsi pemerintah akan di arahkan untuk tetap mendukung anggaran pendidikan, melanjutkan reformasi birokrasi, dan menjaga kesinambungan program kesejahteraan rakyat.

Untuk tahun 2011 arah kebijakan untuk mendukung tingkat capaian sasaran tingkat kemiskinan. 11,5 persen-12,5 persen tersebut dilakukan dengan mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus, meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keperpihakan dan

meningkatkan efektifitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah. Fokus prioritas dari pembahasan ini adalah peningkatan dan penyempurnaan kualitas kebijakan pendidikan dasar dengan wajib belajar 9 tahun bagi usia belajar SD/MI dan SMP/MTs.

#### 4. Protokol Pelayanan Pendidikan serta Besaran Bantuan

Pertanyaannya adalah bagaimana PKH mencapai target MDG's tersebut diatas? Mekanisme PKH telah mengatur hak dan kewajiban peserta PKH mengikuti Protokol pelayanan pendidikan yang sudah ditetapkan. Kepada RTSM yang memenuhi prasarat dan mengikuti protokol inilah pemerintah memberikan semacam reward atau insentif berupa bantuan uang. Apabila terdapat anak usia 6 tahun yang telah masuk sekolah dasar, maka RTSM tersebut mengikuti persyaratan berkaitan dengan pendidikan.

Untuk RTSM yang memiliki anggota keluarga Usia 6-15 tahun diwajibkan mendaftarkan anaknya ke SD/MI atau SMP/MTS (termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Kepada RTSM yang mengikuti persyaratan tersebut di berikan bantuan uang.

Secara teori skema bantuan bantuan ini bersyarat ini sangat ideal untuk menjaga agar tujuan PKH dalam memutus rantai kemiskinan menjadi efektif dan memastikan bahwa RTSM mendapatkan pelayanan yang memadai. Protokol pendidikan tersebut pada hakekatnya adalah mengubah mindset dan perilaku. Kemiskinan bukan hanya karena keterbatasan pendapatan, tapi tidak

memiliki kesadaran pentingnya pendidikan. Oleh karenanya protokol yang diatur, “memaksa”, anggota RTSM untuk menyekolahkan anaknya. Menggugah kesadaran ini bukan hal yang mudah tentunya, karena menyangkut perilaku. Diharapkan dengan adanya insentif yang diberikan pemerintah (bantuan bersyarat) ini, pelan-pelan menimbulkan kesadaran RTSM untuk bangkit dari kemiskinan permanen.

Hal tersebut juga di barengi dengan adanya kepedulian pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas. Kualitas tersebut diawali dari adanya program pendidikan yang lebih berkualitas. Kualitas tersebut diawali dari adanya pendidikan yang bermutu. Salah satu kebijakan tersebut adalah adanya program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Program wajib belajar 9 tahun ini di canangkan pada tahun 1994 adalah kelanjutan dari program wajib pendidikan dasar 6 tahun.

Dengan adanya program ini maka mendapatkan respon yang bermacam-macam dari para pemerhati dan pelaku pendidikan diantaranya adalah bahwa ketika ada suatu program wajib belajar maka pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada anak bangsa untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat banyak. Apabila perlu maka pendidikan 9 tahun di berikan secara gratis. Salah satunya alasan yang dengan adanya mewajibkan pendidikan dasar berarti sudah otomatis ini adalah kewajiban negara. Pendidikan wajib belajar 9 tahun dengan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan pendidikan gratis.

Memang sudah sejak tahun 1984 tepatnya pada masa Menteri Pendidikan Nugroho Notosusanto bahwa pendidikan wajib belajar 9 tahun sudah ditetapkan. Namun pada waktu itu pendidikan belum dapat dinikmati oleh semua anak Indonesia. Namun perkembangan demi perkembangan dilewati masyarakat sehingga kebutuhan akan adanya pendidikan tak terelakkan. Selain itu bagi bangsa Indonesia akses terhadap pendidikan sesungguhnya telah menjadi komitmen antara Pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pentingnya keadilan dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelaskan dan diperinci kembali dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

Bagi Negara maju pendidikan gratis selain karena tuntutan konsitusi mereka juga di dukung perekonomian negara yang sudah cukup mapan untuk investasi pendidikan. Sumber pembiayaan pendidikan dasar gratis dapat berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Mulai inpres nomor 10 tahun 1971 tentang pembangunan Sekolah Dasar dan Inpres-Inpres selanjutnya Negeri ini telah berusaha memberikan pendidikan murah untuk anak bangsa. Puluhan ribu gedung sekolah dasar telah di bangun dan puluhan ribu guru sekolah dasar di angkat agar pemerataan kebutuhan belajar untuk jenjang

sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan murah dari kota sampai kedesa-desi.

Semua warga kaya/miskin diberi kebutuhan yang sama untuk menikmati pendidikan dasar enam tahun yang biayanya dapat dijangkau golongan miskin. Pemutusan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun hanyalah satu saja dari program prioritas pembangunan pendidikan dasar dan menengah.

Menurut SUSENAS tahun 2003 sampai dengan tahun 2003 masih banyak anak Usia sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan. Anak usia 7-15 tahun yang belum pernah sekolah masih sekitar 693,7 ribu orang ( 1,7 persen). Sementara itu yang tidak bersekolah lagi baik karena putus sekolah maupun tidak melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS dan dari SMP/MTs ke jenjang pendidikan menengah sekitar 2,7 juta orang atau 6,7 persen dari total penduduk 7-15 tahun. Salah satu alasan redahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan.

#### 5. Peran Serta Madrasa dan Wajib Belajar Pendidikan dasar Pendidikan Dasar

Madrasa sebetulnya memberikan andil pada sistem pendidikan nasional yang cukup besar. Pemerintah menyelenggarakan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar dikdas) sembilan tahun, meskipun belum tercapai, namun diharapkan sampai tahun 2012 dapat dituntaskan. Kriteria tuntas adalah angka partisipasi kasar (APK) mengikuti



pendidikan SMP atau Madrasa Tsanawiyah mencapai 95 persen. Sampai tahun 2008 baru mencapai sekitar 92,3 persen. Angka sisanya yaitu sekitar 2,7 persen diharapkan pada tahun 2012 dapat dicapai angka partisipasi angka pendidikan dasar sembilan tahun hingga 95 persen. Artinya wajib belajar pendidikan dasar pendidikan dasar 9 tahun itu di anggap tuntas, meskipun 95 persen masi ada sisanya 5 persen. Angka 5 persen dari 50 juta anak usia sekolah bisa dikatakan lumayan banyak yang tercecer, tetapi bisa di anggap selesai. Kontribusi madrasa terhadap penuntasan wajib belajar sembilan tahun cukup lumayan besar mencapai 17 persen. Sedangkan jika dilihat secara keseluruhan termasuk Madrasa Aliyah, Kontribusi madrasa dari mulai MI sampai MA terhadap angka partisipasi mengikuti pendidikan di berbagai jenjang pendidikan secara agregat atau secara keseluruhan itu bisa mencapai 21 persen. Bukan angka sedikit 21 persen dari sekitar 60 juta penduduk. Artinya masyarakat terutama madrasa telah memberikan andil pada upaya-upaya pemerintah menyediakan lembaga-lembaga pendidikan yang cukup besar.

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun ada inpresnya yaitu tanggal 6 Juni 2006 tentang gerakan percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pembrantasan buta aksara sampai saat ini menghadapi permasalahan belum terberantas sebelumnya. Buta aksara yang dimaksudkan adalah aksara latin sebagai alat komunikasi yang biasa dilakukan dengan bahasa Indonesia. Kondisi buta aksara yang masih cukup besar di berbagai daerah itu, mengharapkan peran lembaga-lembaga

pendidikan yang ada di masyarakat, termasuk pesantren yang memiliki kontribusi yang besar terhadap gerakan percepatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara tersebut. Dalam penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, Departemen Agama melakukan tugas yang diembannya yaitu menyelenggarakan pendidikan dasar di madrasa dan pondok pesantren, kemudian ikut aktif dalam gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara melalui lembaga-lembaga pendidikan di madrasa, pondok pesantren dan lembaga keamanan atau tenaga keamanan seperti majelis talkim sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Penyelenggaraan pendidikan dasar itu melalui madrasa seperti MI, MTS, MA, dan melalui pondok pesantren, ada pula melalui Madrasa Diniyah (MD), baik Madrasa Diniyah Ula atau Madrasa Wustu. Di dalam pondok pesantren ada proses muadalah melalui proses penyelenggaraan paket A dan paket B. Begitupula santri-santri pondok pesantren bisa dianggap telah melaksanakan pendidikan dengan ketentuan atau kriteria tertentu, sehingga jika tidak mempunyai paket B dianggap sama dengan MTs atau meskipun tidak mempunyai paket A sama dengan ijazah SD. Pada umumnya pesantren tidak mengeluarkan ijazah, oleh karena itu diadakan proses muadalah lulusan-lulusan pesantren supaya dianggap setara dengan memiliki ijazah. Pesantren jika ingin disamakan dengan lembaga MI, MTS, MA, maka kurikulumnya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 yaitu tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan

keagamaan. Intinya madrasa menghadapi tantangan, tetapi tetap memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pendidikan nasional. Namun masih menghadapi tantangan yaitu berkaitan dengan mutu. Selain mutu sebetulnya berkaitan dengan akses karena kontribusi ini bisa ditingkatkan dari sekarang yang sebesar 17 persen menjadi 20 persen untuk wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, meskipun untuk keseluruhannya, kontribusi madrasa sekarang sudah mencapai 20 persen - 21 persen.

Untuk perluasan akses banyak sekali yang sudah dilakukan, misalnya khusus yang berkaitan dengan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, seperti program-program pembangunan madrasa-madrasa satu atap. Program ini dilakukan di madrasa ibtidaiyah yang ada di sekitarnya yang kebetulan belum ada MTs-nya, lalu dibangunlah MTs. Karena membangun gedung itu memerlukan dana yang besar, maka terlebih dahulu perlu mengajukan proposal untuk minta bantuan pemerintah atau lembaga donor pemberi bantuan. Madrasa itu ada beberapa tipe, seperti tipe MI memiliki 6 ruang kelas. Sedangkan tipe M2 memiliki 10 ruang kelas. Diadakan pula Madrasa Tsanawiyah modern dan terpadu, atau bertaraf internasional. Sampai tahun 2012 diharapkan sudah dapat dibangun 500 madrasa yang termasuk didalamnya madrasa satu atap. Bukan itu saja, dilakukan juga membangun sejumlah ruang-ruang kelas baru dan memperbaiki ruang-ruang kelas dalam rangka perluasan akses. Namun pembangunan dan pengembangan madrasa tidak berhenti sampai penyediaan sarana dan prasarana saja. Lebih dari itu kualitas pendidikan itu ditentukan pula kontribusi peran guru sebesar 60

persen. Artinya, jika guru belum memenuhi standar kualitas, sulit sekali untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasa. Walaupun diberikan berbagai bantuan kalau gurunya tidak bisa memanfaatkan,

## **8. Gambaran Umum Program Bos**

Program BOS dilator belakangi adanya kebijakan Pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak dan telah merelokasikan sebagian besar anggaran yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak dari kenaikan bahan bakar minyak.

Ada 4 sektor alokasi anggaran subsidi bahan bakar minyak antara lain untuk: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bantuan infrastruktur pedesaan, bantuan Langsung Tunai (BLT)

Untuk bidang pendidikan konsep Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) untuk SD dan SMP yang semula program Bantuan Khusus Murid (BKM) yang langsung diberikan kepada siswa/murid miskin yang telah diseleksi oleh sekolah sesuai alokasi anggaran yang diterima, program tersebut telah diubah menjadi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan. Besarnya dana untuk tiap tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid. Untuk menyamakan persepsi dan kesamaan pemahaman BOS secara singkat kita uraikan terlebih dahulu mengenai definisi Biaya Pendidikan dan terminologi program BOS.

Biaya Satuan Pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar

sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dari cara penggunaannya, BSP dibedakan menjadi BSP Investasi dan BSP Operasional. BSP Investasi adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumberdaya yang tidak habis pakai dalam waktu lebih dari satu tahun, seperti pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media, perabot dan alat kantor. Sedangkan BSP Operasional adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumber daya pendidikan yang habis pakai dalam satu tahun atau kurang. BSP Operasional mencakup biaya personil dan biaya non personil.

Biaya personil meliputi biaya untuk kesejahteraan (honor Kelebihan Jam Mengajar (KJM) , Guru tidak tetap (GTT), Pegawai tidak tetap (PTT), uang lembur) dan pengembangan profesi guru (Pendidikan dan Latihan Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), dan lain-lain. Biaya non personil adalah biaya untuk penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi. Selain dari biaya-biaya tersebut, masih terdapat jenis biaya operasional yang ditanggung oleh peserta didik, misalnya biaya transportasi, konsumsi, seragam, alat tulis, kesehatan, rekreasi dan sebagainya.

Berdasarkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencakup dua komponen yaitu biaya operasional dan biaya non personil, oleh karena biaya

satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Namun perlu ditegaskan bahwa prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah. Oleh karena keterbatasan dana BOS dari pemerintah Pusat, maka biaya untuk investasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lain, dengan prioritas utama dari sumber pemerintah, pemerintah daerah dan selanjutnya dari partisipasi masyarakat yang mampu.

### 1. Tujuan program BOS

Berdasarkan Buku Panduan pelaksanaan program BOS, tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu (miskin) dan meringankan bagi siswa yang lain agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun.

### 2. Sasaran program BOS

Adapun sasaran Program BOS adalah semua lembaga Sekolah setingkat SD, SMP baik negeri maupun Swasta diseluruh Provinsi di Indonesia. Besar dana BOS yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan sebagai berikut, SD/MI setingkat bantuan BOS sebesar Rp. 580.000,- siswa/pertahun, SMP/MTs setingkat bantuan BOS sebesar Rp. 710.000,- siswa/pertahun

### 3. Dasar Hukum Program BOS

Adapun dasar hukum pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut :

- a. Amanat Undang Undang Dasar 1945 (Pembukaan, alinea ke-4) : Salah satu tujuan kemerdekaan adalah “ ..... mencerdaskan kehidupan bangsa”.
- b. Pasal 28 B (ayat 2) Amandemen Undang Undang Dasar 1945 : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- c. Pasal 28 C (ayat 2) Amandemen Undang Undang Dasar 1945 : “Setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
- d. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1, Butir 14) : Pendidikan anak adalah “suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1998;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- h. Instruksi Presiden Nomor 24 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara ;
- i. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ;
- j. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan dasar ;
- k. Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Nomor SE.02/PJ/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

#### 4. Waktu Pelaksanaan BOS

Pada Tahun anggaran 2012 dana BOS diberikan selama 12 bulan yaitu pencairan dana dilakukan tiap triwulan dan pencairan dana BOS direalisasikan pada awal bulan tiap triwulan.

#### 5. Sekolah Penerima BOS

Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh BOS khusus sekolah/madrasah/ponpes swasta harus memiliki ijin operasional (piagam penyelenggaraan pendidikan). Sekolah/madrasah/ponpes yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan



ini. Sekolah kaya/mapan/yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari dana BOS, mempunyai hak untuk menolak BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan seperti sekolah/madrasah/ponpes penerima BOS. Keputusan atas penolakan BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah/madrasah. Bila di sekolah/madrasah/ponpes yang mampu tersebut terdapat siswa miskin, sekolah/madrasah/ponpes tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa tersebut (misalnya melakukan subsidi silang dengan dana dari siswa yang mampu).

#### 6. Program BOS dan Wajib belajar Dikdas

Dalam rangka penuntasan Wajar 9 tahun yang bermutu, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Salah satu program yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan Wajar 9 Tahun yang bermutu adalah program BOS. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Melalui program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, maka setiap pelaksana program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut :

- a. BOS harus menjadi sarana penting untuk mempercepat penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun.

- b. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/ponpes.
- c. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/MI/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB dengan alasan mahalny biaya masuk sekolah.
- d. Kepala sekolah/madrasah/ponpes mencari dan mengajak siswa SD/MI/SDLB yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/MTs/SMPLB. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.

#### 7. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah

Dalam program BOS, dana diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah tanpa intervensi dari pihak lain. Dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar, untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah.
  2. Bagi siswa tidak mampu harus dibebaskan dari segala pungutan/gratis. Namun demikian masyarakat dan orangtua siswa yang mampu diharapkan tetap berpartisipasi dalam pengembangan sekolah.
  3. Sekolah dapat melaksanakan semua kegiatan secara lebih profesional, transparan, mandiri, kerjasama, dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Organisasi Pelaksana Program BOS

Organisasi pelaksana program BOS dipisah antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Di tingkat pusat, Provinsi dan kabupaten/kota terdapat Tim Manajemen BOS untuk masing-masing departemen dan tingkat pemerintahan. Untuk organisasi pelaksana Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai berikut :

- a. Tim Pengarah: Bupati/Walikota, Ketua Bappeda Kabupaten/Kota
- b. Tim Manajemen BOS
  1. Tim Dinas Pendidikan kabupaten Penanggungjawab: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Tim Pelaksana, Manajer, Seksi Pendataan, Seksi BOS dan BOS Buku SD, Seksi BOS dan BOS Buku SMP, Seksi Monev dan Penyelesaian Masalah, Seksi Publikasi/Humas
  2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen BOS Kab/Kota: Menetapkan alokasi dana untuk setiap sekolah/madrasah/ponpes, Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah/madrasah/ponpes penerima BOS, Melakukan pendataan sekolah/madrasah/ponpes, Melakukan koordinasi

dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dan lembaga penyalur dana, serta dengan sekolah /madrasah/ponpes dalam rangka penyaluran dana, Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi, Melaporkan pelaksanaan program kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah/madrasah ponpes dan lembaga penyalur, Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kabupaten/kota, Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi dan instansi terkait.(Sumber Juknis Permendikbud No. 51 Thn 2011)

## B. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu tentang penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Hasil	Relevansi
1	Dwi Santoso (2007)	Keefektifan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Di SD se-Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar	(1) untuk mengetahui tingkat keefektifan penggunaan dana BOS dalam rangka program peningkatan mutu pembelajaran di SD se-Kecamatan	tingkat keefektifan penggunaan dana BOS sudah berjalan baik hal ini dibuktikan dengan penelitian terhadap Kepala Sekolah yaitu didapat 55.6 persen yang menilai sangat efektif dan 44.4 persen menilai	Apakah Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Di

			<p>Nglegok Kabupaten Blitar, (2) untuk mengetahui perbedaan mutu pembelajaran periode sebelum dan sesudah menerima dana BOS di SD se-Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.</p>	<p>efektif, sedangkan mengenai mutu pembelajaran juga sudah berjalan baik dengan dibuktikan penelitian kepada Guru Bidang Studi, yang menilai sangat efektif 55.6 persen dan yang menilai efektif 43.3 persen serta yang menilai cukup efektif 1.1 persen. Penelitian menggunakan Uji t memperoleh hasil tidak ada perbedaan yang signifikan, hal ini dibuktikan oleh penelitian terhadap hasil ujian akhir siswa kelas 6 sebelum menggunakan dana BOS (tahun 2002/2003) dan sesudah menggunakan dana BOS (tahun 2004/2005) memperoleh hasil Uji t adalah <math>t_{hitung} = 1.479 \leq t_{tabel} = 2.306</math> (taraf signifikan 5 persen) maka <math>H_0</math> tidak ditolak dan <math>H_a</math> ditolak, dengan ini dikatakan tidak ada perbedaan yang signifikan</p>	<p>Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Sudah efektif</p>
--	--	--	--	---	---

				antara prestasi belajar siswa sebelum menerima dana BOS dan prestasi belajar siswa sesudah menerima dana BOS.	
2	Abdul Kadir Karding (2008)	Evaluasi pelaksanaan program Bantuan operasional sekolah ( bos ) Di Kota Semarang	<p>untuk :</p> <p>1. Mengetahui seberapa besar cakupan dana BOS dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin atau tidak mampu;</p> <p>2. Mengetahui seberapa besar dampak pelaksanaan program BOS terhadap sekolah maupun masyarakat di Kota Semarang</p> <p>3. Seberapa besar BOS untuk dapat memperluas Akses pendidikan bagi masyarakat miskin / tidak mampu SMP Negeri ?</p>	<p>Hasil evaluasi telah mengungkapkan bahwa pelaksanaan BOS tahun 2007 untuk SMP.Negeri telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa catatan yakni ;</p> <p>Hasil penelitian mengungkapkan BOS tahun 2007 untuk 41 SMP Negeri Sebesar Rp. 22.134.027.000 dari jumlah tersebut (30 persen) untuk pembayaran tenaga honorer /GTT/ PTT, Tenaga Harlep, (25 persen) untuk belanja barang jasa dan (20 persen) untuk kegiatan belajar mengajar, (15 persen). kegiatan kesiswaan dan (10 persen) dan pemeliharaan</p>	Apakah Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah di Evaluasi.

				gedung. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban BOS dan Realisasi RAPBS tahun 2007, ternyata kontribusi BOS sangat signifikan yakni 31 persen, orang tua/wali murid 42 persen dan APBD Kota Semarang 27 persen. Cakupan BOS terhadap layanan siswa miskin berkisar 20 persen - 33 persen. D	
3	Herdik Sodikin (2011)	Kajian perundangan-undangan Tentang dana BOS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Mengetahui manfaat dana BOS Dalam Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>2. Untuk Mengetahui permasalahan mengenai implementasi dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) sebagai salah satu pembiayaan gratis di sekolah dasar di lapangan</li> </ol>	Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun gratis bukanlah seperti yang diasumsikan oleh masyarakat pada umumnya seperti tidak membayar uang sekolah berikut segala keperluannya seperti buku, seragam, dan transportasi, maupun biaya operasional sekolah. Namun, Wajar Dikdas gratis adalah hanya mencakup biaya operasional sekolah seperti	Apakah Penggunaan Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin barat sudah sesuai dengan Perundang-undangan.

				uang sekolah dan gaji guru, serta biaya investasi yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap yang penggunaannya lebih dari satu tahun.	

Laporan penelitian yang ditulis Dwi Santoso Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UM Pada tahun 2007 dengan judul Keefektivan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Di SD se-Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar“(diunduh dari <http://karya-ilmiah.um.ac.id> tanggal 30 Maret 2013)”.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan saran kepada: (1) Kepala Diknas sebagai pimpinan di dinas pendidikan Kecamatan Nglegok, penelitian ini dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan penggunaan dana BOS dan evaluasi penggunaan dana BOS, (2) Kepala Sekolah, bendahara sekolah dan komite, memahami fungsi dana BOS bagi Sekolah, pemanfaatan yang efektif dan efisien terhadap penggunaan dana BOS, upaya peningkatan mutu pembelajaran karena salah satu tujuan dari pemerintah memberikan



dana BOS adalah peningkatan kualitas siswa, (3) Guru Bidang Studi, diharapkan dapat meningkatkan mutu mengajar dengan pengajaran yang menyenangkan siswa, memberikan evaluasi secara rutin, dan pemberian waktu dalam satu minggu sekali mengadakan gerakan "baca buku bersama" selama dua sampai tujuh jam. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pertama minat membaca siswa, kedua kualitas siswa (4) Peneliti Lanjutan yang akan meneliti hal yang sama, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas lagi dengan karakteristik yang berbeda, sampel juga berbeda.

Abdul Kadir Karding Mahasiswa program pasca sarjana magister administrasi publik universitas diponegoro semarang 2008 dalam tesisnya yang berjudul Evaluasi pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang“(diunduh dari <http://eprints.undip.ac.id> tanggal 30 Maret 2013)”. Hasil evaluasi telah mengungkapkan bahwa pelaksanaan BOS tahun 2007 untuk SMP Negeri telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa catatan yakni ; Hasil penelitian mengungkapkan BOS tahun 2007 untuk 41 SMP Negeri Sebesar Rp. 22.134.027.000 dari jumlah tersebut (30 persen) untuk pembayaran tenaga honorer /GTT/ PTT, Tenaga Harlep, (25 persen) untuk belanja barang jasa dan (20 persen) untuk kegiatan belajar mengajar, (15 persen). kegiatan kesiswaan dan (10 persen) dan pemeliharaan gedung. Berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban BOS dan Realisasi RAPBS tahun 2007, ternyata kontribusi BOS sangat signifikan yakni 31 persen, orang tua/wali murid 42 persen dan APBD Kota Semarang sebesar 27 persen. Cakupan BOS terhadap layanan siswa miskin

berkisar 20 persen - 33 persen. Dari totalitas siswa miskin baru dapat terlayani 20 persen - 25 persen hal ini disebabkan BOS belum dapat menjangkau seluruh siswa miskin. Cakupan BOS terhadap layanan siswa tidak mampu dari total siswa 32.102 siswa masih sekitar 8 persen atau 2.386 siswa tidak mampu. atau 1365 siswa yang memperoleh layanan atau sekitar 57 persen sisanya 1021 anak atau sekitar 43 persen belum mendapatkan layanan pendidikan pihak sekolah. Potensi BOS ternyata belum menjangkau semua siswa miskin/tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan secara memadai. Dampak BOS ternyata dapat memperkuat kemampuan sekolah dalam memberikan materi pembelajaran dan kegiatan tambahan kepada siswa. Oleh karena itu beberapa komponen yang semula dibebankan orang tua siswa melalui SPP menjadi berkurang, adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan, beban biaya sekolah menjadi lebih berkurang, dapat dirasakan masyarakat akan dapat mengurangi anak putus sekolah. Hambatan pelaksanaan BOS antara lain Pencairan BOS sering terlambat, hal ini menjadi mengganggu kegiatan belajar mengajar. Rekomendasi antara lain, Searah tujuan BOS hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar, sumber dana sekolah berasal dari APBD, BOS dan Sumbangan orang tua siswa, ketiga komponen ternyata sumbangan orang tua murid paling dominan. Keberadaan BOS tetap dipertahankan. Jumlah anggaran perlu ditingkatkan dan serta realisasi pencairan dana BOS yang dilakukan tiap triwulan dan pencairannya diawal bulan harus dapat terwujud, Hal ini dimaksudkan agar efektif. Agar sasaran BOS tercapai secara efektif yaitu memberikan akses bagi siswa keluarga miskin maupun siswa keluarga tidak mampu mendapatkan layanan

pendidikan dasar yang bermutu, sudah seharusnya untuk melakukan seleksi secara transparan bagi siswa miskin/tidak mampu dengan membentuk tim kecil yang melakukan tugas melakukan pengecekan kondisi siswa yang sebenarnya di lapangan disamping berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kelurahan.

Sehubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini sebagai kajian awal pernah dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Herdik Sodikin, Universitas Pendidikan Indonesia pada Jurusan Administrasi Pendidikan/Manajemen Pendidikan pada tahun 2011 dengan judul kajian perundangan-undangan tentang dana bos “(diunduh dari <http://ilmucerdaspendidikanwordpress.com>. tanggal 30 Maret 2013)”. Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun gratis bukanlah seperti yang diasumsikan oleh masyarakat pada umumnya seperti tidak membayar uang sekolah berikut segala keperluannya seperti buku, seragam, dan transportasi, maupun biaya operasional sekolah. Namun, Wajar Dikdas gratis adalah hanya mencakup biaya operasional sekolah seperti uang sekolah dan gaji guru, serta biaya investasi yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap yang penggunaannya lebih dari satu tahun. Walaupun telah diatur dalam UUD 1945 terutama dijelaskan pemerintah dalam pasal 31 ayat (2) bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Namun, dikarenakan anggaran yang masih minim untuk pendidikan dalam APBN menyebabkan amanah konsitusi ini belum terwujudkan. Sehingga, pemerintah membuat perturan yang berkenaan dengan pendanaan pendidikan yang tertuang didalam *PP Nomor 48 Tahun 2008* tentang

Pendanaan Pendidikan, yang mana pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih cenderung ke tingkat implementasinya, sejauh mana implementasi BOS apakah sudah sejalan dengan Juknis Permendikbud nomor 51 tahun 2011.

Kemudian, jenis-jenis biaya pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut, dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik. *PP Nomor 48 Tahun 2008* ini mempunyai banyak kaitan hukum dan hubungan dengan hukum-hukum ataupun peraturan-peraturan lainnya terutama yang menyangkut dengan pendanaan pendidikan.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan pada bab terdahulu, telah dilakukan survey tentang mekanisme BOS 2012 oleh Tim Manajemen BOS pusat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional. Perubahan mekanisme penyaluran dan BOS pada tahun 2012 melalui transfer ke Kabupaten/Kota mengalami beberapa kendala di lapangan. Salah satu kendala yang saat ini dapat diukur adalah keterlambatan penyaluran dana BOS dari kas Daerah ke sekolah. Di bandingkan dengan mekanisme penyaluran dana BOS periode tahun 2005-2010, dari sisi kecepatan penyaluran dana sampai ke sekolah, tahun 2012 jauh sangat lambat.

Berbagai diskusi di jajaran tingkat nasional, kedua sistem ini banyak di perdebatkan kelebihan dan kelemahan dari sudut pandang masing-masing.

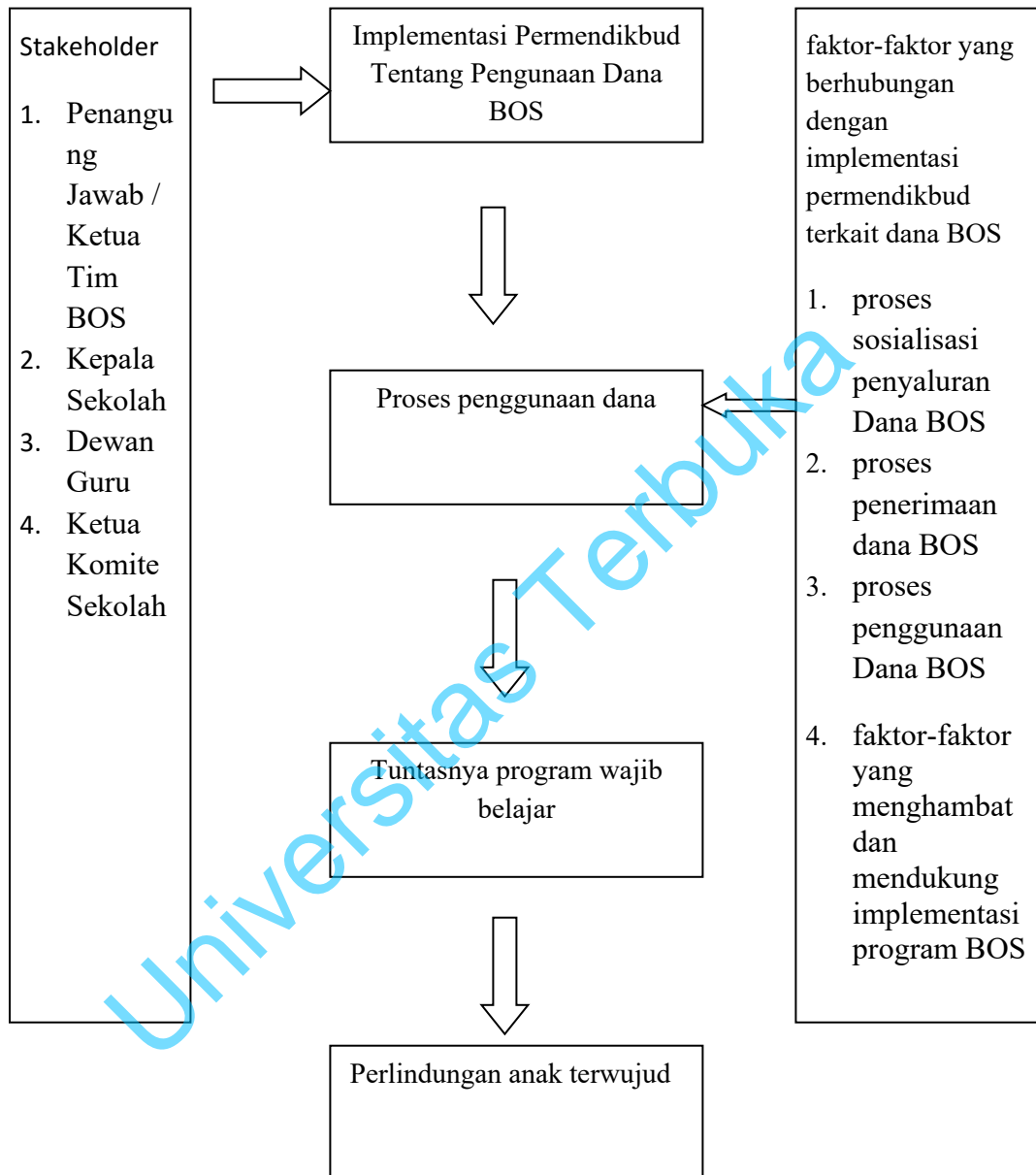
Opini/pendapat para pelaksana program BOS di daerah, khusus dari Tim BOS Kabupaten/Kota yang telah mengalami dua sistem penyaluran yang berbeda, tentu akan memberikan penilaian yang objektif. Untuk itu Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan survey kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Survey bertujuan menggali dan mengumpulkan pendapat Tim BOS Kabupaten/Kota terhadap mekanisme penyaluran dana BOS yang manapaling efektif dalam rangka untuk perbaikan kinerja penyaluran dan pengelolaan dana BOS yang akan datang.

### **C. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Penggunaan dana operasional sekolah di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dan mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung yang berhubungan dengan implementasi Permendikbud nomor 51 tahun 2011 tentang penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kerangka berpikir ini berpijak pada kajian teoritik bahwa kebijakan penggunaan dana operasional sekolah (BOS) sebagaimana penggunaannya dapat terlaksana dengan baik sesuai arahan dan petunjuk dari menteri pendidikan dan kebudayaan.

Diagram 1 Kerangka Pikir Penelitian



Dengan memperhatikan kerangka berpikir di atas dapat diketahui yang menjadi informan dalam wawancara adalah penanggung jawab BOS, Manajer BOS, Kepala Sekolah, Dewan guru, dan Komite sekolah. Adapun pertanyaan yang diberikan adalah bagaimana proses sosialisasi, proses penerimaan, dan factor-faktor

penghambat dan pendukung implementasi program BOS. Apabila semua dapat berjalan dengan baik maka program wajib belajar Sembilan tahun dapat berjalan hingga tuntas serta perlindungan anak terwujud.

#### **D. Pokok bahasan**

1. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.
2. Kebijakan publik yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya
3. Pendidikan dasar adalah pendidikan minimum yang wajib diikuti oleh setiap warga negara sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup layak sebagai warga negara dan harga diri suatu bangsa.
4. Permendikbud Nomor 51 tahun 2011 adalah keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan terkait penggunaan dana operasional sekolah tahun anggaran 2012.
5. Sekolah Dasar Negeri, di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Sekolah yang berada di bawah naungan dinas cabang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan bisa mencapai sasaran yang diinginkan, maka perlu adanya metode penelitian yang tepat. Dalam hal ini pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam dari Implementasi Permendikbud nomor 51 tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2012 di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2012:4) metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian Kirk dan Miller (dalam Moleong 2012:4) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Sedangkan menurut Danim (1997: 187), ciri utama penelitian kualitatif ada lima, yaitu:



- a. Penelitian kualitatif mempunyai setting alami sebagai sumber data langsung dan peneliti adalah instrument utamanya. Kedudukan peneliti sebagai instrument pengumpul data lebih dominan dari pada instrumen lainnya.
- b. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain.
- c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses kerja, dimana seluruh fenomena yang dihadapi diterjemahkan ke dalam kegiatan sehari-hari terutama yang berkaitan dengan masalah sosial.
- d. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan pendekatan induktif. Abstraksi-abstraksi disusun oleh peneliti kebijakan atas dasar data yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama-sama melalui pengumpulan data selama kerja lapangan di lokasi penelitian.
- e. Penelitian kualitatif memberi titik tekan pada makna, dimana fokus penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia.

## **B. Informan**

Dalam penelitian ini salah satu sumber daya yang dipandang perlu dalam proses pengumpulan data adalah informan, yaitu orang yang sengaja dipilih berdasarkan pemikiran logis karena dipandang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, untuk pemilihan informan dilakukan dengan cara *snowball sampling* dimana pada awalnya sampel berjumlah sedikit, kemudian sampel ini diminta memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya hingga jumlah sampel semakin banyak dan mencapai titik kejenuhan karena informasi yang disampaikan pada intinya sama.

Yang menjadi informan disini adalah semua pejabat di tingkat Kecamatan yang berkaitan langsung dengan masalah sekolah dasar (SD), untuk itu yang menjadi *Key Informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap masalah Sekolah Dasar di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kemudian setelah dari Kepala

Bidang Pendidikan Dasar, informasi diperoleh dari Kepala Sekolah Dasar, Bendahara BOS di Sekolah Dasar, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat. Secara rinci antara lain:

1. Penanggung jawab program BOS Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Manajer program BOS Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Kepala sekolah SD Negeri 1 Natai Kerbau
4. Kepala sekolah SD Negeri 2 Natai Kerbau
5. Kepala sekolah SD Negeri 1 Mulyajadi
6. Kepala sekolah SD Negeri 2 Mulyajadi
7. Kepala sekolah SD Negeri 3 Karang Mulya
8. Dewan Guru SD Negeri 1 Natai Kerbau
9. Dewan Guru SD Negeri 2 Natai Kerbau
10. Dewan Guru SD Negeri 1 Mulyajadi
11. Dewan Guru SD Negeri 2 Mulyajadi
12. Dewan Guru SD Negeri 3 Karang Mulya
13. Ketua komite SD Negeri 1 Natai Kerbau
14. Ketua komite SD Negeri 2 Natai Kerbau
15. Ketua komite SD Negeri 1 Mulyajadi
16. Ketua komite SD Negeri 2 Mulyajadi
17. Ketua komite SD Negeri 3 Karang Mulya

### **C. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan diri sendiri sebagai instrument penelitian, yaitu dengan mengadakan perencanaan, pengamatan di lapangan dan

melakukan wawancara kepada informan dalam rangka pengumpulan data primer. (Tambahkan lembar wawancara secara bebas/terbuka dan buat pedoman wawancara )  
Perencanaan Strategi, Pelaksanaan Strategi, Kriteria Pelaksanaan, Pengawasan Pelaksanaan Strategi, Monitoring Pelaksanaan)

#### **D. Sumber Data**

Dalam suatu aktifitas penelitian, yang dicari seorang peneliti pada prinsipnya adalah data. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran dengan senantiasa berupaya menjangkau kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan (realitas). Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Pada penelitian ini sumber-sumber data yang dipergunakan antara lain:

a. Data Primer

Data utama yang dijadikan landasan penulis dalam penelitian, yang diperoleh dengan jalan wawancara dengan informan dan dengan melakukan pengamatan langsung (observasi).

b. Data Sekunder

Data yang berupa dokumen-dokumen resmi yang berupa laporan bulanan dan tahunan, arsip dan lain-lain.

#### **E. Proses Pengumpulan Data**

Untuk mendukung penelitian, penulis akan menggunakan tehnik pengumpulan data.

a. Observasi

Dalam tahapan observasi ini, peneliti meminta data dan mempelajari data sekolah dasar yang ada di Kecamatan Pangkalan Banteng. Adapun sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Banteng sebanyak 26 sekolah dasar. Terdiri dari 20 sekolah dasar berstatus negeri dan 6 sekolah dasar berstatus swasta. Dalam penelitian ini di ambil lima sekolah dasar negeri yaitu SDN 1 Natai Kerbau 1, SDN Natai Kerbau 2, SDN Mulyajadi 1, SDN Mulyajadi 2 dan SDN 3 Karang Mulya.

b. Wawancara Mendalam

Pada tahap ini peneliti mendatangi secara langsung dan mengadakan komunikasi dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar selaku penanggung jawab dan ketua Tim BOS, beberapa kepala sekolah dasar, dan bendahara sekolah dasar serta Komite sekolah. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data, informasi atau keterangan mengenai proses penyampaian pembuatan laporan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

c. Dokumentasi

Dalam tahap ini peneliti melakukan kegiatan pengumpulan informasi dengan jalan menghimpun dan mempelajari dokumen-dokumen yang merupakan laporan tertulis dari proses penyampaian pelaporan sekolah dasar. Dokumen-dokumen ini diperoleh dari sekolah dasar, cabang dinas pendidikan dan kantor dinas pendidikan pemuda Kabupaten Kotawaringin Barat.

## E. Fokus Penelitian

Mengingat Implementasi Permendikbud nomor 51 tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan laporan keuangan

bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2012 di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat ini meliputi begitu banyak sektor, dan waktu yang dimiliki penulis untuk melaksanakan penelitian sangat terbatas, maka perlu adanya fokus penelitian berupa populasi penelitian agar penelitian yang dilakukan bisa terarah dan permasalahan dapat diselesaikan. Moleong (2012:115) berpendapat bahwa fokus penelitian diperlukan dengan tujuan:

- a. Fokus penelitian akan membatasi studi atau akan membatasi bidang inkuiri.
- b. Memenuhi kriteria memasukan-mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan.

Dalam penelitian ini menjadi fokus penelitian adalah: Implementasi Permendikbud nomor 51 tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2012 di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat yang mencakup

- 1) Sistem proses penerimaan dana BOS
- 2) Proses sosialisasi program BOS
- 3) Mekanisme Penataan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- 4) faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS

Pelaksanaan Kebijakan Implementasi Permendikbud nomor 51 tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan

laporan keuangan bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2012 di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **G. Lokasi Penelitian**

Penulis menentukan lokasi sebagai sampel penelitian di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya lima Sekolah Dasar Negeri (SDN) yaitu SD Negeri 1 Natai Kerbau, SD Negeri 2 Natai Kerbau, SD Negeri 1 Mulyajadi, SD Negeri 2 Mulyajadi dan SD Negeri 3 Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan alasan:

- a. Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai banyak Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang berbeda karakteristiknya (jumlah Guru dan Jumlah Murid). Dalam penelitian ini yang di ambil sebagai sampel adalah SD yang memiliki Guru PNS sedikit sedangkan muridnya banyak.
- b. Sekolah Dasar Negeri, di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Sekolah yang berada di bawah naungan dinas cabang.

### **H. Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah tolak ukur (standar) yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran, terhadap penelitiannya. Moleong (2012:324) mengemukakan bahwa untuk menetapkan keabsahan data ini diperlukan teknik pemeriksaan yang terdiri atas 4 (tujuh) kriteria, yaitu:

- a. Derajat Kepercayaan (credibility) untuk memeriksa kredibilitas dilakukan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pengamatan Secara Intensif

Pengamatan dalam penelitian ini akan dilakukan, secara berkesinambungan serta diberikan perhatian yang lebih rinci dan teliti terhadap faktor-faktor yang menonjol dalam mengimplementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian menelaah dengan cermat hingga salah satu atau keseluruhan faktor itu benar-benar dipahami dengan baik.

2) Triagulasi

Trigulasi adalah untuk mengecek kebenaran data tertentu dibandingkan dengan data, yang diperoleh dari sumber lain, termasuk untuk membandingkan data dokumen dengan data dari informan pada berbagai fase penelitian di lapangan, pada waktu yang berlainan, dan dengan menggunakan metode yang berlainan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi distorsi informasi baik dari informan satu dengan yang lainnya atau data dokumen.

3) Membicarakan dengan Orang Lain

Membicarakannya dengan orang lain yang mempunyai pengetahuan tentang pokok penelitian dan juga tentang metode penelitian sejenis (kualitatif).

4) Melakukan *Member Chek*

Mengecek ulang secara garis besar setelah wawancara dengan data dokumentasi dan kembali menemui informan ketika data dirasa kurang.

b. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada persamaan antara konteks pengirim dengan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut

seorang peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data diskriptif secukupnya. Keteralihan hasil penelitian biasanya berkenaan dengan pertanyaan, sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan dan digunakan dalam situasi-situasi lain.

c. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan menurut istilah konvensional disebut dengan reabilitas. Reabilitas merupakan syarat bagi validitas, hanya dengan alat yang reliabel akan dapat diperoleh data yang valid. Alat utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Dengan kata lain validitas data bergantung pada keandalan peneliti.

d. Kepastian (*confirmability*)

Kepastian dilakukan melalui pengumpulan data, rekonstruksi data, sintesis etnik-etnik, menekankan sekecil mungkin bias penelitian, memperhatikan etika dan melakukan pengecekan ulang atas hasil penelitian.

## I. Metode Analisis Data

Sesuai dengan tipe penelitian diskriptif, maka setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami yang pada hakekatnya merupakan upaya mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data yang ada dianalisa serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai.

Adapun hal-hal yang akan ditanyakan dalam wawancara di antaranya. bagaimana



Teknik analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif (dalam Miles dan Hubberman 1992:15). Dalam model analisa ini terdapat 3 (tiga) komponen analisis, yaitu: Reduksi data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, dengan komponen-komponen analisa data sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Untuk memudahkan dalam pengumpulan data, maka peneliti menggunakan alat-alat bantu berupa catatan, tape recorder dan pedoman wawancara (*interview guide*).

b. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh kemudian direduksi oleh peneliti dengan cara: pengkodean, klasifikasi data, menelusuri tema-tema, membuat gugus, membuat partisi, menulis memo. Selanjutnya, dilakukan pilihan terhadap data yang diperoleh di lapangan, data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir secara lengkap tersusun.

c. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap seperti ini, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi

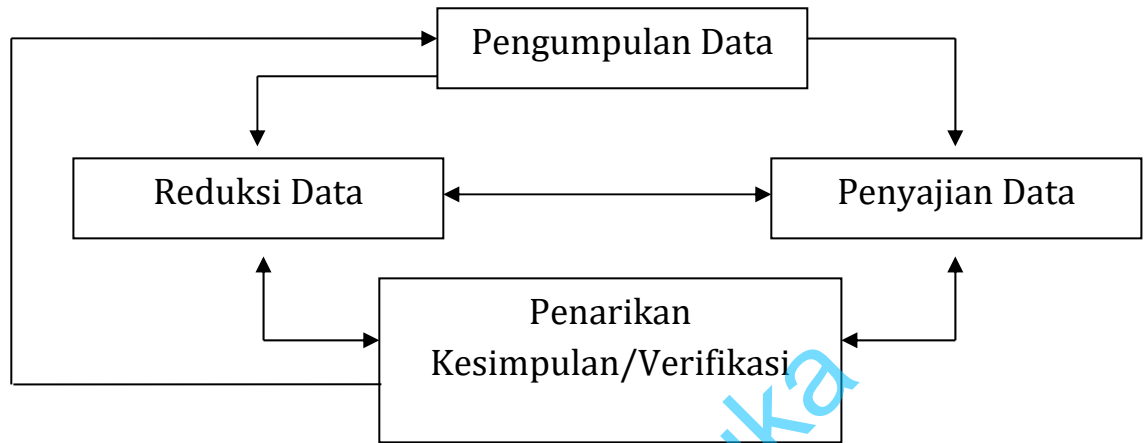
peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dan data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan berbagai jenis matrik, grafik, dan bagan atau bentuk kumpulan kalimat. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang pacu, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menarik kesimpulan yang tepat.

d. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji/diverifikasi kebenarannya, kekokohannya, kecocokannya sehingga menjadi valid. Verifikasi tersebut mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin juga menjadi begitu seksama dan makan tenaga yang relatif lebih banyak dengan peninjauan kembali atau juga upaya-upaya yang luas untuk menunjukkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data lain.

Secara bagan, Model interaktif komponen-komponen analisa data tersebut dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar: 1  
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (1992: 20)

Dalam Model Interaktif tersebut, analisis dilakukan secara dan terus menerus, sehingga peneliti dapat benar-benar memahami apa yang sedang berlangsung pada saat mengumpulkan dan menganalisis data.

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak geografis dan administratif Kabupaten Kotawaringin Barat

Secara geografis berdasarkan peta rekomendasi RTRWK tahun 2012 berada pada posisi adalah  $1^{\circ}26' - 3^{\circ}33'$  Lintang Selatan,  $111^{\circ}13' - 112^{\circ}6'$  Bujur Timur. Secara administratif, luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 Kecamatan meliputi: Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng. Adapun batas-batas wilayah secara administratif, yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamandau
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukamara dan Lamandau
- Sebelah Timur : Kabupaten Seruyan

Untuk lebih jelasnya mengenai Kecamatan serta luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat di lihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1

## Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Prosentase Luas Terhadap Kabupaten
1.	Arut Selatan	2.400	22,31
2.	Kumai	2.921	27,15
3.	Kotawaringin Lama	1.218	11,32
4.	Arut Utara	2.685	24,96
5.	Pangkalan Lada	229	2,13
6.	Pangkalan Banteng	1.306	12,14
<b>Kotawaringin Barat</b>		<b>10.759</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Setda Kabupaten Kotawaringin Barat

a. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data yang dihimpun, bahwa jumlah penduduk pada tahun 2012 tercatat 241.383 jiwa yang tersebar secara tidak merata di enam Kecamatan. Dari jumlah penduduk tersebut yang terbanyak di Kecamatan Arut Selatan (101.805 jiwa) dan terendah berada di Kecamatan Arut Utara (17.746 jiwa). Tidak meratanya penyebaran penduduk ini disebabkan berbagai hal, antara lain: kondisi geografis, ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga menyebabkan ketersediaan jumlah sumber daya manusia di masing-masing wilayahnya.

Sementara itu, dari data yang terkumpul selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat selalu bertambah tiap tahunnya, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,74 persen (lihat Tabel 1.2). Hal ini tentu akan menambah jumlah sumber daya manusia yang ada juga akan mempengaruhi dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang di butuhkan.

Apabila dilihat berdasarkan kepadatannya, bahwa Kecamatan Pangkalan Lada merupakan wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi sebesar 126,24 jiwa/Km<sup>2</sup>, sedangkan tingkat kepadatan terendah di Kecamatan Arut Utara sebesar 6,60 jiwa/Km<sup>2</sup>. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Pangkalan Lada karena luas wilayah yang sangat kecil, sedangkan jumlah penduduk cukup besar. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah dan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.2  
Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2006-2011  
Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Tahun						Laju Pertumbuhan (%) (persen)
		2006	2007	2008	2012	2010	2011	
1	Kotawaringin Lama	15.553	17.292	17.535	17.768	17.100	17.358	2,33
2	Arut Selatan	86.027	89.607	91.043	92.963	100.805	101.805	3,45
3	Kumai	41.274	43.622	44.682	45.367	47.161	47.674	2,98
4	Arut Utara	11.804	13.644	13.880	14.292	16.709	17.746	8,68
5	Pangkalan Banteng	24.509	32.538	33.071	33.273	31.559	32.270	6,42
6	Pangkalan Lada	25.739	26.707	27.172	27.321	28.493	28.909	2,36
<b>Jumlah</b>		202.071	204.906	223.432	227.383	230.984	245.762	3,74

Sumber: Kobar dalam angka 2012 (Katalog BPS)

Tabel 1.3  
Jumlah dan Kepadatan Penduduk  
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rumah Tangga	Luas wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Km <sup>2</sup> /jiwa )
		Laki-laki (jiwa)	Peremp uan (Jiwa)	Jumlah (jiwa)			
1	Kotawaringin Lama	9.213	8.145	17.358	4.807	1.218	14,25
2	Arut Selatan	52.998	48.807	101.805	27.388	2.400	42,42
3	Kumai	24.886	22.788	47.674	11.027	2.921	16,32
4	Arut Utara	10.301	7.445	17.746	4.971	2.685	6,60
5	Pangkalan Banteng	14.385	14.885	32.270	9.228	1.306	24,71
6	Pangkalan Lada	15.377	13.552	28.909	8.033	229	126,24
Jumlah		130.160	115.602	245.762	65.454	10.759	22,84

Sumber: Kobar dalam angka 2012 (Katalog BPS)

## 2. Kondisi Kecamatan Pangkalan Banteng

Kecamatan Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai pada tahun 2003, pada saat itu Kecamatan Kumai di mekarkan menjadi Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Kecamatan Pangkalan Banteng Dengan luas wilayah 1.306 km<sup>2</sup>, Jumlah Penduduk 32.270 jiwa dengan 17 Desa tanpa ada Kelurahan. Kecamatan Pangkalan Banteng merupakan salah satu



Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, berbatasan dengan Kabupaten Seruyan.. Ibu kota Kecamatan ada di Karang Mulya, jarak ibu kota Kecamatan dari ibu kota Kabupaten kurang lebih 70 KM.

Dengan perbatasan Kecamatan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Arut Utara, sebelah Selatan dengan Kecamatan Kumai, sebelah Barat dengan Kecamatan Pangkalan Lada dan Arut Selatan. Saat ini Kecamatan Pangkalan Banteng terdiri dari 17 Désa antara lain : Amin Jaya, Arga Mulya, Karang Mulya, Kebun Agung, Marga Mulya, Mulya Jadi, Natai Kerbau, Pangkalan Banteng, Sido Mulyo, Simpang Berambai, Sungai Hijau, Sungai Kuning, Sungai Bengkuang, Berambai Makmur, Karang Sari, Sungai Pulau, Sungai Pakit.

Adapun keadaan sekolah yang ada Kecamatan Pangkalan Banteng yaitu terdiri dari, 23 TK semua berstatus swasta, 26 SD yaitu 20 SD Negeri dan 6 SD swasta, 8 SMP yaitu 5 SMP Negeri dan 3 SMP swasta serta 1 MTs, 2 SMA yaitu 1 SMA Negeri dan 1 SMA swasta, serta 1 SMK Negeri.

**Tabel 4**

**Keadaan Sekolah Dasar**

**Kecamatan Pangkalan Banteng**

**Berdasarkan Laporan Bulanan Januari 2013**

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH MURID			JUMLAH GURU		KET
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	PNS	NON PNS	
1	SDN 1SIDOMULYO	75	66	141	7	2	9

2	SDN 2 SIDOMULYO	62	48	110	7	3	10
3	SDN 1 KEBUN AGUNG	49	44	63	8	1	9
4	SDN 2 KEBUN AGUNG	58	49	107	7	1	8
5	SDN 1 MARGA MULYA	86	85	171	10	1	11
6	SDN 2 MARGAMULY A	55	63	118	9	1	10
7	SDN 1 ARG MULYA	43	32	75	6	1	7
8	SDN 2 ARGAMULYA	86	85	171	10	1	11
9	SDN 1 NATAI KERBAU	81	90	171	3	4	7
10	SDN 2 NATAI KERBAU	26	28	54	4	2	6
11	SDN 1 MULYA JADI	71	54	125	4	3	7
12	SDN 2 MULYA JADI	47	48	95	5	3	8
13	SDN 3 MULYA JADI	21	21	42	5	2	7
14	SDN 1 PANGKALAN BANTENG	81	52	133	6	2	8
15	SDN 2 PANGKALAN BANTENG	29	28	57	6	2	8
16	SDN 1 KARANG MULYA	186	168	354	11	4	15
17	SDN 2 KARANG MULYA	95	96	191	9	2	11
18	SDN 3 KARANG MULYA	97	81	178	7	4	11
19	SDN 1 AMIN JAYA	187	173	360	11	7	19
20	SDN 2 AMIN JAYA	70	47	117	8	2	10
21	SDS 1 INDOTURBA TENGAH	147	121	268	-	10	10

22	SDS PESONA ASTRA	170	147	317	-	17	17
23	SDS 1 WANA SAWIT	156	134	290	-	16	16
24	SDS 2 WANA SAWIT	116	77	193	-	11	11
25	SDS BANGUN JAYA	57	85	142	-	16	16
26	SDS HARAPAN SEJAHTERA	247	446	446	-	21	21

Tabel 6

## Daftar penerimaan dana BOS di SD Kecamatan Pangkalan Banteng

NO	NAMA SD	JUMLAH MURID	TERIMA DANA BOS	KETERANGAN
1	SDN 1SIDOMULYO	141	81780000	
2	SDN 2 SIDOMULYO	110	63800000	
3	SDN 1 KEBUN AGUNG	63	36.540.000	
4	SDN 2 KEBUN AGUNG	107	62.060.000	
5	SDN 1 MARGA MULYA	171	99.180.000	
6	SDN 2 MARGAMULYA	118	68.440.000	
7	SDN 1 ARGAMULYA	75	43.500.000	
8	SDN 2 ARGAMULYA	171	99.180.000	
9	SDN 1 NATAI KERBAU	171	99.180.000	
10	SDN 2 NATAI KERBAU	54	31.320.000	
11	SDN 1 MULYA JADI	125	72.500.000	
12	SDN 2 MULYA JADI	95	55.100.000	
13	SDN 3 MULYA JADI	42	24.360.000	
14	SDN 1 PANGKALAN BANTENG	133	77.140.000	
15	SDN 2 PANGKALAN BANTENG	57	33.060.000	
16	SDN 1 KARANG MULYA	354	205.320.000	

17	SDN 2 KARANG MULYA	191	110.780.000	
18	SDN 3 KARANG MULYA	178	103.240.000	
19	SDN 1 AMIN JAYA	360	208.800.000	
20	SDN 2 AMIN JAYA	117	67.860.000	
21	SDS 1 INDOTURBA TENGAH	268	155.440.000	
22	SDS PESONA ASTRA	317	183.860.000	
23	SDS 1 WANA SAWIT	290	168.200.000	
24	SDS 2 WANA SAWIT	193	111.940.000	
25	SDS BANGUN JAYA	142	82.360.000	
26	SDS HARAPAN SEJAHTERA	446	258.680.000	

## B. Mekanisme dan Pelaksanaan BOS di Kecamatan Pangkalan Banteng

### 1. Mekanisme Persiapan awal Dana BOS

Pengalokasian dana BOS dilaksanakan, Tim Manajemen BOS pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Banteng melalui tim manajemen BOS Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah tim BOS pusat membuat alokasi dana BOS tiap-tiap provinsi yang telah dituangkan dalam DIPA Provinsi. Tim manajemen BOS Provinsi dan tim manajemen BOS Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah. Tim manajemen BOS Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui surat keputusan penetapan sekolah umum yang menerima BOS yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan Dewan Pendidikan. Tim manajemen BOS kabupaten mengirim surat keputusan alokasi

BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke-tim manajemen BOS provinsi dengan tembusan lembaga Bank atau Kantor Pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh penanggung jawab BOS

Kabupaten Kotawaringin Barat Bapak SM :

Mekanisme penargetan terhadap sekolah-sekolah penerima dana BOS dimulai dengan memberikan informasi kepada semua pihak sekolah tingkat SD dan SMP / setara tentang adanya program BOS, selanjutnya kepada pihak sekolah dijelaskan bahwa semua sekolah tersebut berhak mengajukan diri sebagai penerima dana BOS dengan adanya kelengkapan data siswa yang akan menerima dana BOS.

Pendataan awal dilakukan terhadap sekolah dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten terhadap jumlah sekolah yang ada diwilayah kerjanya. Sedangkan pendataan siswa dilakukan oleh pihak sekolah yang selanjutnya menyerahkan data tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten untuk diverifikasi dan dilaporkan kesesuaian tingkat kebutuhannya kepada Tim Manajemen BOS Provinsi. Setelah semua data diserahkan kepada pihak Manajemen BOS Provinsi, maka Tim Manajemen BOS provinsi lah yang berhak menentukan jumlah alokasi dana BOS untuk tiap kabupaten dan Kota. Selanjutnya dalam proses ini terus diadakan koordinasi oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten dengan pihak Manajemen BOS Provinsi, pihak sekolah calon penerima dana BOS dan lembaga penyalur dana BOS (Bank Kalteng Cabang Pangkalan Bun).

Sesuai dengan proses yang ada dalam Panduan BOS, maka dalam proses alokasi dana kepada pihak sekolah penerima BOS ini disesuaikan dengan data yang diajukan oleh pihak sekolah kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten untuk diserahkan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi yang selanjutnya diserahkan kepada pihak TIM Manajemen BOS Pusat.

Untuk proses penentuan pihak sekolah yang berhak menerima dana BOS didasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dewan Pendidikan, dilampiri dengan Surat Perjanjian

Pemberian Bantuan (SPBB) yang ditandatangani oleh pihak sekolah yang diwakili oleh Kepala Sekolah, selanjutnya diserahkan kepada pihak Manajemen BOS Provinsi dengan tembusan kepada pihak penyalur (Bank Kalteng Cabang Pangkalan Bun) dan pihak sekolah calon penerima dana BOS.

Dalam menetapkan alokasi dana BOS untuk tiap sekolah didasarkan atas pertimbangan 2 semester setiap tahunnya yang masing-masing berbeda.

Dimana setiap tahun dihitung satu anggaran dengan dua pengajuan data alokasi dana disesuaikan dengan tiap semester tahun ajaran baru.

Dengan begitu Mekanisme alokasi dana di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat telah sejalan dengan Prosedur yang di inginkan. mekanisme penargetan, pendataan, dan alokasi dana BOS menurut Ketua Tim PKPS – BBM berpendapat sebagai berikut:

Penargetan bagi sekolah penerima dana BOS dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam panduan BOS. Tim PKPS-BBM beserta Kepala Dinas Pendidikan mengadakan beberapa kali pertemuan yang membahas dan mempelajari tentang panduan program BOS, kemudian dilanjutkan dengan memberikan kegiatan sosialisasi kepada pihak sekolah calon penerima dana BOS serta menginstruksikan kepada pihak sekolah untuk mempersiapkan data-data yang dibutuhkan, selanjutnya data dari sekolah-sekolah tersebut diverifikasi dan diajukan kepada Manajemen BOS Provinsi dengan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat. Melakukan pendataan sekolah tersebut meliputi pendataan jumlah sekolah dan siswa berdasarkan kelas, jenis kelamin dan kriteria siswa miskin. Menginstruksikan kepada sekolah calon penerima BOS untuk membuka rekening atas nama sekolah (bukan atas nama pribadi) bagi sekolah yang memang belum memiliki rekening sekolah. Setelah itu ada penunjukkan terhadap lembaga penyalur dana BOS kepada wilayah Kabupaten oleh TIM BOS Provinsi sebagai penyalur resmi dana BOS dalam hal ini Bank Kalteng Cabang Pangkalan Bun. TIM BOS Provinsi selanjutnya memberitahukan kepada TIM PKPS-BBM Kabupaten melalui lembaga penyalur bahwa dana BOS sudah tersedia direkening masing-masing sekolah. Namun sebelum pemberitahuan ke sekolah-sekolah, TIM PKPS-BBM Kabupaten berkoordinasi dengan lembaga penyalur untuk melakukan kesesuaian dana yang disalurkan ke rekening sekolah. Kemudian barulah TIM PKPS-BBM kabupaten menyampaikan informasi ke sekolah bahwa dana BOS sudah tersedia direkening sekolah. Tiap-tiap sekolah membuat RAPBS dan Rincian Penggunaan Dana BOS dan atau menyampaikan laporan penggunaan dana BOS, kemudian apabila sekolah memenuhi ketentuan, selanjutnya TIM PKPS-BBM menandatangani SP2B. Pihak sekolah (Kepala sekolah dan bendahara) dapat mencairkan dana langsung ke penyalur.

Demikian mekanisme penargetan dan pencapaian alokasi dana BOS, selanjutnya dalam tahapan awal adalah proses penerimaan dana BOS disampaikan oleh kepala sekolah SD Negeri 1 Natai Kerbau :

Dimulai dengan menyusun RAPBS persemester. Menyusun rincian penggunaan dana perjenis anggaran untuk setiap tri wulan. Menyerahkan SPJ triwulan sebelumnya. Mengambil rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten.

Demikian juga yang dilakukan oleh kepala sekolah SD Negeri 2 Natai Kerbau dalam hal penerimaan dana BOS ini beliau menyampaikan:

Proses penerimaan dana BOS dimulai dengan terlebih dahulu mendata keperluan sekolah dan menyesuaikannya dengan panduan BOS selanjutnya membuat RAPBS (RKAS) bersama-sama dengan dewan guru dan komite sekolah. Mempersiapkan rekening sekolah yang diminta Tim Manajemen BOS Kabupaten Kotawaringin Barat. Menyerahkan semua data dan menyertakan nomor rekening bank yang diminta. Setelah beberapa lama, mungkin dalam proses ada pemberitahuan dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa dana sudah ada direkening sekolah dan siap untuk dicairkan. Saya beserta bendahara sekolah mencairkan dana BOS di Bank yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur (sesuai rekening Bank).

Pada dasarnya penerimaan dana BOS setiap sekolah kurang lebih sama hanya tataran yang dilaluinya berbeda demikian yang di sampaikan oleh kepala sekolah SD Negeri 1 Mulyajadi :

Mendata keperluan sekolah dan menyesuaikannya dengan panduan BOS. Membuat RAPBS (RKAS) sekolah. Menyerahkan semua data dan menyertakan rekening sekolah yang diminta Tim Manajemen BOS Kabupaten Kotawaringin Barat. Apabila ada pemberitahuan pencairan dana, dana langsung dicairkan.

Demikian juga disampaikan oleh kepala Sekolah SD Negeri 2 Mulyajadi, terkait penerimaan BOS ini beliau mengatakan:

Persiapan data siswa dan kebutuhan sekolah sekolah yang dituangkan dalam RAPBS (RKAS).Menyerahkan semua data yang diminta Tim

Manajemen BOS Kabupaten Kotawaringin Barat. Menunggu pemberitahuan pencairan dana. Pencairan dana di Bank.

Kepala sekolah SD Negeri 3 Karang Mulya mengatakan:

Dimulai dengan menyusun RAPBS bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah. Mempersiapkan rekening sekolah. Menyerahkan semua data dan menyertakan nomor rekening bank. Menunggu pemberitahuan bahwa dana BOS siap dicairkan. Pencairan dana BOS di Bank

Demikian banyak disampaikan oleh kepala sekolah di SD Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng terkait persiapan awal penerimaan dana BOS hingga tahap Pencairannya.

## 2. Poses Sosialisasi Program BOS

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Dalam hal sosialisasi BOS ini ada pendapat penanggung jawab Tim BOS Kabupaten Kotawaringin Barat:

Proses sosialisasi program BOS dilakukan melalui undangan kedinasan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat kepada pihak sekolah yang diwakili oleh kepala sekolah, bendahara sekolah, ketua komite sekolah, dalam hal ini dibagi menjadi 6 wilayah kecamatan, meliputi (Kecamatan Kumai, Arut Selatan, Arut Utara, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada, dan Kotawaringin Lama). Dimana pertemuan tersebut dihadiri oleh nara sumber dari Manajemen BOS Provinsi, Lembaga Penyalur (Bank Kalteng Pangkalan Bun), Lembaga Perpajakan, Kepolisian, dan beberapa unsur Lembaga Swadaya Masyarakat setempat. Bentuk kegiatan sosialisasi adalah dengan penjelasan oleh pihak nara sumber serta tanya jawab, dan juga membagikan buku Panduan BOS untuk dapat dipelajari oleh pihak-pihak yang hadir pada saat pertemuan dan pertemuan tersebut diadakan sebanyak 1 kali setiap tahun anggaran dana BOS yang sedang berjalan.



Demikian yang dikatakan oleh penanggung jawab BOS kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam hal sosialisasi tersebut Ketua Tim PKPS – BBM juga berpendapat sebagai berikut:

Sosialisasi dilakukan dengan mengadakan beberapa kali pelatihan kepada pihak sekolah oleh TIM PKPS-BBM Kabupaten. Selalu melakukan koordinasi dengan TIM Manajemen BOS Provinsi dan lembaga penyalur dana sekolah serta dengan sekolah dalam rangka penyaluran dana. Mengundang para kepala sekolah, bendahara BOS sekolah, Komite Sekolah untuk mengadakan pertemuan mengenai penjelasan tentang program BOS. Membagikan buku panduan program BOS kepada masing-masing sekolah.

Dalam hal sosialisasi ini kepala sekolah sekolah SD Negeri 1 Natai Kerbau berpendapat:

Menghadiri undangan pertemuan dan pelatihan dari Tim Manajemen BOS Kabupaten. Mempelajari buku panduan program BOS. Mengundang orang tua siswa dan guru serta komite sekolah untuk menjelaskan program BOS serta menyampaikan laporan kegiatan yang didanai program BOS. Meminta masukan kepada pihak guru dan Ketua Komite Sekolah tentang program BOS yang dilaksanakan.

Ungkapan-ungkapan terkait sosialisasi dana BOS ini juga di sampaikan oleh kepala sekolah SD Negeri 2 Natai Kerbau sebagai berikut:

Proses sosialisasi program BOS melalui pemberitahuan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten Kotawaringin Barat melalui undangan pertemuan ditingkat Kabupaten dengan dihadiri oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini disertakan juga bendahara sekolah dan Ketua Komite Sekolah. Dalam proses sosialisasi kami menerima penjelasan tentang program BOS dan juga diberikan buku panduan pelaksanaan program BOS. Untuk mensosialisasikan program BOS kepada pihak orang tua siswa dilakukan dengan mengadakan pertemuan yang dikoordinasikan dengan Ketua Komite Sekolah serta melibatkan beberapa guru dan orang tua siswa yang hadir dalam pertemuan. Sebagai alat pengumuman dipasang spanduk tentang penjelasan adanya program BOS yang diterima oleh sekolah, hal ini sesuai arahan dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Kotawaringin Barat. Pertemuan dengan orang tua siswa dilakukan dengan tatap muka dan menjelaskan tentang RAPBS (RKAS) serta diumumkan dipapan pengumuman.

Sosialisasi merupakan hal penting dilakukan karena dengan sosialisasi tersebut maka hal terkait dapat di ketahui oleh masyarakat seperti pendapat kepala sekolah SD Negeri 1 Mulyajadi sebagai berikut:

Menghadiri undangan pertemuan Tim Manajemen BOS. Mengikuti penjelasan tentang Program BOS dan menerima buku panduan pelaksanaan program BOS. Melakukan pertemuan koordinasi dengan Ketua Komite Sekolah serta melibatkan beberapa guru dan orang tua siswa yang hadir dalam pertemuan. Mengumumkan penjelasan dana BOS yang diterima oleh sekolah. Menjelaskan tentang RAPBS (RKAS) serta diumumkan dipapan pengumuman.

Dengan sosialisasi tersebut maka di dapat keuntungan yaitu informasi tentang dana Bantuan Operasional Sekolah ini kepala sekolah SD Negeri 2 Mulyajadi berpendapat:

Pertemuan dengan Tim Manajemen BOS Kabupaten. Menerima buku panduan BOS dan mempelajarinya. Mengadakan koordinasi dengan Tim BOS Sekolah dan Ketua Komite Sekolah serta melibatkan beberapa guru dan orang tua siswa. Merancang tingkat kebutuhan sekolah dan kemungkinan penggunaan dana yang diinginkan. Memasang pengumuman di papan pengumuman seputar program BOS.

Persiapan dalam implementasi dana BOS tersebut sosialisai merupakan bagian persiapan dari beberapa tahap sebelum melaksanakan penggunaan dana BOS tersebut kepala sekolah SD Negeri 3 Karang Mulya berpendapat:

Adanya undangan pertemuan dan pelatihan dari Tim Manajemen BOS Kabupaten mempelajari buku panduan program BOS. Menjelaskan dan meminta kepada pihak guru dan Ketua Komite Sekolah untuk mengetahui program BOS.

Dengan keberhasilan sosialisasi maka ikut mendukung suksesnya program-program di sekolah. Jadi proses sosialisasi ini merupakan bagian dari proses yang penting.

Terkait sosialisasi ini para dewan guru punya banyak andil demikian yang di sampaikan oleh dewan guru SD Negeri 1 Natai Kerbau:

Sosialisasi dilakukan dengan pengumuman di papan pengumuman tentang program BOS, daftar siswa penerima dana BOS serta rincian penggunaan dana BOS. Menghadiri kegiatan rapat dengan Komite Sekolah yang dihadiri juga oleh orang tua siswa. Menyampaikan pesan-pesan singkat kepada siswa mengenai program BOS.

Sedangkan dewan guru SD Negeri 2 Natai Kerbau terkait sosialisasi ini berkata:

Memberikan pengumuman di papan pengumuman tentang daftar siswa penerima dana BOS. Menghadiri kegiatan rapat dengan Komite Sekolah yang dihadiri juga oleh orang tua siswa. Menyampaikan pesan-pesan singkat kepada siswa mengenai program BOS.

Sosialisasi memang bagian penting dalam sebuah kegiatan tanpa sosialisasi hasil yang diharapkan tidak akan maksimal, dewan guru SD Negeri 1 Mulyajadi terkait sosialisasi ini berkata:

Saya turut menjelaskan kepada siswa mengenai program BOS disekolah ini. Saya membaca tentang pedoman BOS dari buku panduan BOS. Ada pengumuman mengenai daftar siswa penerima dana BOS. Saya ikut menghadiri kegiatan rapat dengan Komite Sekolah yang dihadiri juga oleh orang tua siswa.

Baik secara pribadi atau panggilan instansi dalam hal sosialisasi dana BOS ini dewan guru sangat aktif, demikian di sampaikan oleh dewan guru SD Negeri 2 Mulyajadi:

Mengikuti pertemuan dan mendengarkan penjelasan tentang program BOS. Mempelajarinya dari buku panduan BOS. Ikut menghadiri rapat sekolah tentang program BOS. Berdiskusi dengan teman sekerja tentang program BOS. Apabila ada pertanyaan tentang BOS dari orang tua siswa ikut menjelaskan yang saya ketahui.

Demikian juga dengan dewan guru dari SD yang lain di SD Negeri 3 Karang Mulya pun banyak mengambil bagian berkata:

Pernah diadakan pertemuan dan mendengarkan penjelasan tentang program BOS. Bercerita dengan sesama rekan guru tentang program BOS.

Terkait sosialisasi penyaluran dana BOS ini Komite Sekolah berpendapat :

Setiap pencairan dana BOS pihak Sekolah selalu memberitahu kepada Ketua Komite Sekolah. Komite sekolah juga memberitahukan kepada orang tua murid mengenai program BOS. Dalam proses sosialisasi penyaluran Dana BOS Komite Sekolah selalu diberitahu pihak sekolah kapan waktu sosialisasi penyaluran dana BOS. Kerjasama dengan pihak sekolah dalam mensosialisasikan penyaluran dana BOS dan memberikan masukan atau saran kepada pihak Sekolah bagaimana sebaiknya sosialisasi penyaluran dana BOS tersebut. Dalam penyaluran dana BOS pihak Komite Sekolah diberitahu dan terkadang ada juga beberapa orang tua siswa yang menanyakan tentang program BOS ini.

### 3. Mekanisme penyaluran dana BOS di Kecamatan Pangkalan Banteng

Penyaluran merupakan tahapan sesudah di terimanya dana BOS oleh sekolah. Dengan di salurkannya dana BOS harapannya dapat di manfaatkan semaksimal mungkin untuk operasional sekolah selanjutnya berpengaruh pada peserta didik. Terkait penyaluran dan pengambilan dana BOS ini ketua penganggung jawab tim BOS berpendapat:

Mekanisme penyaluran dana BOS dilakukan secara bertahap oleh TIM. Manajemen BOS Provinsi melalui Bank Kalteng Pangkalan Bun. Tahapan tersebut dilalui tiap per 3 bulan. Secara umum dan rinci mengenai mekanisme penyaluran dan pengambilan dana BOS dilakukan sesuai mekanisme pada panduan BOS yang ada. Mengenai penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah hal tersebut sangat bervariasi dan disesuaikan oleh masing-masing tingkat kebutuhan sekolah yang juga tergantung pada saat pengajuan serta didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.

Pengambilan dan penyaluran dana BOS ini merupakan tahap yang membuat dana BOS untuk sampai pada sekolah sebagaimana di katakan Ketua Tim PKPS-BBM

TIM BOS Pusat menyampaikan alokasi dana BOS kepada tiap Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan daftar alokasi dana BOS tiap sekolah kepada TIM BOS Provinsi. Tim Manajemen BOS Provinsi mengajukan surat permohonan pembayaran, kemudian menerbitkan surat perintah membayar oleh unit terkait di Dinas Pendidikan Provinsi, selanjutnya mengirimkan surat perintah membayar dimaksud ke KPKN Provinsi. KPKN Provinsi melakukan verifikasi terhadap surat perintah membayar untuk selanjutnya menerbitkan SP2D. Dana BOS yang telah dicairkan dari KPKN ditampung ke rekening Tim Manajemen BOS Provinsi yang selanjutnya dana disalurkan ke rekening sekolah melalui lembaga penyalur masing-masing wilayah.

Setelah disalurkan dana BOS hingga sampai di sekolah maka selanjutnya digunakan oleh sekolah secara efektif dan efisien. Di katakan oleh kepala sekolah SD Negeri 1 Natai Kerbau terkait penggunaan dana BOS ini beliau berkata:

Secara prosedural sudah dilaksanakan sesuai dengan panduan buku BOS. Melaporkan rincian dan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Transparan dalam laporan pertanggungjawaban dengan pihak sekolah (Komite Sekolah, Guru dan orang tua siswa). Di gunakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan sekolah dan siswa.

Selanjutnya kepala sekolah SD Negeri 1 Pangkalan Banteng dengan simpelnya mengatakan:

Digunakan secara bertahap sesuai pengajuan yang diusulkan dan tidak menyimpang dari ketentuan panduan BOS.

Terkait penggunaan dana BOS ini kepala Sekolah SD Negeri 2 Mulyajadi Berkata:

Dana BOS digunakan sesuai dengan pengajuan yang diusulkan dan dapat dipertanggung jawabkan serta tidak menyimpang dari ketentuan panduan BOS.

Demikian juga dikatan oleh kepala sekolah SD Negeri 3 Karang Mulya

Dalam hal penggunaan dana BOS ini berkata:

Dana BOS digunakan sesuai dengan RAPBS dan digunakan dengan baik. Melaporkan rincian penggunaan dana.

Dalam perjalanan implementasi BOS ini di sekolah dari dewan guru mendapat perlakuan yang beda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, saat di beri pertanyaan bagaimana program penggunaan dana BOS di sekolah apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dewan guru SD Negeri 1 Natai Kerbau mengatakan:

Berdasarkan yang saya ketahui bahwa program BOS yang dilakukan di SDN 1 Natai Kerbau Kecamatan Pangkalan Banteng sudah sesuai dengan panduan BOS yang berlaku.

Demikian juga yang disampaikan oleh dewan guru SD Negeri 2 Natai Kerbau:

Sejak adanya program BOS terlihat adanya kemajuan-kemajuan baik dari sarana ataupun keringanan-keringanan pembiayaan siswa. Kesesuaian penggunaan dana BOS secara keseluruhan tidak saya ketahui, namun mungkin sudah sesuai dengan ketentuan program BOS.



Gambar 1. White board pengganti blackboard

Hal senada juga disampaikan oleh dewan guru SD Negeri 1 Mulyajadi:

Yang saya ketahui bahwa program BOS dilakukan secara transparansi disekolah ini, hal ini berarti ada keterbukaan masalah penggunaan dana BOS secara keseluruhan dan mungkin sudah sesuai dengan ketentuan program BOS yang ada.

Sedangkan dewan guru SD Negeri 2 Pangkalan Bateng mengatakan:

Saya rasa dana BOS disekolah ini sudah dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Penggunaan dana BOS disesuaikan dengan kondisi kebutuhan sekolah yang ada dan sudah cukup sesuai.

Komite sekolah SD Negeri 1 Natai Kerbau terkait hal ini berpendapat

Berdasarkan sepengetahuan saya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik dalam penyusunan RAPBS sampai ke rincian penggunaan dana BOS pihak Komite Sekolah selalu dilibatkan.

Komite sekolah sangat berperan dalam menyusun RAPBS ini dikatakan oleh ketua komite SD Negeri 1 Natai Kerbau:

Komite Sekolah SD Negeri 1 Natai Kerbau selalu diundang dan terlibat langsung Dalam penyusunan RAPBS melalui Rapat Dinas Sekolah. Menghadiri undangan rapat sekolah dan ikut memberikan saran. Pihak sekolah selalu memberitahukan Komite Sekolah apabila menyusun RAPBS dan ikut menyetujui dan memberikan usulan terhadap hasil rapat. Komite Sekolah SDN 1 Natai Kerbau berperan dan terlibat sebagai pihak yang ikut memberi persetujuan dalam penyusunan RAPBS

Dalam kaitannya Penyediaan sarana dan prasarana sekolah setelah ada dana BOS dewan guru di SD Negeri Pangkalan Banteng mengatakan

Sarana dan prasarana yang ada setelah program BOS lebih baik dari sebelumnya. Sarana dan prasarana yang ada bertambah dan dibeli dari dana BOS.

#### 4. Faktor-Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan sesuatu hal yang menjadi suatu jalannya proses menjadi tidak lancar, dalam suatu kegiatan di usahakan semaksimal mungkin untuk meniadakan suatu faktor penghambat. Faktor penghambat dapat di analisa setelah jalannya suatu proses, dan untuk meminimalkan faktor penghambat tersebut biasanya mengadakan perbaikan sistem, baik langsung atau tidak langsung, karena bisa jadi perbaikan itu untuk tahap yang akan datang.

Dalam hal perjalannya implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini juga adanya faktor penghambat, diman di setiap sudut pandang personal yang berwenang, seperti yang dikatakan oleh penanggung jawab /ketua Tim BOS berikut:

Terkadang adanya Kepala Sekolah dan Tim manajemen BOS Sekolah yang kurang cepat mengerti dalam mengartikan secara cermat maksud dan tujuan program BOS, dalam hal ini diperlukan penjelasan yang lebih detail melalui jawaban yang diajukan oleh mereka mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan program tersebut. Kesiapan dan ketepatan data yang dikumpulkan oleh pihak sekolah terkadang kurang lengkap secara administratif padahal sudah diberikan petunjuk yang jelas dari buku panduan BOS. Untuk itu pihak manajemen BOS tiap sekolah perlu mempelajari secara baik panduan yang sudah diberikan. Dalam hal hal yang menghambat kelancaran proses sosialisasi misalnya kurang dan tidak adanya dukungan pendanaan sosialisasi yang dianggarkan dalam program BOS sehingga pendanaan sosialisasi terpaksa dikeluarkan dari anggaran dan sumber lain. Kurangnya dukungan lembaga swasta seperti media periklanan surat kabar dan televisi juga menjadi faktor penghambat. Sebagai suatu contoh pernah saya menghubungi pihak televisi daerah (TVRI Kalteng) untuk berkoordinasi dalam proses sosialisasi program BOS, akan tetapi pihak TVRI Kalimantan Tengah membebankan biaya promosi/iklan yang tidak terjangkau, padahal sebagai bagian dari lembaga penyiaran pemerintah seharusnya ada dukungan yang terkoordinasi terhadap suksesnya program BOS untuk diketahui masyarakat luas. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Manajemen BOS Kabupaten (saya) terbatas pada lintas struktural pada pihak sekolah penerima dana BOS dan bukan kepada pihak orang tua siswa, karena kepada orang tua siswa sebagai penerima langsung manfaat program BOS merupakan tanggung jawab pihak



sekolah. Kondisi wilayah sekolah yang terpencar dan sulitnya transportasi menuju lokasi memerlukan waktu yang cukup lama dalam perjalanan, sehingga terkadang inspeksi dan kunjungan ke lokasi sekolah jadi terhambat. Dalam tahapan penyaluran dana BOS masih ada keterlambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor teknis manajemen BOS Provinsi dan Pusat. Demikian juga pelaporan penerimaan dana BOS oleh pihak sekolah juga masih ada yang terlambat sehingga secara administratif agak terlambat dalam prosesnya. Apabila ada pergantian pimpinan sekolah dan strukturnya cenderung memerlukan sosialisasi ulang sebagai pemahaman prosedural panduan BOS, ini dapat juga merubah kebijakan internal pihak sekolah dalam manajemen dana BOS disekolahnya.

Faktor penghambat yang di sampaikan oleh ketua tim penanggung jawab tersebut sangatlah detail beliau uraikan dari kepala sekolah, sistem sosialisasi hingga perlunya dukungan dari pihak terkait terutama asset pemerintah yang lain di harapkan dapat memberikan bantuannya seperti dikatakan semisalnya Televisi Republik Indonesia (TVRI) khususnya TVRI Kalimantan Tengah. Demikian juga di katakan oleh menejer program BOS Kabupaten Kotawaringin Barat beliau menyampaikan faktor penghambat implementasi dana BOS sebagai berikut:

Kualifikasi akademik pengelola dana BOS seperti Kepala Sekolah dan Bendahara BOS masih rendah (SPG, Diploma I, Diploma II, dan SMA) Budaya kerja yang bersifat pasif atau tidak kreatif. Komite sekolah seharusnya merupakan mitra sekolah tidak diberdayakan sebagaimana pemberi pertimbangan, pendukung, pengawas dan mediator penyelenggara pendidikan di sekolah. Jauhnya wilayah masing-masing sekolah sarana transportasi yang buruk.

Dengan adanya hambatan yang masih ada membuat kurang lancarnya proses implemtasi dana BOS ini. Kenyataan di lapangan masih ditemukan hambatan yang nyata seperti dikatakan oleh kepala Sekolah SD Negeri 1 Mulyajadi berikut ini:

Penyetoran pajak yang sulit dilakukan karena di Pangkalan Banteng belum ada lembaga yang menerima pajak, terpaksa harus ke kota Pangkalan Bun. Belum tersedianya NPWP sekolah.

Begitu juga di samapaikan oleh dewan guru SD Negeri 1 Natai Kerbau faktor penghambatnya seperti pendapatnya berikut ini:

Faktor yang menghambat adalah masih adanya kekurang pedulian wali siswaterhadap program BOS ini terlihat sedikitnya jumlah wali siswa yang hadir padasaat rapat dengan Komite Sekolah yang membicarakan program BOS. Tidak adanya dana tambahan untuk kegiatan program BOS seperti pada waktu rapat atau pertemuan.

Faktor penghambat implementasi dana BOS ini juga disampaikan oleh dewan guru SD Negeri 2 Natai Kerbau:

Masih kurang pedulinya orang tua siswa terhadap program BOS.Saya tidak memahami secara menyeluruh peraturan program BOS.Yang pendukung adalah sarana kerja guru sudah lebih baik. Kesulitan mengetahui kriteria siswa miskin secara benar karena adakecenderungan siswa yang orang tuanya dianggap mampu ikut memberikanketerangan sebagai keluarga miskin, untuk ikut menerima dana BOS.

Hambatan dilapangan juga dikemukakan oleh komite sekolah selaku warga masyarakat sekaligus sebagai wali murid di Sekolah dikatakan oleh Komite sekolah SD Negeri 1 Natai Kerbau bahwa:

Komite Sekolah memiliki peran dalam menentukan keberhasilan penyusunan RAPBS dan Program Sekolah lainnya. Ketersediaan waktu yang terbatas. Keterbatasan sarana dalam mensosialisasikan ke orang tua murid. Kesulitan dalam memberikan pemahaman dan penjelasan kepada orang tua murid. Ketidak pedulian orang tua muridjarang bertanya dan jarang hadir.

Hal senada juga dikatan oleh ketua Komite SD Negeri 2 Natai Kerbau:

Waktu yang terkadang tidak memungkinkan. Tidak adanya dana untuk mensosialisasikan ke orang tua murid. Pemahaman dan penjelasan kepada orang tua terkadang sulit mengerti. Dalam rapat yang mengundang orang tua murid jarang dihadiri oleh orang tua murid.

Lain halnya dengan ketua komite SD Negeri 1 Mulyajadi terkait faktor penghambat ini beliau berpendapat:

Kehadiran orang tua siswa yang jarang hadir pada saat diundang rapat. Tidak adanya dana sosialisasi lanjut kepada orang tua siswa. Tingkat pengetahuan orang tua siswa yang relatif rendah sehingga menyebabkan ketidakpedulian mereka dengan Program BOS. Kekurang pedulian orang tua siswa dalam mengawasi pelaksanaan program BOS. Keterbatasan waktu dalam mensosialisasikan ke orang tua murid. Kesulitan dalam memberikan pemahaman dan penjelasan kepada orang tua murid.

#### 5. Faktor-faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah sesuatu yang mendorong lancarnya perjalanan suatu proses. Dengan adanya faktor pendukung maka suatu proses akan berjalan dengan baik. Seperti halnya implemetasi dana BOS ini ini dikatakan oleh penangung jawab/ketua tim Program BOS :

Kepala Sekolah dan Tim manajemen BOS Sekolah diundang dalam setiap pertemuan rata-rata semua hadir dalam pertemuan, ini menunjukkan indikasi antusiasnya pihak sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan dan demi kesuksesan program BOS. Adanya perubahan kinerja semua TIM Manajemen BOS dari tingkat Pusat sampai sekolah yang menunjukkan peningkatan, karena sejak sosialisasi pertama pada tahun 2005 sampai tahun 2011 pemahaman kerja semakin meningkatkan dan didukung oleh adanya perubahan-perubahan hal-hal teknis, demikian juga semakin meluasnya pengetahuan masyarakat tentang program BOS. Adanya dukungan sepenuhnya oleh pihak perbankan dan perpajakan sebagai lembaga penyalur BOS yang juga terkait secara langsung mengenai distribusi dana. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Manajemen BOS Kabupaten (saya) terbatas pada lintas struktural pada pihak sekolah penerima dana BOS dan bukan kepada pihak orang tua siswa, karena kepada orang tua siswa sebagai penerima langsung manfaat program BOS merupakan tanggung jawab pihak sekolah. Kondisi wilayah sekolah yang terpencar dan sulitnya transportasi menuju lokasi memerlukan waktu yang cukup lama dalam perjalanan, sehingga terkadang inspeksi dan kunjungan ke lokasi sekolah jadi terhambat

Terkait faktor pendukung ini hal senada juga di sampaikan oleh manajer Program BOS Kabupaten Kotawaringin Barat:

Tanggapan positif dari pihak sekolah calon penerima BOS, karena program tersebut dinilai pihak sekolah akan sangat dengan memberikan bantuan kepada sekolah dalam membebaskan biaya siswa. Dalam koordinasi dengan pihak sekolah dilibatkan stake holdernya. Tersedianya data yang akurat dari tiap sekolah. Kehadiran kepala Sekolah dan stakeholdernya dalam pertemuan. Adanya dukungan dari pihak penyalur dana BOS. Kesadaran dari pihak sekolah dan masyarakat akan manfaat program BOS bagi siswa.

Kontribusi semua pihak memang dapat memperlancar jalannya implementasi program BOS ini. Sesuai wawancara kami dengan beberapa kepala sekolah di SD Negeri Pangkalan banteng mereka memberikan apresiasi yang positif, seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah SD Negeri 1 Natai Kerbau.

Tidak ada hambatan yang berarti, akan tetapi masalah transportasi yang terkadang memerlukan waktu yang cukup lama sehingga setidaknya menyita waktu. Adanya dukungan dari peran serta masyarakat, guru, pembuktian tersedianya sarana dan prasarana belajar yang baik, serta peran siswa.

Kepala Sekolah SD Negeri 1Natai Kerbau tersebut telah memberikan paparan yang menurut beliau sebagai pendorong atau pendukung implementasi Program BOS ini. Di lain pihak kepala sekolah SD Negeri 2 Natai kerbau terkait faktor pendukung ini beliau berpendapat:

Tidak ada faktor yang dinilai sangat menghambat program BOS, semua berjalan dengan baik sesuai panduan BOS. Faktor pendukung yang ada yakni adanya kerjasama yang baik antara pihak terkait dan juga orang tua siswa. Adanya rekomendasi, artinya dengan dikeluarkannya rekomendasi dana BOS semua siap digunakan oleh sekolah, sesuai dengan keperluan dalam RAPBS. Berjalan lancarnya pembuatan LPJ.

Lainnya halnya kepala sekolah SD Negeri 2 Natai Kerbau terkait dengan faktor pendukung ini kepala Sekolah SD Negeri 1 Mulyajadi juga memiliki acungan seperti pendapatnya berikut ini:

Terkadang adanya tanggapan yang negatif dari dengan orang tua siswa namun tidak terlalu berarti dan kurang baiknya sarana jalan yang dilalui menuju pusat kota. Faktor pendukung adanya kerjasama yang baik antara pihak terkait dan juga sebagian orang tua siswa.

Demikian juga halnya kepala sekolah SD Negeri 2 Mulyajadi terkait faktor pendukung ini beliau berpendapat:

Faktor pendukung yang ada yakni tanggapan yang baik dari orang tua siswa.

Para dewan guru beberapa sekolah terkait faktor pendukung ini mereka berpendapat sebagai berikut:

Faktor pendukung adalah kesadaran dari pihak guru untuk mensukseskan program BOS. Adanya semangat kerja dari guru karena tersedianya sarana dan prasarana kerja yang lebih memadai. Selaku bagian dari sekolah tidak ada pengaruh dalam pengambilan keputusan dalam rapat tentang BOS. Kerja lebih mudah karena sarana lebih memadai. Mengikuti keputusan rapat yang ada.

## 6. Manfaat Dana BOS

Adapun persyaratan penyaluran dana BOS adalah Bagi sekolah dasar yang belum memiliki rekening rutin harus membuka nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi). Sekolah-sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada tim manajemen BOS Kabupaten Kotawaringin Barat. Tim manajemen BOS Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan verifikasi dan

mengkompilasi nomor rekening sekolah-sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk sekolah sekolah di Kecamatan Pangkalan Banteng selanjutnya dikirim kepada tim manajemen BOS Provinsi, disertakan pula daftar sekolah\manajemen\ponpes yang menolak BOS.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari kepala sekolah SD Negeri 2 Natai Kerbau :

Proses penerimaan dana BOS dimulai dengan terlebih dahulu mendata keperluan sekolah dan menyesuaikannya dengan panduan BOS selanjutnya membuat RAPBS (RKAS) bersama-sama dengan dewan guru dan komite sekolah. Mempersiapkan rekening sekolah yang diminta Tim Manajemen BOS Kabupaten Kotawaringin Barat. Menyerahkan semua data dan menyertakan nomor rekening bank yang diminta. Setelah beberapa lama, mungkin dalam proses ada pemberitahuan dari TimManajemen BOS Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa dana sudah ada direkening sekolah dan siap untuk dicairkan. Saya beserta bendahara sekolah mencairkan dana BOS di Bank yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur (sesuai rekening bank).

Apa yang disampaikan oleh Penanggung jawab BOS Kabupaten Kotawaringin Barat telah sejalan dengan keadaan lapangan khususnya SD di Kecamatan Pangkalan Banteng. Penyaluran dana BOS Penyaluran dana untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan. Dana BOS disalurkan tiap periode 3 bulan. Dana BOS disalurkan pada awal bulan dari setiap periode 3 bulan. Penyaluran dana dilaksanakan oleh tim tingkat Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bank Pemerintah Pembangunan Kalimantan Tengah dengan tahap-tahap sebagai berikut: Tim manajemen BOS Provinsi mengajukan surat permohonan pembayaran langsung (SPP-LS) dana BOS sesuai dengan kebutuhan, Unit terkait pada dinas pendidikan Provinsi\Kanwil Kemenag Provinsi melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud, kemudian menerbitkan surat perintah membayar langsung (SPP-LS)

Dinas pendidikan Provinsi/Kanwil Kemenag Provinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Provinsi. KPPN melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang diterbitkan kepada rekening Kas Negara. Dana BOS yang telah dicairkan dari KPPN ditampung ke rekening penampung tim manajemen BOS Provinsi yang selanjutnya dana disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui kantor Bank Pemerintah/Pos yang tunjuk sesuai dengan perjanjian kerja sama antara dinas pendidikan Provinsi/Kanwil Kemenag Provinsi dan Lembaga Penyalur (Bank/Pos). Perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan untuk periode sebelumnya dapat digunakan/diperpanjang atau diperbaiki apabila perlu. Tim manajemen BOS Provinsi harus melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank penyalur. Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota dan sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh kantor Pos/Bank dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh manajemen BOS Kabupaten/Kota. jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada kantor Pos/Bank, tim manajemen BOS Kabupaten/Kota dan tim manajemen BOS Propinsi untuk diselesaikan lebih lanjut. Jika dana BOS diterima oleh sekolah lebih besar dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat dari kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus segera mengembalikan kelebihan dana BOS tersebut ke rekening Tim manajemen BOS Provinsi. Secara teknis mekanisme pengembalian dana tersebut diatur oleh manajemen BOS Provinsi dan lembaga penyalur. Jika ada siswa pindah atau mutasi ke sekolah lain setelah semester berjalan maka dana BOS siswa tersebut dalam

semester berjalan menjadi hak sekolah atau madrasah yang lama. Jika pada tahun anggaran, masih terdapat sisa dana BOS di rekening penampung tim manajemen BOS Provinsi akibat dari kelebihan pencairan dana atau pengembalian dari sekolah, selama hak seluruh sekolah penerima dana BOS telah terpenuhi maka dana tersebut harus dikembalikan di kas Negara. Bunga bank atau jasa giro akibat adanya dana rekening penampungan manajemen BOS Provinsi harus disetor ke Kas Negara.

### 3. Mekanisme pengambilan dana BOS

Tim manajemen BOS Provinsi menyerahkan data rekening sekolah dan besar dana yang harus disalurkan kepada lembaga penyalur dana. Selanjutnya lembaga penyalur dana yang ditunjuk men-transfer dana sekaligus ke setiap rekening sekolah dan masuk ke Pos penerimaan di dalam RAPBS. Pengembalian dana BOS dilakukan para sekolah dengan diketahui oleh komite Sekolah tersebut dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisihkan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis Rekomendasi atau persetujuan dari pihak manapun sehingga menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional sekolah. Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK alokasi yang dibuat oleh tim manajemen BOS kabupaten/kota, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun. Penyaluran dana BOS secara bertahap (3 bulanan) bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan tiap



bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagai mana tertuang dalam RAPBS. Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun pelajaran atau tahun anggaran maka dana tersebut tetap milik kas sekolah tidak disetor dikas negara.

#### 4. Kegunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS telah jelas diatur dalam Juknisnya bahkan dari pemerintah pusat telah menyebarkan slogan-slogan terkait penggunaan dan BOS seperti nampak pada gambar 2 di bawah ini



Gambar 2. Poster penggunaan dana BOS ada di tempel di papan pengumuman SD Negeri 1 Natai Kerbau

Dana BOS ini oleh sekolah wajib dikelola dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung proses belajar-mengajar dengan adanya dana BOS ini siswa-siswi dibebaskan dari pembayaran iuransekolah gratis. Dana BOS digunakan untuk biaya pendaftaran siswa baru, ini mulai tahun 2006. Pembelian buku-buku pelajaran untuk koleksi buku perpustakaan. Pembelian bahan praktek dan ATK. Pembelian barang-barang kegiatan sekolah. Untuk perbaikan sarana

sekolah. Pembiayaan listrik dan telepon. Pembayaran honor guru. Pembelian alat peraga seperti peta dan globe.



Gambar 3. Buku Paket yang dibeli dari dana BOS

Menurut aturan yang ada dalam buku panduan penggunaan dana BOS hanya boleh digunakan untuk Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk koleksi perpustakaan. Pembelian bahan-bahan habis pakai (buku tulis, kapur tulis, pensil, dan lain lain. Pembiayaan kegiatan kesiswaan (olahraga, karya ilmiah, kesenian, dan lain-lain) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan lain-lain. Pengembangan profesi guru (pelatihan, MGMP). Pembiayaan perawatan sekolah (pengecatan, perbaikan atap, dan lain-lain). Pembiayaan langganan daya dan jasa. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai oleh pemerintah dan/pemerintah daerah. Tambahan intensif bagi guru PNS ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin. Pembiayaan pengelolaan BOS (ATK, penggandaan surat-menyurat atau penyusunan laporan)

Di bawah ini di tampilkan gambar-gambar barang yang di beli dari uang BOS



Gambar 4. Globe yang merupakan alat peraga pendidikan di beli dari dana BOS

Seperti yang di sampaikan oleh kepala sekolah SD Negeri 1 Natai Kerbau:

Secara prosedural sudah dilaksanakan sesuai dengan panduan buku BOS. Melaporkan rincian dan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Transparan lama laporan pertanggung jawaban dengan pihak sekolah (Komite Sekolah, Guru dan orang tua siswa). Digunakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan sekolah dan siswa.

Penggunaan dana BOS di sesuaikan dengan keadaan sekolah yang pada intinya untuk peserta didik di katakan oleh kepala sekolah SDN 2 Natai Kerbau:

Dana BOS digunakan antara lain untuk membayar honor dan biaya transport guru honor, guru piket, wali kelas, pengembangan diri, tambahan pelajaran untuk kelas 3, barang habis pakai dan yang lainnya sesuai panduan BOS.

Barang yang habis pakai semisal gambar di bawah ini:



Gambar 5. spidol sebagai bahan habis pakai dari SD N 2 Natai Kerbau



Gambar 6. Kapur tulis dan isi spidol sebagai bahan habis pakai dari SD N 2 Natai Kerbau

5. Dana BOS tidak diperbolehkan untuk :

Dana BOS tidak diperbolehkan untuk : Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. Di pinjamkan pada pihak lain. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan murid. Membangun gedung atau ruangan baru. Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. Menanamkan saham. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah

Pusat/Daerah, misalnya guru kontrak/guru bantu dan kelebihan jam mengajar.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

George C. Edward III mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi. Dalam kaitan hal ini dapat dikatakan bahwa Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Keterkaitan Birokrasi dalam implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah ini sangatlah besar adanya kerjasama antar lembaga seperti dinas pendidikan Propinsi, dinas pendidikan Kabupaten, sekolah terkait hingga komite sekolah, dalam penyusunan stuktur sekolah juga harus mengetahui dari dewan pendidikan kabupaten. Hubungan antar birokrasi ini menjamin lancarnya implementasi dana bantuan operasional sekolah tersebut. Seperti terkait dalam pendataan awal adanya kerjasama antar tim sangat diperlukan, penanggung BOS kabupaten Kotawaringin Barat telah menjelaskan. Pendataan awal dilakukan terhadap sekolah dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten terhadap jumlah sekolah yang ada diwilayah kerjanya. Sedangkan pendataan siswa dilakukan oleh pihak sekolah yang selanjutnya menyerahkan data tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten untuk diverifikasi dan dilaporkan kesesuaian tingkat kebutuhannya kepada Tim Manajemen BOS Provinsi. Setelah semua data diserahkan kepada pihak Manajemen BOS

Provinsi, maka Tim Manajemen BOS provinsilah yang berhak menentukan jumlah alokasi dana BOS untuk tiap kabupaten dan Kota. Selanjutnya dalam proses ini terus diadakan koordinasi oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten dengan pihak Manajemen BOS Provinsi, pihak sekolah calon penerima dana BOS dan lembaga penyalur dana BOS (Bank Kalteng Cabang Pangkalan Bun).

Dengan demikian dapat di lihat hubungan birokrasi yang saling berkaitan. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Untuk itu perlu adanya kerjasama yang baik antar lembaga birokrasi yang ada.

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Sumberdaya merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari staf, informasi, wewenang dan disposisi. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, diantaranya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak cukup memadai ataupun tidak kompeten. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup, tetapi diperlukan kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang sesuai (kompeten dan kapabel). Dalam keterkaitan staf ini implementasi dana operasional

sekolah menjadi lebih baik karena di dukung oleh sumberdaya yang baik, seperti pada penandatanganan hasil bantuan tersebut menunjukkan hasil seseorang yang berkompenten , terkait dana bantuan operasional sekolah ini banyak keterkaitan sumber daya pendukungnya. Seperti kegiatan Pemberian Bantuan (SPBB) yang ditandatangani oleh pihak sekolah yang diwakili oleh Kepala Sekolah, selanjutnya diserahkan kepada pihak Manajemen BOS Provinsi dengan tembusan kepada pihak penyalur (Bank Kalteng Cabang Pangkalan Bun) dan pihak sekolah calon penerima dana BOS.

Menunjukkan adanya kemampuan sumber daya yang baik dalam penyelenggaraan program bantuan operasional sekolah ini. Selanjutnya selain staf unsur yang harus ada dalam kebijakan adalah informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang ada terkait implementasi dana bantuan operasional sekolah ini, sosialisasi sangat penting menjadi unsur penentu kebijakan, saat sosialisasi adanya dana bantuan operasional sekolah di kabupaten Kotawaringin Barat. Bentuk kegiatan sosialisasi adalah dengan penjelasan oleh pihak nara sumber serta tanya jawab, dan juga membagikan buku Panduan BOS untuk dapat dipelajari oleh pihak-pihak yang hadir pada saat pertemuan dan pertemuan tersebut diadakan sebanyak satu kali setiap tahun anggaran dana BOS yang sedang berjalan. Proses sosialisasi program BOS dilakukan melalui undangan kedinasan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat kepada pihak sekolah

yang diwakili oleh kepala sekolah, bendahara sekolah, ketua komite sekolah, dalam hal ini dibagi menjadi enam wilayah kecamatan, meliputi (Kecamatan Kumai, Arut Selatan, Arut Utara, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada, dan Kotawaringin lama). Dimana pertemuan tersebut dihadiri oleh nara sumber dari Manajemen BOS Provinsi, Lembaga Penyalur (Bank Kalteng Pangkalan Bun), Lembaga Perpajakan, Kepolisian, dan beberapa unsur Lembaga Swadaya Masyarakat setempat.

Dengan demikian dapat di lihat baiknya informasi yang di peroleh. Adanya sosialisasi yang baik akan diperoleh informasi yang memuaskan. Dengan begitu salah unsur penentu kebijakan publik ini dapat terpenuhi. Unsur selanjutnya adalah adanya wewenang. Pada wewenang umumnya harus berifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Dalam keterkaitan wewenang ini sangat menentukan berjalannya proses kebijakan publik, dana bantuan operasional sekolah dapat di cair apabila ada legalitas dari para pemangku keputusan, di Kabupaten Kotawaringin Barat unsur penentu kebijakan telah bekerja dengan baik. Untuk proses penentuan pihak sekolah yang berhak menerima dana BOS didasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dewan Pendidikan, dilampiri dengan Surat Perjanjian. Dapat di lihat tidak akan bisa mencairkan dana BOS apabila tidak ada legalitas dari yang memangku keputusan. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat mengagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam kontek yang lain, ketika wewenang



formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Implementor kebijakan akan berjalan dengan baik seiring di dukunginya oleh semua pihak yang terkait.

Selanjutnya yang harus ada adalah fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Penggunaan dana bantuan operasional sekolah ini di sekolah banyak di pakai untuk fasilitas penunjang kegiatan belajar di sekolah SD Negeri di Kecamatan Pangkalan Banteng terjadi dana BOS digunakan antara lain untuk membayar honor dan biaya transport guru honor, guru piket, wali kelas, pengembangan diri, tambahan pelajaran untuk kelas enam, barang habis pakai dan yang lainnya sesuai panduan BOS.

Fasilitas di beli dari dana BOS haruslah sesuai dengan juknis yang ada. Pada tahun 2012 ini juknis yang di pakai adalah permendibud nomor 51 tahun 2011. Semua penggunaan harus sesuai dengan juknis tersebut. Dalam menentukan kebijakan langkah yang harus ada adalah disposisi. Menurut Edward III dalam Winarno (2005: 142-143) mengemukakan “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai keputusan awal. Sebaliknya, jika para pelaksana bersifat negatif

atau menolak implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Terkait diposisi ini sebagai salah satu penentu keberhasilan kebijakan publik khususnya implementasi dana bantuan operasional sekolah ini adalah pada saat sosialisasi menjadi penghambat dalam kelancaran program yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam hal hal yang menghambat kelancaran proses sosialisasi misalnya kurang dan tidak adanya dukungan pendanaan sosialisasi yang dianggarkan dalam program BOS sehingga pendanaan sosialisasi terpaksa dikeluarkan dari anggaran dan sumber lain. Kurangnya dukungan lembaga swasta seperti media periklanan surat khabar dan televisi juga menjadi faktor penghambat. Sebagai suatu contoh pernah saya menghubungi pihak televisi daerah (TVRI Kalteng) untuk berkoordinasi dalam proses sosialisasi program BOS, akan tetapi pihak TVRI Kalimantan Tengah membebankan biaya promosi / iklan yang tidak terjangkau, padahal sebagai bagian dari lembaga penyiaran pemerintah seharusnya ada dukungan yang terkoordinasi terhadap suksesnya program BOS untuk diketahui masyarakat luas.

Adanya kerancuan dalam di posisi kebijakan publik bisa terhambat. Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang “zona ketidakacuhan” dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambat lainnya. Untuk itu perlu adanya kerjasama antar elemen agar tidak ad kerancuan dalam implementasi sebuah kebijakan. Terutama apabila itu adalah sama-sama lembaga milik pemerintah.

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Unsur komunikasi merupakan salah satu penentu suksesnya suatu kebijakan, kurangnya komunikasi akan menghambat suatu kebijakan. Seperti pergantian kepala sekolah tentu akan memerlukan komunikasi terkait kebijakan internal di Kabupaten Kotawaringin Barat. Apabila ada pergantian pimpinan sekolah dan strukturnya cenderung memerlukan sosialisasi ulang sebagai pemahaman prosedural panduan BOS, ini dapat juga merubah kebijakan internal pihak sekolah dalam manajemen dana BOS disekolahnya.

Sedemikian pentingnya komunikasi Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yakni: Pertama, transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidori di tengah jalan. Kedua, kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksanaan kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu atau mendua. Dan ketiga, konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau

dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Salah satu program pemerintah yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat miskin adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), melalui program BOS Pemerintah memberikan dana ke-sekolah-sekolah antara lain SD Negeri dan SD Swasta, SMP Negeri maupun SMP swasta yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam program BOS. Secara konseptual program BOS berbeda dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan SMP diberikan dalam bentuk bea siswa sedangkan bagi siswa miskin yang dikenal dengan sebutan Bantuan Khusus Murid (BKM). Jumlah siswa miskin yang mendapat BKM pada tahun ajaran 2011/2012 sekitar 24 persen siswa untuk Sekolah Dasar, tiap siswa memperoleh bea siswa yang diberikan langsung kepada siswa terpilih (diseleksi oleh sekolah) sebesar Rp.120.000,- yang disalurkan melalui Kantor Pos yang ditunjuk. Program BOS ini telah mengadopsi pendekatan yang berbeda dengan Bantuan Khusus Murid (BKM) karena dana BOS tidak diberikan langsung kepada siswa miskin tetapi diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Jumlah dana BOS yang diberikan ke-sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid yang ada dimasing-masing sekolah, sehingga dana BOS yang diterima tiap sekolah tidak sama atau bervariasi. Adapun ketentuan besaran dana BOS untuk tingkat SMP sebesar Rp. 710.000,00 /per-siswa/tahun dan SD Rp 580.000,00/per-siswa/tahun.

Adapun tujuan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin / tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Pelaksanaan program BOS oleh sekolah Dasar di Kecamatan Pangkalan Banteng pada dasarnya telah berjalan dengan baik, meskipun demikian dalam prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan, hal ini dapat kita lihattemuan praktek dilapangan yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan program BOS antara lain

- a. Dalam buku petunjuk pelaksanaan BOS, bahwa tujuan khusus BOS adalah untuk membantu bagi siswa/siswi keluarga miskin atau tidak mampu dimaksudkan agar mereka dapat menikmati layanan pendidikan dasar sembilan tahun dengan berkualitas. Akan tetapi kenyataan dilapangan, oleh sekolah BOS dimanfaatkan untuk subsidi umum untuk membiayai kegiatan operasional sekolah dan semua murid menerima manfaat. Akibatnya dari jumlah siswa/siswi yang berasal dari keluarga miskin maupun tidak mampu belum seluruhnya dapat memperoleh layanan pendidikan secara memadai.
- b. Pemanfaatan dana BOS oleh 20 sekolah Dasar .Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng ternyata sebagian besar bantuan BOS digunakan untuk membayar tenaga honorer guru/GTT/PTT/Harlep dan urutan kedua adalah untuk pembelian barang dan jasa sedangkan yang ketiga adalah kegiatan belajar mengajar. Sekolah belum sepenuhnya menggunakan dana BOS sesuai dengan juknis karena secara riil dilapangan masih dana BOS yang digunakan seperti Pemberian transportasi siswa

miskin belum dilaksanakan, Untuk transportasi lomba guru, Untuk bayar tenaga harlep yang sudah dibiayai PEMDA, Penerimaan Murid masih dikenakan berbagai pungutan dengan berbagai alasan seperti (stopmap Rp.2000,-), Rehab gedung, Pembelian peralatan yang tidak terkait dengan proses pendidikan komputer, Perbaikan Pagar depan sekolah yang seharusnya hal ini tidak boleh terjadi.

- c. Pada dasarnya sekolah dapat menggunakan dana BOS yang dilakukan dengan berbagai kegiatan yang telah disusun berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh sekolah bersama komite sekolah. RAPBS sebagai persyaratan untuk menerima BOS harus mendapat persetujuan Ketua Komite Sekolah, namun hasil kajian tentang pelaksanaan program BOS telah terungkap bahwa, betapa besar dominasi peran Kepala Sekolah dalam penyusunan RAPBS maupun dalam pengelolaan dana BOS hal ini terjadi hampir seluruh sekolah. Guru dan orang tua wali murid hampir tidak pernah diajak dalam proses penyusunan RAPBS, sedangkan Komite sekolah umumnya hanya ikut menandatangani RAPBS yang telah disusun sekolah. Hal yang demikian inilah menjadikan fungsi kontrol belum dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil kajian dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS dari 20 SD Negeri di Kecamatan Pangkalan Banteng hampir sebagian besar dana BOS dimanfaatkan untuk kegiatan, membayar tenaga honorer, GTT, PTT dan Tenaga Harlep, Belanja barang dan jasa, Kegiatan Belajar mengajar, Kegiatan Kesiswaan, Kegiatan Pemeliharaan.
- d. Secara konsep atau menurut buku pedoman pelaksanaan program BOS bahwa pencairan dana BOS dilakukan dua tahap dan pencairan dana BOS diterima pada

bulan pertama tiap tahapan. Akan tetapi dalam prakteknya pencairan dana BOS sering mengalami keterlambatan atau tidak tepat waktu. Seperti untuk dana BOS tahun 2012 tahap pertama bulan Januari-Juni 2012 baru dapat cair pada triwulan pertama bahkan akhir semester. Sehingga hal ini menjadikan masalah bagi sekolah sebagai pelaksana kegiatan belajar mengajar, padahal kegiatan belajar dituntut harus berjalan akan tetapi disisi lain dana untuk operasional belum tersedia. Persoalan ini yang sering menjadikan pihak sekolah menjadi pusing karena harus mencarikan dana dengan berbagai upaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan lancar.

#### **D. Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Program BOS**

Dalam aturan BOS penyelenggaraan program BOS tidak secara tegas ditentukan apakah BOS untuk subsidi umum atau subsidi khusus yang diarahkan untuk siswa miskin. Hasil kajian memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaannya BOS cenderung diperlakukan sebagai subsidi umum untuk membiayai kegiatan operasional sekolah dan semua murid menerima manfaat program BOS. Secara konseptual, sekolah memegang kunci dalam penentuan penggunaan BOS termasuk dalam kebijakan pemberian bantuan khusus untuk siswa miskin. Berdasarkan ketentuan (panduan BOS) dana BOS di kelola oleh Kepala Sekolah, Guru/tenaga administrasi. Uang dikirim langsung ke nomor rekening sekolah oleh BPD sebagai lembaga penyalur yang ditentukan Tim Manajemen Provinsi. Sekolah boleh menggunakan BOS tersebut dengan berbagai jenis kegiatan berdasarkan RAPBS yang disusun oleh sekolah dan komite sekolah, RAPBS sebagai persyaratan untuk

menerima BOS harus mendapat persetujuan Ketua Komite Sekolah. Namun, hasil kajian yang dilaksanakan oleh peneliti memperlihatkan betapa besar dominasi Kepala Sekolah dalam penyusunan RAPBS maupun dalam pengelolaan dana BOS hal ini terjadi hampir seluruh sekolah. Guru dan orang tua wali murid hampir tidak pernah diajak dalam proses penyusunan RAPBS, sedangkan Komite sekolah umumnya hanya ikut menandatangani RAPBS yang telah disusun sekolah. Hal yang demikian inilah menjadikan fungsi kontrol belum dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil kajian dari Laporan Pertanggung jawaban Keuangan BOS dari 20 SD Negeri hampir sebagian besar dana BOS dimanfaatkan untuk kegiatan, membayar tenaga honorer, GTT, PTT dan Tenaga Harlep, Belanja barang dan jasa, Kegiatan Belajar mengajar, Kegiatan Kesiswaan, Kegiatan Pemeliharaan. Dari komponen tersebut pos yang paling besar adalah (30 persen) untuk pembayaran tenaga honorer/GTT/PTT, Tenaga Harlep, (25 persen) untuk belanja barang jasa dan (20 persen). untuk kegiatan belajar mengajar, (15 persen), kegiatan kesiswaan dan (10 persen) dan pemeliharaan gedung. Untuk mengetahui perincian pemanfaatan dana BOS oleh Sekolah disajikan tabel sebagai berikut :



Tabel 3  
TINGKAT PROSENTASE PENGGUNAAN  
DANA BOS SD NEGERI KECAMATAN PANGKALAN BATENG  
TAHUN 2012

No	Uraian Kegiatan	Jumlah	KETERANGAN
1	Belanja Pegawai	Rp 156,217,200.00	Pembayaran tenaga Honorer, GTT, PTT dan Tenaga Harlep
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 650,905,000.00	ATK, bayar telepon, listrik, penggunaan dll.
3	Kegiatan Belajar Mengajar	Rp 78,108,600.00	Tes semester, Membuat soal ujian, Ujian akhir semester, remedial dll
4	Kegiatan kesiswaan	Rp 78,108,600.00	Kegiatan Osis, Kegiatan kesiswaan, Lomba, pramuka dll.
5	Kegiatan pemeliharaan Gedung	Rp 52,072,400.00	Rehab gedung, Perbaikan kamar mandi/wc, lapangan Olah Raga dll.
	<b>Jumlah</b>	Rp 2,603,620,000.00	

Sumber : diolah dari Laporan Pertanggungjawaban BOS, 2010

Berdasarkan tabel tersebut di atas, memperlihatkan bahwa pemanfaatan dana BOS oleh 20 SD.Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng ternyata sebagian besar Dan honorer guru/GTT/PTT/Harlep dan urutan kedua adalah untuk pembelian barang dan jasa sedangkan yang ketiga adalah kegiatan belajar mengajar. Sekolah belum sepenuhnya menggunakan dana BOS sesuai dengan juknis karena secara riil dilapangan masih dana BOS yang digunakan seperti Pemberian transportasi siswa miskin belum dilaksanakan, Untuk transportasi lomba guru, Untuk bayar tenaga

harlep yang sudah dibiayai PEMDA, Penerimaan Murid masih dikenakan berbagai pungutan dengan berbagai alasan seperti (stopmap Rp.5000,-), Rehab gedung, Pembelian peralatan yang tidak terkait dengan proses pendidikan komputer, Perbaikan Pagar depan sekolah yang seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Adapun dampak pelaksanaan BOS ternyata bagi sekolah sangat positif, untuk mengetahui dampak program BOS peneliti melakukan pengumpulan data kuantitatif hasilnya secara umum bahwa BOS dapat memperkuat kemampuan sekolah dalam memberikan materi pembelajaran dan kegiatan tambahan kepada siswa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Dari 20 SD Negeri yang menjadi sampel menyatakan bahwa, dana BOS meningkatkan jumlah penerimaan dana sekolah, bagi yang muridnya banyak jumlah penerimaan sangat signifikan, meskipun penambahan penerimaan tiap sekolah berbeda. Dalam banyak hal BOS mengurangi keterbatasan anggaran sekolah dan dengan demikian dapat meningkatkan kapasitas sekolah untuk memenuhi biaya operasional sekolah. Oleh karena itu beberapa komponen yang semula dibebankan orang tua siswa melalui SPP menjadi berkurang, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dampak program ternyata dapat mengurangi beban biaya bagi orang tua/wali murid. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh sekolah dengan adanya program BOS antara lain; adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan hal ini akan dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar siswa, dampak yang dirasakan oleh siswa adalah adanya beban biaya sekolah menjadi lebih berkurang, seperti di Semarang secara umum untuk biaya SPP tiap anak sebelum ada program BOS rata-rata berkisar Rp. 30.000,- setelah adanya BOS berkurang menjadi Rp. 10.000,- sehingga mengurangi beban biaya tiap siswa Rp. 20.000,- atau berkisar

65 persen-70 persen. Sedangkan dampak lain adalah dengan adanya program BOS, alokasi sekolah untuk bantuan khusus bagi siswa miskin atau tidak mampu cukup besar yakni berkisar rata-rata 15 persen-20 persen dari jumlah siswa keseluruhan. Berdasarkan hasil evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BOS dari sekolah yang menjadi sampel dan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Natai Kerbau yang menyatakan bahwa mulai tahun ajaran 2006/2011 Sekolah mengalokasikan bantuan khusus bagi siswa tidak/kurang mampu berkisar 20 persen dari jumlah siswa sebanyak 171 anak yaitu sebanyak 34 anak tidak/kurang mampu yang diberikan dalam bentuk bea siswa bebas dari segala biaya sekolah (gratis, kecuali biaya tour/wisata siswa.). Dari jumlah tersebut tiap tahun akan mengalami kenaikan hal ini dapat terealisasi karena adanya program BOS disisi lain sekolah menerapkan manajemen Subsidi silang bagi orang tua murid yang mampu untuk membantu mengangkat bagi siswa kurang mampu/miskin. Dengan demikian diharapkan program BOS akan benar-benar dapat memberikan akses yang luas bagi keluarga kurang tidak mampu sehingga dapat menyelesaikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun secara berkualitas.

Hasil kajian dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan BOS ternyata dana BOS telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap pendidikan di daerah, berdasarkan hasil kajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BOS dari 10 sekolah sampel, ternyata dana BOS menopang RAPBS rata-rata 25 persen-30 persen dari jumlah rencana anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan oleh sekolah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Program BOS yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka penanganan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar hal ini sesuai dengan arah pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 2004 - 2011 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat miskin atau kurang mampu yang selama ini dirasakan kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar. Program BOS dilakukan bersamaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok yang berdampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat kurang

Kesimpulan penelitian adalah: (1) tingkat keefektivan penggunaan dana BOS sudah berjalan baik, (2) tingkat pembelajaran sudah berjalan baik, (3) penerapan dana BOS dalam pembelajaran belum dapat berjalan dengan baik, masih banyak kendala yang mungkin dihadapi oleh sekolah misalnya mengenai kegiatan siswa di luar pembelajaran

Bertolak dari hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa, ada kesesuaian implementasi kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan pedoman BOS 2012 pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal demikian dapat dibuktikan dari hasil temuan mengenai mekanisme penargetan, pendataan,

penyaluran, pengambilan dan penggunaan dana BOS yang sudah berjalan sejak tahun 2005 sampai tahun 2012, proses implementasi selama tujuh tahun tersebut sudah menunjukkan indikasi bahwa program BOS dapat terimplementasi pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Walaupun adanya berbagai kendala terutama pada tahap pertama Program BOS tahun 2005 diluncurkan, namun pada tahun-tahun selanjutnya implementasi Program BOS dapat berjalan dengan lebih lancar dari sebelumnya. Berdasarkan indikator yang dipergunakan untuk mengukur implementasi tersebut, dirincikan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penargetan, pendataan dan alokasi dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat sejak tahun 2005-2012 sudah sesuai dengan pedoman standar implementasi (panduan BOS). Walaupun ada kecenderungan pihak pengelola dana BOS yang menargetkan program BOS bagi semua siswa tanpa ada penilaian karakteristik miskin merupakan kesepakatan bersama dengan pertimbangan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Pendataan siswa secara keseluruhan untuk diajukan sebagai penerima program BOS juga disebabkan adanya tingkat kesulitan dalam menentukan karakteristik siswa miskin karena kondisi demografi penduduk daerah ini sebagian besar tergolong ke dalam kelompok yang tidak mampu dalam bidang ekonomi.
2. Mekanisme penyaluran, pengambilan dan penggunaan dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat sejak tahun 2005-2012 sudah sesuai dengan pedoman standar implementasi

(panduan BOS). Penyaluran atau distribusi dana BOS ini dilaksanakan oleh Satker Propinsi melalui lembaga penyalur yang ditunjuk dan disalurkan langsung ke rekening sekolah berjalan lancar dan dana diterima secara utuh oleh pihak sekolah.

3. Sosialisasi Program BOS pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat pada saat pertama kali dilakukan tahun 2005 mengalami hambatan-hambatan atau dapat dikatakan berjalan kurang optimal. Namun dalam perjalanannya sampai tahun 2012 ini sudah berjalan secara lebih optimal walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjangnya. Kondisi demikian didukung oleh peran semua pihak baik dari Tim Manajemen BOS Kabupaten, penyalur dana, dan pihak sekolah serta peran serta Komite Sekolah sudah menunjukkan suatu kerjasama yang baik sesuai prosedur yang telah digariskan dalam Panduan BOS.
4. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan BOS pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat di antaranya (1) pengalaman manajemen sekolah yang cukup memadai karena pihak sekolah sudah pernah menjalankan program-program bantuan sekolah lainnya, (2) respon positif dari masyarakat Pangkalan Banteng terhadap kebijakan BOS dengan tidak adanya penolakan khususnya oleh pihak sekolah dan anggota masyarakatnya, dan (3) birokrasi kebijakan pemerintah dalam penyaluran dan pengelolaan dana langsung ditangani oleh pihak sekolah sehingga birokrasi dan koordinasi pelaksanaannya tidak terlalu rumit. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan BOS pada Sekolah Dasar Negeri

Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat tidak sampai menjadi faktor penghambat yang justru dapat menggagalkan implementasi program BOS itu sendiri. Pada umumnya faktor-faktor penghambat tersebut hanya dijumpai pada saat pertama program BOS diluncurkan tahun 2005, namun seiring perjalanan waktu faktor-faktor penghambat tersebut dapat teratasi. Adapun faktor-faktor yang cenderung menjadi penghambat tersebut seperti : (1) kurang tersedianya waktu yang cukup pada awal pertama kali diluncurkannya program BOS pada tahun 2005, (2) kurangnya partisipasi Komite Sekolah dalam implementasi kebijakan BOS, dan (3) kurangnya partisipasi instansi pendukung seperti LSM dan Media Daerah yang cenderung bersifat profit oriented, sedangkan kebijakan BOS tidak atau kurang menyediakan pendanaan yang cukup untuk sosialisasi. (4) ketidakpedulian masyarakat terhadap program BOS, sehingga tidak jarang dijumpai orang tua siswa yang tidak tahu sama sekalimengenai program BOS (5) adanya keterlambatan penyaluran dana, cenderung membuat banyak sekolah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dan menunda pembayaran guru honor atau terpaksa berhutang ke berbagai pihak. Sedangkan faktor-faktor penghambat yang masih dijumpai berdasarkan hasil temuan saat penelitian yaitu kurang mendukungnya kondisi geografis seperti letak sekolah yang sulit ditempuh dan jauh dari pusat kota kabupaten dan transportasi jalan yang kurang memadai.

## B. Saran

Mengacu kepada simpulan yang telah diungkapkan tersebut di atas, secara umum implementasi Program Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah sesuai dengan pedoman standar implementasi (panduan BOS) masih memerlukan berbagai penyempurnaan baik secara konseptual maupun teknis, agar manfaat program dapat lebih optimal. Secara spesifik berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Kesesuaian mekanisme penargetan, pendataan dan alokasi dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat perlu lebih ditingkatkan lagi dengan menggali potensi sumber daya yang ada. Penargetan siswa penerima program BOS yang cenderung diberikan sebagai subsidi umum perlu tetap dipertahankan, sehingga semua murid baik siswa miskin maupun siswa yang tidak miskin hampir sama menerima manfaatnya. Mekanisme penargetan seperti ini dinilai sesuai dengan kondisi daerah dan pada saat pendataan mereka tidak memiliki acuan tetap mengenai standarisasi siswa miskin disertai alasan untuk menghindari kecemburuan siswa di daerah tersebut yang sebagian besar memang berasal dari keluarga yang kurang mampu perekonomiannya. Khususnya dalam hal pemutakhiran data, pihak manajemen BOS memerlukan adanya Bimbingan Teknis ataupun pelatihan secara mendalam dan berkelanjutan terhadap penguasaan aspek teknis dan teknologi sehingga didapatkan data yang lebih akurat dan sasaran BOS lebih tepat pada sasarannya.



2. Kesesuaian mekanisme penyaluran, pengambilan dan penggunaan dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat perlu terus ditingkatkan lagi, terutama mengenai mekanisme penunjukan lembaga penyalur yang sudah dilakukan secara terbuka dan tidak dilakukan secara sepihak tetap harus dipertahankan. Disamping itu perlu juga dipertimbangkan pembentukan lembaga keuangan seperti bank desa yang ditunjuk untuk menyalurkan dana BOS sehingga tidak menambah beban biaya dan waktu bagi sekolah dalam mencairkan dana. Kondisi demikian diharapkan akan sangat memberikan kemudahan layanan dan aksesibilitas bagi pihak sekolah. Selanjutnya dalam hal penggunaan dana hendaknya pihak sekolah benar-benar secara meningkatkan transparansi dengan melaporkan secara rinci penggunaan dana BOS yang dapat dipertanggung jawabkan baik kepada Tim Monitor maupun secara moralitas kepada orang tua siswa. Apabila memungkinkan perlu juga adanya suatu wacana untuk mendirikan lembaga-lembaga penyalur dana BOS di tiap-tiap wilayah terdekat sekolah seperti Bank Desa yang ditunjuk secara khusus sebagai lembaga penyalur sehingga pihak sekolah mendapat kemudahan-kemudahan dalam pencairan dana BOS tersebut.
3. Sosialisasi Program BOS di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat sejak tahun 2005-2012 dengan ketidaktersediaan dana sosialisasi serta kurang mendapatkan dukungan secara langsung dari pemerintah daerah, pada tahap-tahap lanjutan perlu mendapat dukungan secara nyata dalam mensukseskan implementasi program BOS. Bentuk dukungan nyata yang dapat dilakukan berupa bantuan sarana dan prasarana maupun pendanaan yang mungkin

dianggarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat juga dapat mensinergikan ataupun mengkoordinasikan semua lembaga pemerintahan maupun swasta seperti pihak Kepolisian (fungsi pengamanan), RRI - TVRI Daerah Kalteng (fungsi penyiaran), Lembaga Perbankan (fungsi distribusi dana), dan sebagainya melalui kegiatan yang bersifat rutin seperti workshop dan seminar untuk mendukung agar program BOS benar-benar tersosialisasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Disamping itu perlu adanya dukungan dan kerjasama dari LSM, dunia swasta/wirausaha dan pihak-pihak yang peduli pendidikan di daerah setuju untuk membuat pencitraan yang baik terhadap program BOS yang sedang berjalan, demi suksesnya pembangunan bidang pendidikan. Karena dengan adanya keberhasilan implementasi program BOS di Kabupaten Kotawaringin Barat memungkinkan akan memberikan kontribusi positif dalam setiap aspek pembangunan lainnya di daerah tersebut.

4. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan BOS di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat perlu terus ditingkatkan sehingga dalam pelaksanaan lanjutan program BOS dapat lebih mendukung proses implementasinya. Sebaliknya dengan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan BOS perlu menjadi bahan pertimbangan untuk dicarikan solusinya sehingga tidak menjadi masalah yang berlarut-larut dalam proses penyempurnaan implementasi program BOS tahapan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku Teks

Creswell, John W., 2009. *Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches)*. Third Edition. California, USA:SAGE

Darise, Nurlan.2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*.cetakan Pertama. Jakarta:PT.Indeks.

Dunn, W.N. (2001). *Analisis kebijakan publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Halim, Abdul (Peny).2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Kartasasmita, Ginanjar.1996. *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Bandung. ITB.

Lincoln, Yvonna S. dan Guba, Egon G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. First Edition. California, USA:SAGE

Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi III. Yogyakarta:Rake Sarasin.

Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2008. *Akuntansi Pemerintah*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Prawoto, Agus. 2011. *Pengantar Keuangan Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.

Soedijarto.2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Bandung:FOKUSMEDIA.

Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Edisi/Cetakan Pertama, Media Pressindo, Jogjakarta.

-----,2001, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua,, Bumi Aksara, Jakarta.

-----,2003, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, Sistim Pendidikan Nasional*, Jakarta.

-----,2004, Buletin PAUD, *Jurnal Ilmiah Anak Usia Dini*, Edisi Khusus.

-----,2005, *Menu Pembelajaran Generik Program Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta.

-----,2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang – Modelmodel*

### **Jurnal dan Makalah**

Tat-Kei Ho, Alferd.2011. PBB in American Local Government:It's More Than a managemen Tool. Washington, DC, USA: Public Adminitration Review.

Booth, Plilip, 2009. Planing and the Cultural of Governance:Local Intitutions and Reform. In France. *Europen Planning Studies* Vol 17, No. 5 May, 2009. UK:Roudlge, Taylor&Francis Group.

Boyne, George A., Oliver James, Peter dan Nicolai Petrovsky. 2010. Does Public Service Performance Affect Top Management Turnover? UK:Journal of Public Adminitration Research an Theory.

### **Internet**

(<http://abinafisa.wordpress.com>).

Nedy-nedy.blogspot.com 25 Januari 2013

[http://.kemendiknas.go.id/list\\_berita/2011/bos-2.aspx](http://.kemendiknas.go.id/list_berita/2011/bos-2.aspx)

TEMPO Interaktif Rabu, 30 Januari 2013

**Undang-undang dan Dokumen:**

Tanpa Pengarang, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Bandung:Penerbit Fokusmedia.

....., Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Bandung: Penerbit Citra Umbara

....., PerTURAN Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana

Perimbangan. Arkola

....., Undang-Undang Republik Indonesi Tahun 2010 tentang

Anggaran Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2011 tentang petunjuk

Teknis Penggunaan dana Operasional Sekolah (BOS) tahun Anggaran 2012

Surat Edaran Bersama Menteri dalam Negeri RI dan Menteri Pendidikan Nasional RI.

Nomor:900/5106/SJ dan Nomor : 02/XII/SEB/2010 tertanggal 28 Desember

tahun 2010 perihal Pedoman Pengelolaan Dan BOS dalam APBD.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.pdf  
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195 Fax : 21504  
PANGKALAN BUN 74111

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 300 / 09 / Kesbang.III / 2013

Dasar : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Palangka Raya, Universitas Terbuka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 515/UN31.45/LL/2013 Tanggal, 08 April 2013.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian / Pendataan bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Dengan ini diberikan kepada :

Nama : **AGUS WINARNO**  
N I M : 018264368  
Kegiatan Penelitian : Penelitian untuk Tugas Akhir Program Magister, Program Pascasarjana  
Yang akan dilaksanakan : Universitas Terbuka, Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Palangkaraya  
Jenjang : S - 2

Akan menyusun Tesis yang berjudul :

" IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN LAPORAN KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2012 DI KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT "

Lama kegiatan : 3 ( Tiga ) Bulan, Dari Tanggal 18 April 2013 s/d 18 Juli 2013.

dengan ketentuan sebagai berikut

1. Sebelum melakukan Penelitian / Observasi yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat dengan menunjukkan surat ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak berkaitan dengan judul penelitian.
3. Agar mentaati ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan menghormati adat istiadat setempat.
4. Surat izin ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah, sewaktu - waktu dapat dibatalkan bila disalahgunakan.
5. Selesai melakukan penelitian harus menyampaikan laporan hasilnya kepada :  
**Bupati Kotawaringin Barat.**  
**Cq. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kab. Kotawaringin Barat.**
6. Surat izin berlaku sejak dikeluarkan.

Demikian surat izin ini diberikan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 18 April 2013



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
KEPALA BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,  
BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS  
**H. MUDELAN, S. Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19600215 198203 1 013

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Gubernur Kalimantan Tengah,  
Up. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Prov. Kalteng di P.Raya ;
2. Bupati Kotawaringin Barat di P. Bun ;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kobar di P. Bun ;
4. Kepala Disdikpora Kab. Kobar ;
5. Camat Pangkalan Banteng ;
6. Kepala Perpustakaan Universitas Terbuka

**BIODATA PENULIS**

Nama : AGUS WINARNO  
NIM : 018264368  
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 24 Mei 1984  
Registrasi Pertama : 2011.2  
Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri Siraman IV, tamat tahun 1997  
2. SLTP Negeri 1 Kesamben, tamat tahun 2000  
3. SMU Negeri 1 Kesamben, tamat tahun 2003  
4. S- I FKIP Universitas Terbuka, tamat tahun 2010  
5. Terdaftar di Pascasarjana Universitas Terbuka,  
tahun 2011.2  
Riwayat Pekerjaan : 1. Guru SD PT. GSDI, tahun 2005-2010  
2. Guru SMP Negeri 5 Pangkalan Banteng, tahun 2011-  
sekarang  
Alamat Tetap : Jalan Panglima Utar RT 7 Desa Sungai Kapitan, Kec.  
Kumai, Kab.Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah  
Telp/HP : 085651306177, 081258235111

Pangkalan Bun, Agustus 2013

**Agus Winarno**

NIM. 018264368

## Lampiran – I

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Informan
  - a. Nama : .....
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
  - c. Jabatan : .....
  - d. Alamat : .....
2. Pertanyaan Penanggung Jawab / Ketua Tim BOS :
  - a. Bagaimana mekanisme penargetan, pendataan, dan alokasi dana BOS ?
  - b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?
  - c. Bagaimana mekanisme penyaluran, pengambilan dan penggunaan Dana BOS?
  - d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS ?
3. Pertanyaan untuk Kepala Sekolah meliputi :
  - a. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?
  - b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?
  - c. Bagaimana proses penggunaan Dana BOS ?
  - d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS
4. Pertanyaan untuk Dewan Guru meliputi :
  - a. Apakah dalam program penggunaan dana BOS di sekolah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
  - b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?
  - c. Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana sekolah setelah ada dana BOS ?
  - d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS
5. Pertanyaan untuk Ketua Komite Sekolah meliputi :
  - a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)
  - b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?
  - c. Apakah program BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ?
  - d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS



## Lampiran – II

## KUTIPAN HASIL WAWANCARA

## A. Wawancara dengan Penanggung Jawab Program BOS 2012 Kabupaten Kotawaringin Barat

## 1. Identitas Informan 1

N a m a : SM  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Jabatan : Penanggung Jawab Program BOS  
 Alamat : Kab.Kotawaringin Barat

## 2. Pertanyaan

a. Bagaimana mekanisme penargetan, pendataan, dan alokasi dana BOS ?

Jawab :

- Mekanisme penargetan terhadap sekolah-sekolah penerima dana BOS dimulai dengan memberikan informasi kepada semua pihak sekolah tingkat SD dan SMP / setara tentang adanya program BOS, selanjutnya kepada pihak sekolah dijelaskan bahwa semua sekolah tersebut berhak mengajukan diri sebagai penerima dana BOS dengan adanya kelengkapan data siswa yang akan menerima dana BOS.
- Pendataan awal dilakukan terhadap sekolah dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten terhadap jumlah sekolah yang ada diwilayah kerjanya. Sedangkan pendataan siswa dilakukan oleh pihak sekolah yang selanjutnya menyerahkan data tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten untuk diverifikasi dan dilaporkan kesesuaian tingkat kebutuhannya kepada Tim Manajemen BOS Provinsi. Setelah semua data diserahkan kepada pihak Manajemen BOS Provinsi, maka Tim Manajemen BOS provinsi yang berhak menentukan jumlah alokasi dana BOS untuk tiap kabupaten dan Kota. Selanjutnya dalam proses ini terus diadakan koordinasi oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten dengan pihak Manajemen BOS Provinsi, pihak sekolah calon penerima dana BOS dan lembaga penyalur dana BOS (Bank Kalteng Cabang Pangkalan Bun).
- Sesuai dengan proses yang ada dalam Panduan BOS, maka dalam proses alokasi dana kepada pihak sekolah penerima BOS ini disesuaikan dengan data yang diajukan oleh pihak sekolah kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten untuk diserahkan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi yang selanjutnya diserahkan kepada pihak TIM Manajemen BOS Pusat.
- Untuk proses penentuan pihak sekolah yang berhak menerima dana BOS didasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dewan Pendidikan, dilampiri dengan Surat Perjanjian

- Pemberian Bantuan (SPBB) yang ditandatangani oleh pihak sekolah yang diwakili oleh Kepala Sekolah, selanjutnya diserahkan kepada pihak Manajemen BOS Provinsi dengan tembusan kepada pihak penyalur (Bank Kalteng Cabang Pangkalan Bun) dan pihak sekolah calon penerima dana BOS.
  - Dalam menetapkan alokasi dana BOS untuk tiap sekolah didasarkan atas pertimbangan 2 semester setiap tahunnya yang masing-masing berbeda. Dimana setiap tahun dihitung satu anggaran dengan dua pengajuan data alokasi dana disesuaikan dengan tiap semester tahunajaran baru.
- b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?

Jawab :

- Proses sosialisasi program BOS dilakukan melalui undangan kedinasan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat kepada pihak sekolah yang diwakili oleh kepala sekolah, bendahara sekolah, ketua komite sekolah, dalam hal ini dibagi menjadi 6 wilayah kecamatan, meliputi (Kecamatan Kumai, Arut Selatan, Arut Utara, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada, dan Kotawaringin lama). Dimana pertemuan tersebut dihadiri oleh nara sumber dari Manajemen BOS Provinsi, Lembaga Penyalur (Bank Kalteng Pangkalan Bun), Lembaga Perpajakan, Kepolisian, dan beberapa unsur Lembaga Swadaya Masyarakat setempat.
  - Bentuk kegiatan sosialisasi adalah dengan penjelasan oleh pihak nara sumber serta tanya jawab, dan juga membagikan buku Panduan BOS untuk dapat dipelajari oleh pihak-pihak yang hadir pada saat pertemuan dan pertemuan tersebut diadakan sebanyak 1 kali setiap tahun anggaran dana BOS yang sedang berjalan.
- c. Bagaimana mekanisme penyaluran, pengambilan dan penggunaan Dana BOS ?

Jawab :

- Mekanisme penyaluran dana BOS dilakukan secara bertahap oleh TIM Manajemen BOS Provinsi melalui Bank Kalteng Pangkalan Bun. Tahapan tersebut dilalui tiap per 3 bulan.
  - Secara umum dan rinci mengenai mekanisme penyaluran dan pengambilan dana BOS dilakukan sesuai mekanisme pada panduan BOS yang ada.
  - Mengenai penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah hal tersebut sangat bervariasi dan disesuaikan oleh masing-masing tingkat kebutuhan sekolah yang juga tergantung pada saat pengajuan serta didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.
- d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS?

#### Faktor penghambat :

- Terkadang adanya Kepala Sekolah dan Tim manajemen BOS Sekolah yang kurang cepat mengerti dalam mengartikan secara cermat maksud dan tujuan program BOS, dalam hal ini diperlukan penjelasan yang lebih detail melalui jawaban yang diajukan oleh mereka mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan program tersebut.
- Kesiapan dan ketepatan data yang dikumpulkan oleh pihak sekolah terkadang kurang lengkap secara administratif padahal sudah diberikan petunjuk yang jelas dari buku panduan BOS. Untuk itu pihak manajemen BOS tiap sekolah perlu mempelajari secara baik panduan yang sudah diberikan.
- Dalam hal hal yang menghambat kelancara proses sosialisasi misalnya kurang dan tidak adanya dukungan pendanaan sosialisasi yang dianggarkan dalam program BOS sehingga pendanaan sosialisasi terpaksa dikeluarkan dari anggaran dan sumber lain. Kurangnya dukungan lembaga swasta seperti media periklanan surat kabar dan televisi juga menjadi factor penghambat. Sebagai suatu contoh pernah saya menghubungi pihak televisi daerah (TVRI Kalteng) untuk berkoordinasi dalam proses sosialisasi program BOS, akan tetapi pihak TVRI Kalimantan Tengah membebankan biaya promosi / iklan yang tidak terjangkau, padahal sebagai bagian dari lembaga penyiaran pemerintah seharusnya ada dukungan yang terkoordinasi terhadap suksesnya program BOS untuk diketahui masyarakat luas.
- Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Manajemen BOS Kabupaten (saya) terbatas pada lintas struktural pada pihak sekolah penerima dana BOS dan bukan kepada pihak orang tua siswa, karena kepada orang tua siswa sebagai penerima langsung manfaat program BOS merupakan tanggung jawab pihak sekolah.
- Kondisi wilayah sekolah yang terpencar dan sulitnya transportasi menuju lokasi memerlukan waktu yang cukup lama dalam perjalanan, sehingga terkadang inspeksi dan kunjungan ke lokasi sekolah jadi terhambat.
- Dalam tahapan penyaluran dana BOS masih ada keterlambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor teknis manajemen BOS Provinsi dan Pusat. Demikian juga pelaporan penerimaan dana BOS oleh pihak sekolah juga masih ada yang terlambat sehingga secara administratif agak terlambat dalam prosesnya.
- Apabila ada pergantian pimpinan sekolah dan strukturnya cenderung memerlukan sosialisasi ulang sebagai pemahaman prosedural panduan BOS, ini dapat juga merubah kebijakan internal pihak sekolah dalam manajemen dana BOS disekolahnya.

#### Faktor pendukung :

- Kepala Sekolah dan Tim manajemen BOS Sekolah diundang dalam setiap pertemuan rata-rata semua hadir dalam pertemuan, ini menunjukkan indikasi antusiasnya pihak sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan dan demi kesuksesan program BOS.

## C. Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Natai Kerbau

### 1. Identitas Informan 3

N a m a : Sgt  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Jabatan : Kepala Sekolah SD Negeri 1 Natai Kerbau  
 Alamat : SD Negeri 1 Natai Kerbau

### 2. Pertanyaan

#### a. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?

- Dimulai dengan menyusun RAPBS persemester.
- Menyusun rincian penggunaan dana perjenis anggaran untuk setiap tri wulan.
- Menyerahkan SPJ triwulan sebelumnya.
- Mengambil rekomendasi dari Tim Manajemen B OS Kabupaten.

#### b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?

- Menghadiri undangan pertemuan dan pelatihan dari Tim Manajemen BOS Kabupaten
- Mempelajari buku panduan program BOS.
- Mengundang orang tua siswa dan guru serta komite sekolah untuk menjelaskan program BOS serta menyampaikan laporan kegiatan yang didanai program BOS.
- Meminta masukan kepada pihak guru dan Ketua Komite Sekolah tentang program BOS yang dilaksanakan.

#### c. Bagaimana proses penggunaan Dana BOS ?

- Secara prosedural sudah dilaksanakan sesuai dengan panduan buku BOS
- Melaporkan rincian dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.
- Transparan lama laporan pertanggungjawaban dengan pihak sekolah (Komite Sekolah, Guru dan orang tua siswa).
- Digunakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan sekolah dan siswa.

#### d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS?

- Tidak ada hambatan yang berarti, akan tetapi masalah transportasi yang terkadang memerlukan waktu yang cukup lama sehingga setidaknya menita waktu.
- Adanya dukungan dari peran serta masyarakat, guru, pembuktian tersedianya sarana dan prasarana belajar yang baik, serta peran siswa.

- Dana BOS digunakan antara lain untuk membayar honor dan biaya transport guru honor, guru piket, wali kelas, pengembangan diri, tambahan pelajaran untuk kelas 6, barang habis pakai dan yang lainnya sesuai panduan BOS.

e. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS?

- Tidak ada faktor yang dinilai sangat menghambat program BOS, semua berjalan dengan baik sesuai panduan BOS.
- Faktor pendukung yang ada yakni adanya kerjasama yang baik antara pihak terkait dan juga orang tua siswa.
- Adanya rekomendasi, artinya dengan dikeluarkannya rekomendasi dana BOS semua siap digunakan oleh sekolah, sesuai dengan keperluan dalam RAPBS.
- Berjalan lancarnya pembuatan LPJ

Universitas Terbuka

## E. Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 1 Mulyajadi

### 1. Identitas Informan 5

N a m a : Bp  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Jabatan : Kepala Sekolah SDN 1 Mulyajadi  
 Alamat : Kec.Pangkalan Banteng

### 2. Pertanyaan

#### a. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?

- Mendata keperluan sekolah dan menyesuaikannya dengan panduan BOS
- Membuat RAPBS (RKAS) sekolah.
- Menyerahkan semua data dan menyertakan rekeni ng sekolah yang diminta Tim Manajemen BOS Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Apabila ada pemberitahuan pencairan d ana, dana langsung dicairkan.

#### b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?

- Menghadiri undangan pertemuan Tim Manajemen BOS.
- Mengikuti penjelasan tentang Program BOS dan menerima buku panduan pelaksanaan program BOS
- Melakukan pertemuan koordinasi dengan Ketua Komite Sekolah serta melibatkan beberapa guru dan orang tua siswa yang hadir dalam pertemuan.
- Mengumumkan penjelasan dana BOS yang diterima oleh sekolah.
- Menjelaskan tentang RAPBS (RKAS) serta diumumkan dipapan pengumuman.

#### c. Bagaimana proses penggunaan Dana BOS ?

- Digunakan secara bertahap sesuai pengajuan yang diusulkan dan tidak menyimpang dari ketentuan panduan BOS.

#### d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS?

- Terkadang adanya tanggapan yang negatif dari dengan orang tua siswa namun tidak terlalu berarti dan kurang baiknya sarana jalan yang dilalui menuju pusat kota.
- Faktor pendukung adanya kerjasama yang baik antara pihak terkait dan juga sebagian orang tua siswa.

## F. Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 2 Mulyajadi

### 1. Identitas Informan 6

N a m a : Msrd  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Jabatan : Kepala Sekolah SDN 2 Mulyajadi  
 Alamat : Kec.Pangkalan Banteng

### 2. Pertanyaan

#### a. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?

- Persiapan data siswa dan kebutuhan sekolah sekolah yang dituangkan dalam RAPBS (RKAS).
- Menyerahkan semua data yang diminta Tim Manajemen BOS Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Menunggu pemberitahuan pencairan da na.
- Pencairan dana di bank.

#### b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?

- Pertemuan dengan Tim Manemen BOS Kabupaten.
- Menerima buku panduan BOS dan mempelajarinya.
- Mengadakan koordinasi dengan Tim BOS Sekolah dan Ketua Komite Sekolah serta melibatkan beberapa guru dan orang tua siswa.
- Merancang tingkat kebutuhan sekolah dan kemungkinan penggunaan dana yang diinginkan.
- Memasang p engumuman di papan pengumumanseputar program BOS.

#### c. Bagaimana proses penggunaan Dana BOS ?

- Dana BOS digunakan sesuai dengan pengajuan yang diusulkan dan dapat dip ertanggungjawabkan serta tidak menyimpang dari ketentuan panduan BOS.

#### d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS ?

- Tidak ada faktor penghambat.
- Faktor pendukung adanya kerjasama yang baik semua pihak.

## G. Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 3 Karang Mulya

### 1. Identitas Informan 7

N a m a : Rsdn  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Jabatan : Kepala Sekolah SDN 3 Karang Mulya  
 Alamat : Desa Karang Mulya

### 2. Pertanyaan

#### a. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?

- Dimulai dengan menyusun RAPBS bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah
- Mempersiapkan rekening sekolah
- Menyerahkan semua data dan menyertakan nomor rekening bank.
- Menunggu pemberitahuan bahwa dana BOS siap dicairkan.
- Pencairan dana BOS di Bank.

#### b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?

- Adanya undangan pertemuan dan pelatihan dari Tim Manajemen BOS Kabupaten
- Mempelajari buku panduan program BOS.
- Menjelaskan dan meminta kepada pihak guru dan Ketua Komite Sekolah untuk mengetahui program BOS.

#### c. Bagaimana proses penggunaan Dana BOS ?

- Dana BOS digunakan sesuai dengan RAPBS dan digunakan dengan baik.
- Melaporkan rincian penggunaan dana.

#### d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS ?

- Penyetoran pajak yang sulit dilakukan karena di Pangkalan Bun belum ada lembaga yang menerima pajak, terpaksa harus ke kota Pangkalan Bun.
- Belum tersedianya NPWP sekolah.
- Faktor pendukung yang ada yakni tanggapan yang baik dari orang tua siswa.



## H. Wawancara dengan Dewan Guru SD Negeri 1 Natai Kerbau

### 1. Identitas Informan 8

N a m a : Mdn  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Jabatan : Dewan Guru SD Negeri 1 Natai Kerbau  
 Alamat : Desa Natai Kerbau

### 2. Pertanyaan

a. Bagaimana program penggunaan dana BOS di sekolah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

-Berdasarkan yang saya ketahui bahwa program BOS yang dilakukan di SDN 1 Natai Kerbau Kecamatan Pangkalan Banteng sudah sesuai dengan panduan BOS yang berlaku.

b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?

-Sosialisasi dilakukan dengan pengumumam di papan pengumuman tentang program BOS, daftar siswa penerima dana BOS serta rincian penggunaan dana BOS.

-Menghadiri kegiatan rapat dengan Komite Sekolah yang dihadiri juga oleh orang tua siswa.

- Menyampaikan pesan pesan singkat kepada siswa mengenai program BOS.

c. Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana sekolah setelah ada dana BOS ?

-Sarana dan prasarana yang ada setelah program BOS lebih baik dari sebelumnya.

d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS?

-Faktor yang menghambat adalah masih adanya kurang pedulian siswa terhadap program BOS ini terlihat sedikitnya jumlah wali siswa yang hadir pada saat rapat dengan Komite Sekolah yang membicarakan program BOS.

-Tidak adanya dana tambahan untuk kegiatan program BOS seperti pada waktu rapat atau pertemuan.

-Faktor pendukung adalah kesadaran dari pihak guru untuk mensukseska program BOS

-Adanya semangat kerja dari guru karena tersedianya sarana dan prasarana kerja yang lebih memadai.

## I. Wawancara dengan Dewan GuruSD Negeri 2 Natai Kerbau

### 1. Identitas Informan 9

N a m a : Ern  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Jabatan : Dewan GuruSD Negeri 2 Natai Kerbau  
 Alamat : Desa Berambai Makmur

### 2. Pertanyaan

a. Bagaimana program penggunaan dana BOS di sekolah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

-Sejak adanya program BOS terlihat adanya kemajuan-kemajuan baik dari sarana ataupun keringanan-keringanan pembiayaan siswa.

-Kesesuaian penggunaan dana BOS secara keseluruhan tidak saya ketahui, namun mungkin sudah sesuai dengan ketentuan program BOS.

b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS?

-Memberikan pengumuman di papan pengumuman tentang daftar siswa penerima dana BOS.

-Menghadiri kegiatan rapat dengan Komite Sekolah yang dihadiri juga oleh orang tua siswa.

-Menyampaikan pesan-pesan singkat kepada siswa mengenai program BOS.

c. Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana sekolah setelah ada dana BOS ?

-Sarana dan prasarana yang ada setelah program BOS lebih baik dari sebelumnya.

d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS

-Masih kurang pedulinya orang tua siswa terhadap program BOS.

-Saya tidak memahami secara menyeluruh peraturan program BOS.

-Yang pendukung adalah sarana kerja guru sudah lebih baik.

## J. Wawancara dengan Dewan Guru Kepala Sekolah SDN 1 Mulyajadi

### 1. Identitas Informan 10

Nama : Rsty  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan : Dewan Guru SDN 1 Mulyajadi  
Alamat : Desa Mulyajadi

### 2. Pertanyaan

a. Bagaimana program penggunaan dana BOS di sekolah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

- Yang saya ketahui bahwa program BOS dilakukan secara transparansi di sekolah ini, hal ini berarti ada keterbukaan masalah penggunaan dana BOS secara keseluruhan dan mungkin sudah sesuai dengan ketentuan program BOS yang ada.

b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?

- Saya turut menjelaskan kepada siswa mengenai program BOS di sekolah ini. - Saya membaca tentang pedoman BOS dari buku panduan BOS.  
- Ada pengumuman mengenai daftar siswa penerima dana BOS.  
- Saya ikut menghadiri kegiatan rapat dengan Komite Sekolah yang dihadiri juga oleh orang tua siswa.

c. Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana sekolah setelah ada dana BOS ?

- Sarana dan prasarana yang ada sudah lebih baik dari sebelumnya.

d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS

- Kesulitan mengetahui kriteria siswa miskin secara benar karena ada kecenderungan siswa yang orang tuanya dianggap mampu ikut memberikan keterangan sebagai keluarga miskin, untuk ikut menerima dana BOS.  
- Selaku bagian dari sekolah tidak ada pengaruh dalam pengambilan keputusan dalam rapat tentang BOS.

## L. Wawancara dengan Dewan Guru SDN 3 Karang Mulya

### 1. Identitas Informan 12

N a m a : Lnm  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan : Dewan Guru SDN 3 Karang Mulya  
Alamat : Desa Karang Mulya

### 2. Pertanyaan

a. Bagaimana program penggunaan dana BOS di sekolah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

- Penggunaan dana BOS disesuaikan dengan kondisi kebutuhan sekolah yang ada dan sudah cukup sesuai.

b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?

- Pernah diadakan pertemuan dan mendengarkan penjelasan tentang program BOS.  
- Bercerita dengan sesama rekan guru tentang program BOS.

c. Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana sekolah setelah ada dana BOS ?

- Sarana dan prasarana yang cukup dari sebelumnya.

d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS

- Tidak ada faktor penghambat.  
- Mengikuti keputusan rapat yang ada.

## M. Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SD Negeri 1 Natai Kerbau

### 1. Identitas Informan 13

N a m a : Mln  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Jabatan : Ketua Komite SD Negeri 1 Natai Kerbau  
 Alamat : Desa Natai Kerbau

### 2. Pertanyaan

a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)

- Komite Sekolah SD Negeri 1 Natai Kerbau selalu diundang dan terlibat langsung Dalam penyusunan RAPBS melalui Rapat Dinas Sekolah.

b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?

- Setiap pencairan dana BOS pihak Sekolah selalu memberitahu kepada Ketua Komite Sekolah.

c. Apakah program BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ?

- Berdasarkan sepengetahuan saya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.  
 - Baik dalam penyusunan RAPBS sampai ke rincian penggunaan dana BOS pihak Komite Sekolah selalu dilibatkan.

d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS.

- Komite Sekolah memiliki peran dalam menentukan keberhasilan penyusunan RAPBS dan Program Sekolah lainnya.  
 - Ketersediaan waktu yang terbatas.  
 - Keterbatasan sarana dalam mensosialisasikan ke orang tua murid.  
 - Kesulitan dalam memberikan pemahaman dan penjelasan kepada orang tua murid.  
 - Ketidakpedulian orang tua murid  
 - jarang bertanya  
 - jarang hadir.

## N. Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SD Negeri 2 Natai Kerbau

### 1. Identitas Informan 14

Nama : Bnd  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Ketua Komite SD Negeri 2 Natai Kerbau  
Alamat : Desa Berambai Makmur

### 2. Pertanyaan

a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)

- Menghadiri undangan rapat sekolah dan ikut memberikan saran.

b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?

- Komite sekolah juga memberitahukan kepada orang tua murid mengenai program BOS.

c. Apakah program BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ?

- Sudah cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS.

- Waktu yang terkadang tidak memungkinkan.

- Tidak adanya dana untuk mensosialisasikan ke orang tua murid.

- Pemahaman dan penjelasan kepada orang tua terkadang sulit mengerti.

- Dalam rapat yang mengundang orang tua murid jarang dihadiri oleh orang tua murid.

## O. Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah SDN 1 Mulyajadi

### 1. Identitas Informan 15

Nama : Rg  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Ketua Komite SDN 1 Mulyajadi  
Alamat : Desa Mulyajadi

### 2. Pertanyaan

a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)

- Komite Sekolah Kepala Sekolah SDN 1 Mulyajadi diundang dalam rapat penyusunan RAPBS dan dilibatkan dalam memberikan persetujuan hasil RAPBS.

b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?

- Dalam proses sosialisasi penyaluran Dana BOS Komite Sekolah selalu diberitahu pihak sekolah kapan waktu sosialisasi penyaluran dana BOS.

c. Apakah program BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ?

- Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur dalam Pedoman BOS.

d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS.

- Kehadiran orang tua siswa yang jarang hadir pada saat diundang rapat.  
- Tidak adanya dana sosialisasi lanjut kepada orang tua siswa.  
- Tingkat pengetahuan orang tua siswa yang relatif rendah sehingga menyebabkan ketidakpedulian mereka dengan Program BOS.

P. Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah SDN 2 Mulyajadi

1. Identitas Informan 16

N a m a : Brt  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Ketua Komite SDN 2 Mulyajadi  
Alamat : Desa Karang Sari

2. Pertanyaan

a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)

- Pihak sekolah selalu memberitahukan Komite Sekolah apabila menyusun RAPBS dan ikut menyetujui dan memberikan usulan terhadap hasil rapat.

b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?

- Dalam penyaluran dana BOS pihak Komite Sekolah diberitahu dan terkadang ada juga beberapa orang tua siswa yang menanyakan tentang program BOS ini.

c. Apakah program BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ?

- Berdasarkan sepengetahuan saya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS.

- Kekurangpedulian orang tua siswa dalam mengawasi pelaksanaan program BOS.



Q. Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SDN 3 Karang Mulya

1. Identitas Informan 17

Nama : RRI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Ketua Komite SDN 3 Karang Mulya  
Alamat : Desa Karang Mulya

2. Pertanyaan

a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)

- Komite Sekolah SDN 3 Karang Mulya berperan dan terlibat sebagai pihak yang ikut memberi persetujuan dalam penyusunan RAPBS.

b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?

- Kerjasama dengan pihak sekolah dalam mensosialisasikan penyaluran dana BOS dan memberikan masukan atau saran kepada pihak Sekolah bagaimana sebaiknya sosialisasi penyaluran dana BOS tersebut.

c. Apakah program BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ?

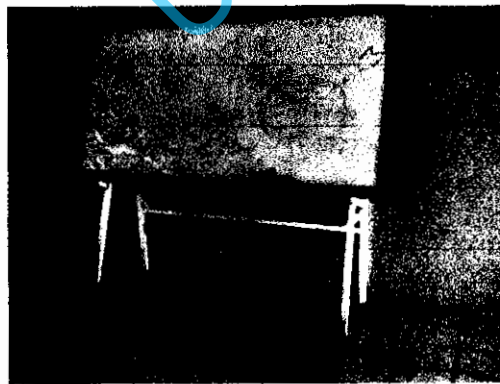
- Berdasarkan sepengetahuan saya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS.

- Keterbatasan waktu dalam mensosialisasikan ke orang tua murid.

- Kesulitan dalam memberikan pemahaman dan penjelasan kepada orang tua murid.

### Lampiran Foto



Universitas Terbuka



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA  
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 201 /PMK.07/2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

- (1) Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. ✓



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC OF INDONESIA

2 -

- (2) BOS dialokasikan kepada daerah provinsi untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
- (3) Sekolah penerima BOS adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP/SMPLB/SMPT), termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.
- (4) Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012 untuk SD dan SMP per siswa per tahun dihitung mulai tanggal 1 Januari 2012, adalah sebagai berikut:
  - a. Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per siswa per tahun untuk SD/SDLB di kabupaten/kota; dan
  - b. Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) per siswa per tahun untuk SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten/kota.

#### Pasal 2

- (1) BOS Tahun Anggaran 2012 merupakan komponen Anggaran Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
- (2) BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2012 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Perubahan Tahun Anggaran 2012 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- (3) BOS ditujukan terutama untuk stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik untuk BOS Daerah dan/atau Bantuan Operasional Pendidikan.

#### Pasal 3

- (1) Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp23.594.800.000.000,00 (dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah) disediakan untuk daerah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. BOS yang dialokasikan ke kabupaten/kota melalui provinsi sebesar Rp22.441.115.420.000,00 (dua puluh dua triliun empat ratus empat puluh satu miliar seratus lima belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 36.579.003 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga) siswa yang terdiri dari 27.153.667 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh) siswa SD dan 9.425.336 (sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam) siswa SMP; dan



MENTRI PENDIDIKAN  
KEMERDEKAAN BUDAYA

- 3 -

- b. Dana Cadangan BOS (*Buffer fund*) sebesar Rp1.153.684.580.000,00 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk mengantisipasi jumlah siswa yang belum terhitung atau bertambahnya jumlah siswa dari perkiraan semula per triwulannya pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Rincian alokasi BOS per provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (3) Rincian alokasi BOS untuk masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan data nama sekolah dan jumlah siswa yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan BOS Tahun Anggaran 2012.
  - (4) Dana Cadangan BOS (*Buffer fund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pencairannya dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi kurang salur BOS dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan ketersediaan dan perkembangan data jumlah siswa per triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 4

- (1) Mekanisme penyaluran BOS Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan secara langsung ke satuan pendidikan dasar dalam bentuk hibah.
- (2) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan secara triwulanan, yaitu:
  - a. Triwulan I dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2012;
  - b. Triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2012;
  - c. Triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2012; dan
  - d. Triwulan IV dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober 2012.
- (3) Penyaluran Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dilakukan sebesar  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) dari alokasi BOS.
- (4) Penyaluran Dana Cadangan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan secara triwulanan, yaitu:
  - a. Triwulan I dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan I berakhir;
  - b. Triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan II berakhir;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. Triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan III berakhir; dan
- d. Triwulan IV dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum triwulan IV berakhir.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi wajib menyalurkan BOS kepada masing-masing sekolah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya BOS di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi setiap triwulannya.
- (2) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada rincian alokasi BOS masing-masing sekolah per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 6

Gubernur wajib membuat dan menyampaikan:

- a. Laporan Realisasi Penyaluran BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- b. Laporan Realisasi Penyerapan BOS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.

Pasal 7

- (1) Laporan Realisasi Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Yang Diterbitkan Untuk Penyaluran.
- (2) Laporan Realisasi Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
  - a. pada akhir bulan Maret 2012 untuk penyaluran Triwulan I;
  - b. pada akhir bulan Juni 2012 untuk penyaluran Triwulan II;
  - c. pada akhir September 2012 untuk penyaluran Triwulan III; dan
  - d. pada akhir bulan Desember 2012 untuk penyaluran Triwulan IV.
- (3) Format dan Petunjuk Pengisian Laporan Realisasi Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

5

- (5) Format Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Yang Diterbitkan Untuk Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Laporan Realisasi Penyerapan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain memuat kondisi sebagai berikut:
- a. kurang salur, jika terdapat selisih kurang antara jumlah dana yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan jumlah realisasi pembayaran BOS kepada masing-masing sekolah pada triwulan bersangkutan; atau
  - b. lebih salur, jika terdapat selisih lebih antara jumlah dana yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan jumlah realisasi pembayaran BOS kepada masing-masing sekolah pada triwulan bersangkutan.
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat per triwulan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan BOS Tahun Anggaran 2012

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kurang/lebih salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Gubernur menyampaikan perhitungan kurang/lebih salur BOS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dalam Laporan Realisasi Penyerapan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Berdasarkan Laporan Realisasi Penyerapan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar menyampaikan rekomendasi kurang/lebih salur BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Rekomendasi kurang/lebih salur BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum triwulan berjalan berakhir.
- (4) Rekomendasi kurang salur BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyaluran Dana Cadangan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, untuk kemudian disalurkan ke provinsi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 10

Dalam hal terdapat lebih salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, maka:

- a. lebih salur tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran alokasi BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a triwulan berikutnya; atau
- b. untuk Triwulan IV lebih salur tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Triwulan I tahun anggaran berikutnya setelah memperhatikan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.


#### Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan pembayaran BOS dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Dalam hal terjadi penyalahgunaan/penyimpangan penggunaan BOS berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut akan dijadikan dasar dalam pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Alokasi BOS yang diatur dalam Peraturan Menteri ini termasuk alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS di daerah terpencil Tahun Anggaran 2012.
- (2) Alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS di daerah terpencil Tahun Anggaran 2012 berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyaluran BOS dilakukan secara semesteran;
  - b. alokasi BOS tersebut merupakan bagian dari alokasi BOS per provinsi; dan
  - c. rincian alokasi BOS dihitung berdasarkan data sekolah penerima BOS di daerah terpencil dan jumlah siswa yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman umum dan alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS di daerah terpencil Tahun Anggaran 2012 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- (4) Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, ketentuan mengenai pedoman umum dan alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS di daerah terpencil Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini. 





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	PROVINSI	BOS <sup>1)</sup>			DANA CADANGAN BOS <sup>2)</sup>			TOTAL		
		SD	SMP	JUMLAH	SD	SMP	JUMLAH	SD	SMP	JUMLAH
26	Sulawesi Tenggara	203.389.180.000	84.671.050.000	288.060.230.000	10.456.820.000	4.352.300.000	14.809.120.000	213.846.000.000	89.023.350.000	302.869.350.000
27	Bali	243.638.860.000	125.998.020.000	369.636.880.000	12.525.100.000	6.477.350.000	19.002.450.000	256.163.960.000	132.475.350.000	388.639.310.000
28	Nusa Tenggara Barat	314.608.240.000	124.702.270.000	439.310.510.000	16.173.300.000	6.410.590.000	22.583.890.000	330.781.540.000	131.112.860.000	461.894.400.000
29	Nusa Tenggara Timur	492.549.340.000	187.052.340.000	679.601.680.000	25.320.480.000	9.616.240.000	34.936.720.000	517.869.820.000	196.668.580.000	714.538.400.000
30	Maluku	143.161.980.000	64.445.990.000	207.607.970.000	7.359.620.000	3.314.280.000	10.673.900.000	150.521.600.000	67.760.270.000	218.281.870.000
31	Maluku Utara	102.871.120.000	42.470.780.000	145.341.900.000	5.287.860.000	2.183.250.000	7.471.110.000	108.158.960.000	44.654.030.000	152.813.000.000
32	Papua	241.180.820.000	74.425.040.000	315.605.860.000	12.400.400.000	3.826.190.000	16.226.590.000	253.581.220.000	78.251.230.000	331.832.450.000
33	Papua Barat	81.694.740.000	28.303.440.000	109.998.180.000	4.200.360.000	1.454.790.000	5.655.150.000	85.895.100.000	29.758.230.000	115.653.330.000
	<b>Total</b>	<b>15.749.126.860.000</b>	<b>6.691.988.560.000</b>	<b>22.441.115.420.000</b>	<b>809.653.900.000</b>	<b>344.030.640.000</b>	<b>1.153.684.540.000</b>	<b>16.558.780.760.000</b>	<b>7.036.019.240.000</b>	<b>23.594.800.000.000</b>

Catatan:

<sup>1)</sup> BOS yang disalurkan per triwulan sebesar 1/4 (satu per empat) dari Jumlah alokasi BOS

<sup>2)</sup> Dana Cadangan BOS akan disalurkan setelah ada rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN TU. KEMENTERIAN

GIATCO  
NIP. 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN

KOP  
KEPALA  
DAERAH

LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
TAHUN ANGGARAN 2012  
PROVINSI ... (1)  
TRIWULAN ... (2)

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Triwulan I	: Rp	(3)
- Triwulan II	: Rp	(4)
- Triwulan III	: Rp	(5)
- Triwulan IV	: Rp	(6)
- Jumlah	: Rp	(7)

Realisasi Penyaluran ke Sekolah melalui SP2D Provinsi

- Kumulatif s.d Triwulan sebelumnya	: Rp	(8)
- Triwulan ini	: Rp	(9)
- Kumulatif s.d Triwulan ini	: Rp	(10)

Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah : Rp (11)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat (12), Tanggal (13)

Gubernur ... (14)

(tanda tangan asli dan stempel basah) (15)

Nama (16)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PENYALURAN

NO.	URAIAN
1	Diisi nama provinsi.
2	Diisi triwulan berkenaan dan Laporan dibuat per triwulan (tidak digabung).
3	Diisi transfer Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I.
4	Diisi transfer BOS dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II.
5	Diisi transfer BOS (termasuk Dana Cadangan BOS) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah triwulan III.
6	Diisi transfer BOS (termasuk Dana Cadangan BOS) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV.
7	Diisi jumlah transfer BOS (termasuk Dana Cadangan BOS) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah (nomor 3+4+5+6).
8	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan BOS yang disalurkan apabila terdapat kurang salur) ke sekolah pada triwulan sebelumnya.
9	Diisi jumlah penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan BOS yang disalurkan apabila terdapat kurang salur) ke sekolah pada triwulan berkenaan (harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan untuk penyaluran BOS Tahun Anggaran 2012 pada triwulan berkenaan).
10	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan BOS yang disalurkan apabila terdapat kurang salur) ke sekolah pada triwulan sebelumnya dengan triwulan berkenaan. (nomor 8+9).
11	Diisi seluruh sisa BOS yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah. (nomor 10-7)
12	Diisi tempat dibuatnya laporan.
13	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
14	Diisi nama provinsi.
15	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
16	Diisi nama lengkap penandatanganan laporan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BANTU KEMENTERIAN

GIARTO

NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 201/PMK.07/2011  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2012

14/41277.pdf

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KOP  
KEPALA  
DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur ..... menyatakan telah merealisasikan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah pada Triwulan .... dalam Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....  
Gubernur

Nama

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
n.b.  
KEPALA BAGIAN TU. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP. 195904261984021001



MENTERI KEUANGAN,

etd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIC INDONESIA

FORMAT DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA  
 YANG DITERBITKAN UNTUK PENYALURAN

DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG DITERBITKAN UNTUK PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2012 TRIWULAN ....				
No.	SP2D		Nilai (Rp)	Keterangan
	Nomor	Tanggal		
Jumlah				

Tempat, tanggal ...  
 Kepala Biro/Dinas/Bagian<sup>1)</sup>  
 (tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama ...  
 NIP ...

**Calatan:**  
<sup>1)</sup>Diisi sesuai dengan nomenklatur instansi pengelola keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO UMUM  
 u.l.  
 KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN  
 BIRO UMUM  
 GIARTO  
 NIP. 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,  
 Lt.d.,  
 AGUS D.W. MARTOWARDOJO